

KAJIAN RANTAI NILAI KOMODITAS TALAS SATOIMO

(*Colocasia esculenta* var. *antiquorum*)



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021**

LAPORAN AKHIR

KAJIAN RANTAI NILAI
KOMODITAS TALAS SATOIMO
(*Colocasia esculenta* var. *antiquorum*)



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

TAHUN 2021

**KAJIAN RANTAI NILAI
KOMODITAS TALAS SATOIMO
(*Colocasia esculenta* var. *antiquorum*)
Pengaruh/ Penanggung Jawab :**

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

**Tim Pelaksana Kajian :
Bappelitbangda Prov Sulsel :**

Dr. Ir. Andi Saddapoto, MP (UNHAS)
Dr. Mahyuddin Riwu, M.Si (UNHAS)
Dr. Ibrahim Fattah, SH., MH (UMPAR)
Lusia Palulungan, SH., M.Hum (NGO)
Drs. Syamsuddin Awing (NGO)

Tim Peneliti

Ir. Yvonne Salindeho, MP
Andi Fitriani Yahya, ST
Fidaan Husein Azuz, S.Hut.,
MT.,MA

Tim Pengendali Mutu :

Prof. Dr. Ir. D. Agnes Rampisela, Ph.D.,M.Sc
Dr. A. Masniawaty, M. Si

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau seluruh
Laporan ini tanpa izin
tertulis dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menetapkan talas satoimo (*Colocasia esculenta* var *antiquorum*) sebagai komoditas unggulan dalam RPJMD 2018-2023. Penelitian ini dilakukan dengan 4 tujuan yaitu, pertama, untuk mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan dalam pengembangan talas satoimo pada setiap rantai nilainya, kedua, memahami potensi, persoalan, tantangan, kecenderungan, dan peluang pengembangan komoditas talas satoimo dari sektor hulu ke sektor hilir dalam kerangka analisis rantai nilai (*value chain analysis*), ketiga, mengidentifikasi kebijakan dan faktor lain yang berpengaruh positif dan negatif dalam pengembangan komoditas talas satoimo, dan keempat, merumuskan agenda kebijakan berbasis pengetahuan dan program intervensi pengembangan komoditas talas satoimo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode campuran dengan menitikberatkan pada analisis rantai nilai pada sektor hulu, manufaktur dan hilir yang dilihat dari aspek ekonomi dan lingkungan, aspek kelembagaan, aspek pemberdayaan masyarakat, aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial dan aspek kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat keberlanjutan program pengembangan talas satoimo sangat rendah yaitu 4% yang diakibatkan karena kurangnya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Walaupun demikian potensi pengembangan talas satoimo sangat terbuka luas berdasarkan hasil perhitungan ekonomi ($B/C = 1,61$) dan ditunjang pula dengan kebutuhan talas satoimo di Jepang yang besar (impor 26 ribu ton pada tahun 2020). Kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah provinsi adalah integrasi pengembangan talas satoimo dalam dokumen perencanaan dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten, memberikan penguatan kelembagaan untuk melindungi petani talas satoimo dari ketidakpastian pasar serta pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kesetaraan gender khususnya dalam diversifikasi produk turunan talas satoimo

Kata kunci: talas satoimo, rantai nilai, kebijakan

ABSTRACT

This research was motivated by the policy of the South Sulawesi Provincial Government that has determined taro satoimo (*Colocasia esculenta* var *antiquorum*) as a leading commodity in the 2018-2023 middle years planning (RPJMD). This research was conducted with 4 objectives: first, to identify and to map stakeholders in the development of taro satoimo in each value chain, second, to understand the potentials, problems, challenges, trends, and opportunities for the development of taro satoimo commodity from the upstream sector to the downstream sector within the framework of value chain analysis, third, to identify policies and other factors which have effects on the development of satoimo taro commodity, and fourth, to formulate a knowledge-based policy agenda and intervention program for satoimo taro commodity development. This research was conducted using mixed methods with an emphasis on value chain analysis in the upstream, manufacturing and downstream sectors viewed from the economic and environmental aspects, institutional aspects, community empowerment aspects, gender equality and social inclusion aspects and policy aspects. This study found that the level of sustainability of the satoimo taro development program was very low at 4% due to a lack of guidance and assistance from the provincial and district governments. However, the potential for the development of satoimo taro is very wide open based on the results of economic calculations ($B/C = 1.61$) and is also supported by the large demand for satoimo taro in Japan (imports 26 thousand tons in 2020). The policies needed to be taken by the provincial government are integrating satoimo taro development into planning documents from the provincial to the district level, providing institutional strengthening to protect satoimo taro farmers from market uncertainty and empowering the community by paying attention to gender equality especially in the diversification of satoimo taro derivative products.

Keywords: taro satoimo, value chain, policy

Kata Pengantar

Ada rasa syukur dan bangga ketika Tim peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Rantai Nilai Komoditas Talas Satoimo (*Colocasia esculenta var. antiquorum*) di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan replikasi kolaborasi dari penelitian Rantai Nilai Komoditas sutra sebelumnya pada tahun 2020. Penelitian Talas kemudian diimplementasikan pada tahun 2021 sebagai hasil agenda setting yang telah disepakati sebelumnya dengan BaKTI untuk diteliti.

Penelitian Rantai Nilai Komoditas Talas Satoimo merupakan kolaborasi triple helix dari unsur Akademisi (Univeristas Hasanuddin dan Universita Muhammadiyah), Lembaga Swadaya Masyarakat (Pilar Nusantara) dan Pemerintah (Bappelitbangda Provinsi Sulsel), tidak saja dari segi prosesnya tetapi juga kolaborasi para penilai dan pengawas serta menggunakan berbagai macam metode untuk memotret dan menganalisis berbagai persoalan talas satoimo di Sulawesi Selatan.

Harapan kami agar penelitian kolaborasi para pihak dan kolaborasi metodologi mengaplikasikan berbagai disiplin ilmu, dari berbagai latar belakang institusi yang telah melihat dan menemukenali fakta lapangan tentang perkembangan program komoditas unggulan talas satoimo, serta menghasilkan rekomendasi kuat untuk diimplementasikan langsung oleh instansi terkait yang mempunyai tupoksi pengembangan talas dalam rantai nilai komoditas ini. Diharapkan rekomendasi hasil penelitian talas satoimo ini sebagai dasar perencanaan instansi ke depan agar program dan kegiatan bisa lebih mengenai sasaran dan targetnya.

Terimakasih kepada tim peneliti yang dengan keterbatasan berhasil memotret pelaksanaan komoditas Talas satoimo di berbagai kabupaten dan menangkap bukti dan fakta rantai nilai talas satoimo dari

segi ekonomi, kelembagaan, pemberdayaan manusia, Gesi dan kebijakannya. Penelitian ini makin menambah khasanah pengetahuan berbasis bukti bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga apa yang dihasilkan bermanfaat bagi kita sekalian.

Makassar, Desember 2021

Kepala Badan

Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip: 196704271993031015

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SUSUNAN TIM PENELITI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Kajian	4
1.4 Output Kajian	4
1.5 Manfaat dan Hasil Kajian	5
1.6 Ruang Lingkup	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	7
2.1.1 Rantai Nilai	8
2.1.2 Ekonomi dan Lingkungan	10
2.1.3 Kelembagaan	11
2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat	12
2.1.5 Kebijakan	14
2.1.6 Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial	19
2.2 Kerangka Pemikiran	20
 BAB III METODE KAJIAN	
3.1 Pendekatan Multi Dimensi Pada Kajian Rantai Nilai Talas	23
3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	23
3.3 Metode Pengumpulan Data	24
3.4 Metode Analisis Data	24
3.4.1 Analisis Rantai Nilai	24
3.4.2 Analisis Ekonomi dan Lingkungan	27
3.4.3 Analisis Kelembagaan	33
3.4.4 Analisis Pemberdayaan Masyarakat	33

3.4.5	Analisis Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial	35
3.4.6	Analisis Kebijakan	37
3.5	Etika penelitian	39
3.6	Defenisi Operasional	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Sejarah dan Potensi Pengembangan Talas Jepang di Sulawesi Selatan	44
4.1.1	Sejarah Pengembangan Talas Jepang Satoimo Di Sulawesi Selatan.....	44
4.1.2	Potensi Pengembangan Talas di Sulawesi Selatan.....	47
4.2	Analisis Rantai Nilai Talas Satoimo di Sulawesi Selatan	49
4.2.1	Proses Inti dan Pelaku Rantai Nilai Talas Satoimo di Sulawesi Selatan.....	49
4.2.2	Peranan dan Fungsi Pelaku Rantai Nilai Talas Jepang di Sulawesi Selatan.....	53
4.2.3	Struktur Rantai Nilai Talas Jepang di Sulawesi Selatan	59
4.3	Sektor Hulu	61
4.3.1	Aspek Ekonomi dan Lingkungan	61
4.3.2	Aspek Kelembagaan	68
4.3.3	Aspek Pemberdayaan Masyarakat	74
4.3.4	Aspek Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial	79
4.3.5	Aspek Kebijakan	86
4.4	Sektor Manufaktur	93
4.4.1	Aspek Ekonomi dan Lingkungan	93
4.4.2	Aspek Kelembagaan	95
4.4.3	Aspek Pemberdayaan Masyarakat	96
4.4.4	Aspek Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial	96
4.4.5	Aspek Kebijakan	97
4.5	Sektor Hilir	99
4.5.1	Aspek Ekonomi dan Lingkungan	99
4.5.2	Aspek Kelembagaan	101
4.5.3	Aspek Pemberdayaan Masyarakat	101
4.5.4	Aspek Kebijakan	102

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	106
5.2	Saran	109
5.3	Rekomendasi Kebijakan	110

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Talas Satoimo di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020/ 2021	48
Tabel 4.2.	Karakteristik Lokasi Usaha Tani Talas Satoimo.....	62
Tabel 4.3.	Analisis Biaya Usaha Tani Talas Satoimo	66
Tabel 4.4.	Penerimaan dan Keuntungan Usaha Tani Talas Satoimo...	68
Tabel 4.5.	Karakteristik Kontrak Responden	69
Tabel 4.6.	Karakteristik Kelompok Tani	73
Tabel 4.7.	Keikutsertaan Petani dalam Pelatihan Pengembangan Talas Satoimo	75
Tabel 4.8.	Pendampingan Petani dalam Pengembangan Talas Satoimo.....	77
Tabel 4.9.	Bentuk Pemberdayaan pada Sektor Hulu	79
Tabel 4.10.	Keterlibatan Perempuan dalam Pertanian Talas	80
Tabel 4.11.	Keterkaitan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lokasi Penelitian	87
Tabel 4.12.	Impor Negara Jepang Terhadap Komoditas Talas Satoimo (HS 071440), Taro (<i>Colocasia spp.</i>) dari Berbagai Negara, Tahun 2020	101
Tabel 4.13.	Bentuk Pemberdayaan pada Sektor Hilir.....	102
Tabel 5.1.	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Talas Satoimo di Provinsi Sulawesi Selatan.....	112

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pikir	22
Gambar 3.1. Tata Kelola Rantai Nilai	27
Gambar 4.1. Grafik Proses Inti dalam Rantai Nilai Talas Satoimo di Sulawesi Selatan	52
Gambar 4.2. Struktur Aliran Produk dalam Rantai Nilai Talas Satoimo di Sulawesi Selatan	60
Gambar 4.3. Struktur Aliran Informasi dan Finansial dalam Rantai Nilai Talas Satoimo di Sulawesi Selatan	61
Gambar 4.4. Rata-rata Luas Lahan Menurut Jenis Lahan Usaha Tani Talas Satoimo	63
Gambar 4.5. Produktivitas Usaha Tani dan Persentase Hasil Jual Talas Satoimo	65
Gambar 4.6. Proses Produksi Talas Satoimo	95
Gambar 4.7. Keterkaitan Industri dalam Rantai Nilai Talas Satoimo	105

DAFTAR SINGKATAN

APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

APKM: Akses Partisipasi Kontrol dan Manfaat.

BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia.

BEP: Break Event Point

BPP: Balai Penyuluhan Pertanian.

BPS: Badan Pusat Statistik.

BPTP: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

CEDAW: *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.*

CSO: *Community Social Organization.*

Dinas TPH&P: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

FGD: *Focused Group Discussion.*

GESI: *Gender Equality and Social Inclusion.* (Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial).

KIMA: Kawasan Industri Makassar.

LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat.

NGO: *Non Governmental Organization.*

OPD: Organisasi Perangkat Daerah:

PDRB: Produk Domestik Regional Bruto.

PSBB: Pembatasan Sosial Berskala Besar.

PPL: Petugas Penyuluh Lapangan

PRA: *Participatory Rural Appraisal.*

RDTRD: Rencana Detil Tata Ruang Daerah.

RKPD: Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RUTR: Rencana Umum Tata Ruang.

SDA: Sumber Daya Alam.

SDM: Sumber Daya Manusia.

SMA: Sekolah Menengah Atas.

SMP: Sekolah Menengah Pertama.

SOP: *Standar Operasional Procedure.*

TGUPP: Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.

UMKM: Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Selatan dikenal sebagai lumbung pangan khususnya beras, namun saat ini sedang gencarnya dilakukan diversifikasi dalam bentuk pengembangan budi daya tanaman pangan untuk menjaga ketahanan pangan dan menghindari krisis pangan. Pengembangan suatu komoditas memerlukan adanya riset untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil riset tersebut yang akan menunjukkan suatu siklus lengkap penyusunan kebijakan berbasis bukti, dimana suatu agenda kebijakan prioritas daerah didukung oleh kajian terapan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Pada bulan Mei 2019, telah dilaksanakan lokakarya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan BaKTI yang dihadiri stakeholder kunci seperti OPD di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, TGUPP, Ormas/CSO, perguruan tinggi dan dunia usaha. Isu strategis Provinsi Sulawesi Selatan yang mengemuka pada pertemuan tersebut antara lain adalah: i) kesenjangan sosial ekonomi, ii) integrasi perencanaan dan penganggaran, dan iii) tata kelola ekonomi daerah yang mendukung pengembangan komoditas lokal. Tiga isu ini menjadi materi inti yang dibahas melalui serangkaian pertemuan kolaborasi multipihak yang dihadiri OPD teknis level provinsi, TGUPP, Ormas/LSM, akademisi, dan dunia usaha. Setelah melalui serangkaian pertemuan multipihak, forum menyepakati fokus pada isu tata kelola ekonomi daerah yang mendukung pengembangan komoditas lokal untuk mendukung pencapaian misi ke tiga serta berupaya mengarahkan untuk berkontribusi pada pencapaian misi ke lima RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu ‘‘Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelanjutan’’.

Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam, khususnya bidang pertanian dipandang strategis mengingat kontribusinya

terhadap PDRB Sulawesi Selatan mencapai 21,28 persen pada 2019 (BPS 2020), lebih rendah dari tahun 2016 yang menyumbang sekitar 23,43 persen. Selain sebagai penyumbang PDRB terbesar, sektor pertanian juga menjadi penyerap utama tenaga kerja di Sulawesi Selatan. BPS (2020) mencatat sekitar 1,3 juta tenaga kerja atau 36 persen dari total tenaga kerja Sulawesi Selatan menggantungkan hidupnya dan rumah tangganya di sektor pertanian.

Tidaklah mengherankan ketika penurunan produksi pertanian tiga tahun terakhir (2016-2019) berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi makro di Sulawesi Selatan. Data ini menunjukkan bahwa terjadi pelambatan sebesar 0,5 persen pada perekonomian di Sulawesi Selatan dalam tiga tahun terakhir, dan ada indikasi berpotensi melambat ke depannya (sebelum pandemi COVID-19).

Forum multipihak yang difasilitasi oleh program kebijakan berbasis pengetahuan mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap penurunan produksi sektor pertanian sebagai dampak perubahan iklim global yang ekstrim dan mulai jenuhnya beberapa komoditas unggulan sektor pertanian yang menghadapi tantangan yang relatif komprehensif. Pada level kebijakan, landasan pengembangan komoditas relatif rapuh, belum memiliki *grand design* yang berbasis hasil kajian komprehensif. Supra struktur pengembangan dan pengendalian komoditas pun bekerja secara sektoral, sebagai implikasi belum terbangunnya sistem koordinasi dan konektivitas antar OPD yang berwenang di hulu dan hilir maupun antara OPD di provinsi dan kabupaten. Di tingkat petani, sistem *community farming* dengan kelembagaan petani yang lemah berdampak pada rendah dan terbatasnya keahlian dalam memastikan standar mutu dan kuantitas produk secara konsisten. Melalui forum multipihak, ditawarkan alternatif solusi, yaitu : i) Menemukan pusat-pusat perekonomian baru yang berbasis komoditas baru, ii) Pengembangan komoditas berbasis kajian komprehensif dari hulu ke hilir untuk memudahkan identifikasi potensi

pengembangannya, tantangan dan intervensi. Hasil kajian ini akan menjadi dasar merumuskan *road map* komoditas, dan iii) *policy paper* dan kebijakan pengembangan komoditas berbasis hasil kajian.

Selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengarusutamakan (*mainstreaming*) kajian/riset pada setiap agenda kebijakan maka pada tahap awal akan dilakukan kajian rantai nilai komoditas talas satoimo (*Colocasia esculenta* var *antiquorum*). Talas satoimo merupakan komoditas baru dengan prospek ekonomi tinggi yang memiliki peluang pasar ekspor yang jelas dan kajiannya masih terbatas secara lokal. Pengembangan komoditas ini diprioritaskan oleh pemerintah provinsi bahkan menempatkannya sebagai salah satu dari empat penggerak ekonomi di sektor pertanian. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung hal ini dalam bentuk program bantuan/hibah modal penanaman talas satoimo kepada petani yang meliputi 178 hektar di sepuluh kabupaten di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2019 dan menyiapkan industri pengolahannya secara lokal. Namun demikian ketersediaan industri pengolahan belum menjadi solusi atas permintaan pasar. Oleh karena itu perlu adanya kajian secara komprehensif dari hulu ke hilir guna mengidentifikasi titik lemahnya dan peluang pengembangannya dalam rangka memudahkan intervensi kebijakan secara akurat.

Berdasarkan dasar pikir ini, kajian rantai nilai talas satoimo diperlukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai basis dalam menetapkan intervensi kebijakan secara tepat.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari kajian ini adalah:

1. Siapa saja *stakeholder* dalam pengembangan komoditas talas satoimo dari hulu ke hilir?

2. Faktor-faktor apa saja yang berpotensi atau menghambat, tantangan, kecenderungan, dan peluang pengembangan komoditas talas satoimo dari sektor hulu ke sektor hilir dalam kerangka analisis rantai nilai (*value chain analysis*)?
3. Kebijakan apa dan faktor lain yang berpengaruh – positif dan negatif - dalam upaya pengembangan komoditas talas satoimo?
4. Kebijakan apa saja yang dibutuhkan dalam program intervensi pengembangan komoditas talas satoimo serta bagaimana sebaiknya hubungan antar pemerintahan (*intergovernmental relation/multilevel*)?

1.3. Tujuan Kajian

Adapun tujuan dari kajian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan memetakan *stakeholders* dalam pengembangan komoditas talas satoimo pada setiap rantai nilainya.
2. Memahami potensi, persoalan, tantangan, kecenderungan, dan peluang pengembangan komoditas talas satoimo dari sektor hulu ke sektor hilir dalam kerangka analisis rantai nilai (*value chain analysis*);
3. Mengidentifikasi kebijakan dan faktor lain yang berpengaruh – positif dan negatif - dalam pengembangan komoditas talas satoimo;
4. Merumuskan agenda kebijakan berbasis pengetahuan dan program intervensi pengembangan komoditas talas satoimo.

1.4. Output Kajian

Adapun output dari kajian ini adalah :

1. Laporan hasil gambaran rantai nilai talas satoimo yang melibatkan petani, perempuan, dan kelompok marjinal
2. Rekomendasi kebijakan pengembangan komoditas talas satoimo

1.5. Manfaat dan Hasil Kajian

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Hasil kajian akan diformulasikan menjadi rekomendasi kepada pemerintah untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah untuk mendukung pengembangan komoditas talas satoimo sebagai strategi intervensi dalam pengembangannya.
2. Rekomendasi hasil kajian juga dapat digunakan oleh pihak lain non pemerintah (swasta, NGOs dan pelaku rantai nilai talas satoimo)

1.6. Ruang Lingkup

Kajian komoditas talas satoimo dilakukan dengan menggunakan metode analisis rantai nilai (*value chain analysis*). Kajian ini menggunakan pendekatan pada aspek ekonomi dan lingkungan hidup, kelembagaan, pemberdayaan kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) dan aspek kebijakan yang relevan dalam proses desain, pelaksanaan, dan analisis kajian. Untuk itu, kajian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan studi pada tiga tingkatan proses rantai nilai berikut:

1. Pada level mikro: input, biaya produksi, biaya pemasaran, margin tiap pelaku rantai nilai, penjualan, konsumsi, peningkatan pendapatan rumah tangga dan peningkatan kualitas hidup keluarga.
2. Pada level meso: lingkungan kelompok, asosiasi kelompok tani.
3. Pada level makro: agregat produksi, luas lahan, data ekspor.
4. Siapa dan bagaimana peran dan pengaruh serta akses pelaku rantai nilai komoditas (aktor/lembaga) terhadap faktor produksi dan pasar.

5. Identifikasi potensi dan keterbatasan kemitraan dalam rantai nilai talas satoimo.
6. Identifikasi isu-isu prioritas dan masalah masalah strategis pada bidang-bidang terkait.
7. Perumusan strategi, program dan kegiatan pengembangan komoditas talas satoimo dari hulu ke hilir.
8. Perumusan kerangka dan mekanisme kerjasama yang meliputi peranan pemerintah provinsi dan kabupaten di dalam suatu sistem dukungan utamanya dalam penciptaan aturan dan pengembangan SDM serta kerangka kerjasama dengan pihak NGO, universitas, sektor swasta serta lembaga penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Talas merupakan salah satu tanaman monokotil dari famili *Araceae*. talas diidentifikasi memiliki beragam jenis, yaitu talas raksasa (*Alocasia macrorrhiza*), taro rawa raksasa (*Cytosperma chamissonis*), talas kimpul atau tannia (*Xanthosoma sagittifolium*) dan talas satoimo (*Colocasia esculenta* var. *antiquorum* (Schott) F.T. Hubb. & Rehder). Talas kimpul (*X. sagittifolium*) adalah yang paling mirip dengan talas taro (Minantyorini dkk., 2002).

Secara umum talas dipercaya berasal dari Asia Tengah-Selatan, yang menurut beberapa sumber menyebar sampai ke Asia Tenggara dan Asia Selatan, Kepulauan Pasifik dan ke arah barat sampai Madagaskar dan Afrika. Tanaman ini merupakan tanaman penting di beberapa negara seperti Mesir, Hawaii, Filipina, negara Pasifik tertentu seperti Tonga, Somoa, Fiji, dan daerah kawasan Karibia.

Berdasarkan syarat tumbuhnya, talas dapat dibudidayakan pada daerah beriklim lembab (curah hujan tinggi) dan daerah beriklim kering (curah hujan rendah), tetapi ada kecenderungan bahwa tanaman talas akan lebih baik tumbuh pada daerah yang beriklim iklim panas. Curah hujan optimum untuk pertumbuhan tanaman talas adalah 175 cm per tahun. Talas juga dapat tumbuh di dataran tinggi dan tumbuh sangat baik pada lahan yang bercurah hujan 2.000 mm/tahun atau lebih. Selama masa pertumbuhan tanaman talas menyukai tempat terbuka dengan penyinaran penuh serta tanaman ini mudah tumbuh pada lingkungan dengan suhu 25-30° C dan kelembaban yang tinggi (Prihatman, 2000).

Hasil penelitian produktivitas talas satoimo menunjukkan bahwa produktivitas talas satoimo lebih tinggi sekitar 70% dari dataran rendah. Produktivitas talas satoimo di Kabupaten Soppeng, yang merupakan dataran

tinggi, mencapai rata-rata 6.544,5 kg/ha sementara di dataran rendah yakni Kabupaten Maros mencapai 1.600 kg/ha (Masniawati, 2019). Untuk lebih meningkatkan produktivitas talas satoimo, dianjurkan mengikuti standar pelaksanaan pembudidayaan talas satoimo. Penanaman talas satoimo harus disesuaikan dengan perkiraan curah hujan dan input penanaman yang digunakan sebaiknya kombinasi pupuk organik dan pupuk anorganik. Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Kabupaten Soppeng maupun Kabupaten Maros memiliki potensi budidaya tani talas satoimo. Namun demikian, praktik budidaya dan pengembangannya belum dikelola secara optimal. Rekomendasi atas penelitian ini adalah diperlukan kerjasama multi pihak dalam upaya pengembangan dan peningkatan produktivitas talas satoimo di Sulawesi Selatan.

2.1.1 Rantai Nilai

Istilah rantai nilai (*value chain*) mengacu pada rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menghadirkan produk atau jasa mulai dari tahap konseptual, produksi, pengiriman ke konsumen akhir dan pemusnahan setelah penggunaannya (Kaplinsky dan Morris 2003). Rantai nilai terbentuk ketika semua pelaku dalam rantai tersebut bekerja berkolaborasi untuk memaksimalkan nilai sepanjang rantai tersebut. Definisi ini dapat ditafsirkan secara sempit maupun luas.

Secara sempit, rantai nilai mencakup rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan untuk menghasilkan keluaran tertentu. Hal ini mencakup tahap konsep dan perancangan, proses diperolehnya input/sarana produksi, proses produksi, kegiatan pemasaran dan distribusi, serta kinerja layanan purna jual. Seluruh kegiatan tersebut membentuk keseluruhan ‘rantai’ yang menghubungkan produsen dan konsumen, dan tiap kegiatan menambahkan ‘nilai’ pada produk akhir.

Secara luas, rantai nilai melihat berbagai kegiatan kompleks yang dilakukan oleh berbagai pelaku (produsen utama, pengolah, pedagang, penyedia jasa) untuk membawa bahan baku melalui suatu rantai hingga menjadi produk akhir yang siap jual. Rantai nilai yang luas ini dimulai dari sistem produksi bahan baku yang akan terus terkait dengan kegiatan usaha lainnya dalam perdagangan, perakitan, pengolahan, dan lain-lain. Pendekatan ini tidak hanya melihat pada kegiatan yang dilakukan oleh satu usaha tetapi mencakup semua hubungan yang ada baik pada suplai, produksi, distribusi sampai konsumen akhir.

Konsep rantai nilai mencakup isu-isu organisasi dan koordinasi, strategi, dan hubungan kekuatan antara berbagai pelaku di dalam rantai nilai. Penting untuk memahami bahwa analisis rantai nilai membutuhkan investigasi menyeluruh atas segala hal yang terjadi antara para pelaku dalam suatu rantai, hal-hal apa saja yang menyatukan para pelaku tersebut, informasi apa yang dibagikan, serta hubungan antara para pelaku berubah dan berkembang.

Hal lain terkait rantai nilai adalah konsep tata kelola yang merupakan hal yang amat penting yaitu aspek sosial maupun lingkungan dalam analisis rantai nilai. Terbentuknya (atau berubah dan berkembangnya) rantai nilai dapat memberikan tekanan terhadap sumber daya alam (seperti air atau tanah) yang dapat mengakibatkan degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, atau polusi. Selain itu, perkembangan rantai nilai dapat mempengaruhi hubungan sosial dan norma-norma tradisional. Misalnya, hubungan kekuasaan di dalam rumah tangga atau masyarakat dapat mengalami perubahan, atau kelompok masyarakat yang rentan atau yang paling miskin dapat mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh cara kerja pihak yang terlibat dalam rantai nilai.

Pendekatan Rantai Nilai :

1. Business Approach
2. Policy Making

3. Community Approach

2.1.2 Ekonomi dan Lingkungan

Konsep ekonomi menyebut pilihan dalam kondisi keterbatasan sebagai prinsip “trade off”. Trade off berarti pertukaran bahwa alokasi sumberdaya hanya dapat diberikan pada satu objek sehingga alokasi ke satu objek yang kita pilih menyebabkan objek lain harus dikorbankan. Mengorbankan sesuatu hal yang lain itu dalam prinsip ekonomi disebut sebagai *opportunity cost* yang artinya biaya kesempatan yang hilang dan harus dibayar, karena sudah memilih kesempatan atau peluang yang lain. Kesempatan yang dipilih itu mempunyai nilai dan manfaat yang berbeda, penentuan terhadap sesuatu yang dipilih secara ilmiah dapat dilakukan dengan menghitung atau memperkirakan untung dan rugi yang akan didapatkan (Hadad, 2020).

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, masalah *trade off* muncul pada area kebijakan di mana ada masalah konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Karena menurut konsep ekonomi, tujuan utama pembangunan adalah memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sumber Daya alam diperlukan sebagai bahan baku, sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan produksi. Di lain pihak penggunaan sumber daya alam akan menyebabkan berubahnya kondisi baik bentang alam maupun kandungan sumber dayanya. Sumber Daya alam yang dieksploitasi dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk akumulasi modal dan demi pertumbuhan ekonomi bila tidak diperhitungkan dengan baik akan mengganggu kelestarian sumber daya alam sebagai bagian dari *trade off* pembangunan ekonomi. Eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam dapat menimbulkan dampak kerusakan ekosistem dan bencana lingkungan. Kerusakan lingkungan dianggap sebagai “biaya” yang harus dibayar untuk “manfaat” pembangunan ekonomi yang diperoleh masyarakat. Dengan demikian pengambilan keputusan terhadap pilihan yang akan dibuat harus

diambil dengan berdasarkan hitungan yang matang dengan memperhitungkan biaya lingkungan dalam jangka yang panjang (Hadad, 2020). Dengan demikian untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pertimbangan ekologi atau lingkungan maka perspektif sistem sosial ekologi dibutuhkan dalam merancang ekonomi politik (Yang, 2021).

2.1.3 Kelembagaan

Dalam satu dekade terakhir wacana yang banyak berkembang adalah pentingnya faktor “kelembagaan” (institusi) yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengalaman di beberapa negara adalah bahwa faktor SDA, SDM dan teknologi bukan satu-satunya penentu pertumbuhan ekonomi tetapi terdapat faktor lain yang harus diikutsertakan yaitu faktor kelembagaan. Kelembagaan berbeda dengan faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi. Jika faktor SDM, SDA dan teknologi dapat dipisahkan dengan realitas sosial, maka kelembagaan justru hidup dan berjalan di atas realitas sosial masyarakat (Yustika, 2006).

Kasper dan Streit (1998) menjelaskan bahwa institusi adalah aturan buatan manusia yang membatasi kemungkinan perilaku menyimpang dan oportunistik dalam interaksi manusia. Institusi terdapat dalam suatu komunitas dan selalu diperkuat dengan sanksi. Institusi tanpa sanksi menjadi tidak berguna. Hanya jika sanksi diterapkan maka institusi akan membuat tindakan manusia dapat diperkirakan. Aturan dengan sanksi mengarahkan tindakan manusia dalam jalur yang dapat diperkirakan. Jika berbagai aturan konsisten satu sama lain, hal ini akan memfasilitasi kerjasama antara orang, sehingga mereka dapat mengambil keuntungan dari pembagian kerja dan kreativitas manusia. Peranan utama institusi dalam masyarakat adalah mengurangi ketidakpastian dengan membuat struktur yang stabil pada interaksi manusia. Hasil penelitian Andriyanti (2005) menunjukkan bahwa kelembagaan kemitraan antara PT Nestle dengan masyarakat penghasil kopi di Desa Ngarip

Kecamatan Ulu Belu Propinsi Lampung mampu meningkatkan mutu kopi dan menurunkan biaya transaksi dibandingkan dengan pola pemasaran tradisional. *Contract farming* dapat juga dimaknai sebagai sistem produksi dan pemasaran berskala menengah, dimana terjadi pembagian beban risiko produksi dan pemasaran diantara pelaku agribisnis dan petani, peternak dan nelayan kecil; kesemuanya ini dilakukan dengan tujuan mengurangi biaya transaksi. Menurut Eaton dan Shepherd (2001) dalam bukunya *Contract Farming: Partnership for Growth*, *contract farming* dapat dibagi menjadi lima model.

- Pertama, *centralized model*, yaitu model yang terkoordinasi secara vertikal, dimana sponsor membeli produk dari para petani dan kemudian memprosesnya atau mengemasnya dan memasarkan produknya.
- Kedua, *nucleus estate model*, yaitu variasi dari model terpusat, dimana dalam model ini sponsor dari proyek juga memiliki dan mengatur tanah perkebunan yang biasanya dekat dengan pabrik pengolahan.
- Ketiga, *multipartite model*, yaitu biasanya melibatkan badan hukum dan perusahaan swasta yang secara bersama berpartisipasi bersama para petani.
- Keempat, *informal model*, yaitu model yang biasanya diaplikasikan terhadap wiraswasta perseorangan atau perusahaan kecil yang biasanya membuat kontrak produksi informal yang mudah dengan para petani berdasarkan musiman.
- Kelima, *intermediary model*.

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya semaksimal mungkin. Penggunaan *livelihoods analysis* dalam rantai nilai bisa mengungkap dua hal (Challies, 2008). Pertama, tingkat diversifikasi dalam rumah tangga pedesaan sehingga bisa menyingkap pentingnya integrasi ke dalam rantai

komoditas tertentu dibandingkan dengan sumber pendapatan lain (*on farm* maupun *off farm*). Kedua, fokus pada kerentanan dan ketangguhan rumah tangga pedesaan menghadapi guncangan dan kecenderungan dari luar, dan ketika sebuah rumah tangga sangat bergantung pada integrasi dalam rantai komoditas tertentu, sejumlah tekanan mungkin muncul sebagai hasil dari dinamika yang terjadi dalam rantai.

Dengan dua alasan ini mengartikan bahwa kita bisa menggunakannya untuk memahami mengapa sebuah keluarga memutuskan melakukan budidaya talas satoimo, bagaimana mereka memulai, apa yang terjadi dalam penghidupan selama mereka berada di dalam rantai, dan akhirnya bagaimana mereka keluar.

Keberhasilan pelaksanaan program yang melibatkan masyarakat yang dijalankan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di desa dapat dilihat dari berbagai sisi. Salah satu program sebagai best practice dalam pengembangan sosial di Brazil memperlihatkan kunci keberhasilan program tersebut yaitu 1) adanya asosiasi/perkumpulan dalam komunitas untuk menginisiasi, memfasilitasi dan mensupervisi kegiatan, 2) menurunkan pengambilan keputusan pada level yang lebih rendah, 3) keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, 4) bantuan teknis dan pelatihan untuk menjamin keberlanjutan, 5) transparansi dalam proses penggunaan dana, 6) monitoring dan evaluasi dalam tingkatan rumah tangga, komunitas dan daerah, dan 7) pengawasan kualitas dalam tiap tahapan kegiatan untuk mengurai *bottleneck*. (Kuehnast, 2001). Dari sini dapat dilihat bahwa bantuan teknis dan pelatihan menjadi bagian dari kunci keberhasilan pelibatan masyarakat.

Dipertegas oleh Kumari bahwa hasil identifikasi para ahli dalam melihat parameter rantai nilai pertanian menempatkan faktor pengembangan kapasitas dalam urutan ke 3 setelah faktor teknologi dan diversifikasi produk, kemudian disusul dengan faktor fokus pada konsumen dan faktor daya saing.

Hal ini menandakan bahwa pengembangan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan produk di pedesaan. Ditambahkan pula bahwa keberhasilan pengembangan daerah pertanian sangat ditentukan oleh desain strategi pasar yang "matang" dalam pengembangan usaha tani kolektif (Kumari dkk., 2021). Sementara itu, koreksi yang diberikan terhadap tidak berkembangnya daerah pedesaan adalah bahwa intervensi pemerintah dalam pengembangan desa masih rendah, bukasan berarti bahwa tidak ada program untuk pengembangan desa atau programnya tidak berhasil sama sekali, namun kelemahannya ada pada intervensi yang lemah dalam strategi dan desain (Rao, 1983).

2.1.5 Kebijakan

Kebijakan publik secara sederhana merupakan bentuk pernyataan formal dari pemerintah tentang pilihan terbaik dari berbagai alternatif penyelesaian masalah publik. Peran kebijakan publik dan perumus kebijakan publik merupakan kebutuhan yang sangat vital.

Menurut Anderson, konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang mengatasi suatu masalah atau suatu permasalahan (Winarno, 2007). kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*) (Nugroho, 2003).

Menurut pendapat Carl Friedrich, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk tujuan yang dimaksud (Agustino, 2007). Sedangkan pendapat David Eston tentang kebijakan adalah suatu konseptualisasi yang telah disiapkan guna membantu mengidentifikasi

dan meneliti permasalahan utama yang akan dihadapi dalam studi luaran kebijakan (Varma, 2005).

Pakar Inggris, W. I. Jenkins, merumuskan kebijakan publik sebagai “Keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut” (Solichin, 2012).

Oleh karena itu, kebijakan itu bukan hanya suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, tetapi dapat pula dilakukan oleh kelompok atau individu (Winarno, 2007). Harold Laswell dan Abraham Kaplan (dikutip Dye, 1981) berpendapat bahwa kebijakan publik hendaklah berisi tujuan, nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Subarsono, 2005).

Ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan (Nugroho, 2009).

Berdasarkan empat kegiatan pokok di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan publik itu dilakukan secara berurut atau melewati tahapan kegiatan dimana satu sama lainnya saling berkaitan, dengan kata lain kegiatan kedua tidak bisa dilaksanakan jika kegiatan pertama belum selesai dilaksanakan. Dengan demikian makna yang terkandung dari kata kebijakan harus dipahami dalam konteks historis. Pasalnya, sebagaimana konsep publik, maka kebijakan yang senantiasa berubah ini menunjukkan kepada kita perubahan-perubahannya dalam praktik kebijakan (Parsons, 2006:14). Implementasi

kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2009). Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat karena di sini terdapat masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep namun muncul di lapangan.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi hal penentu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur yaitu (Subarsono, 2005):

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan, dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka inilah yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran informasi tersebut (Sugiyono, 2005). Oleh sebab itu, komunikasi harus mempunyai unsur :

- a. Ketetapan komunikasi dengan pelaksana.
- b. Konstan/keseragaman.
- c. Ukuran-ukuran dari tujuan itu harus dinyatakan dengan jelas.
- d. Mekanisme dari prosedur lembaga terlibat.
- e. Bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang mereka kerjakan.
- f. Komunikasi membutuhkan keakuratan.

- g. Implementasi ini tidak hanya diterima, namun mereka harus juga jalan, jika tidak para implementor akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan.
- h. Komunikasi ukuran implementasi adalah konsistensinya.
- i. Penolakan melalui kebijakan biasa mengarah baik pada rintangan total atau distorsi komunikasi.

2. Sumber Daya.

Sumber daya merupakan faktor penentu berikutnya, karena meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara baik, tetapi jika implementor tidak didukung oleh sumber daya, maka implementasi itu tidak mustahil mengalami hambatan atau pelaksanaannya kurang efektif. Cakupan sumber daya tersebut meliputi; kompetensi implementor, finansial, dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana.

Sebelum suatu kebijakan ditetapkan, perlu mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan antara lain: (i) apa masalah kebijakan itu; (ii) apa hasil-hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan di masa depan; (iii) apa pilihan kebijakan yang paling ideal untuk menghasilkan hasil kebijakan yang diharapkan tersebut; (iv) apa hasil kebijakan yang didapat setelah diimplementasikan; (v) bagaimana kinerja suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah yang dirumuskan.

Teori sistem kebijakan berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Dunn (2003) menyebutkan 3 (tiga) elemen kebijakan yaitu pelaku/aktor kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik. Kebijakan publik lahir karena tuntutan-tuntutan yang merupakan serangkaian pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang akan mempengaruhi pembuat kebijakan. Faktor lingkungan tersebut antara lain:

karakteristik sosial ekonomi, sumber daya alam, iklim, topografi, demografi, budaya dan sebagainya.

Sedangkan teori implementasi kebijakan berpandangan bahwa teori ini lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan (Abdul Wahab, 1991). *Implementation Gap* yaitu suatu keadaan di mana dalam suatu proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil dari implementasi kebijakan (Dunsire; Abdul Wahab, 2001).

Implementation Capacity adalah kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan/mengimplementasikan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai (Abdul Wahab, 2001). Kegagalan implementasi kebijakan ada dua kategori, yaitu: *non implementation* (tidak dapat diimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang kurang berhasil).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengembangkan budidaya talas sebagai salah satu komoditas pangan. Kebijakan ini memiliki dasar yang kuat karena dapat berkontribusi terhadap pencapaian misi No. 3 dan misi No. 5 RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sumber ekonomi baru“ dan “Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan“ kedua misi ini untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah” .

Untuk merealisasikan dan mewujudkan misi RPJMD di atas, dalam aspek kebijakan, perlu dianalisis apakah sudah ada kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung pengembangan budidaya talas

sebagai salah satu komoditi yang mendukung pencapaian misi tersebut (ketersediaan bibit, lokasi, budidaya, pembiayaan, dan pemasaran). Jika sudah ada, seperti apa bentuk kebijakan itu dan bagaimana implementasinya. Apakah talas itu secara reguler terdapat di dalam dokumen RKPD Provinsi dan dianggarkan di dalam APBD setiap tahun, apakah pemerintah kabupaten/kota sudah menindaklanjutinya dalam hal perencanaan dan penganggaran daerah (kebijakan anggaran), apakah talas sudah diintegrasikan dengan sektor pertanian di wilayah masing-masing. Namun jika belum ada kebijakan talas yang mendukung misi ke-3 dan ke-5 tersebut, maka perlu dianalisis apa faktor-faktor yang menjadi tantangan sehingga kebijakan itu tidak atau belum mendukung peningkatan produktivitas talas. Misi ke-3 dan ke-5 dalam RPJMD sangat strategis untuk meningkatkan kontribusi pertanian (pangan) terhadap PDRB karena pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

Agar kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif, maka harus diupayakan adanya dukungan dari publik. Untuk itu sebelum ditetapkan sebagai suatu kebijakan perlu dilakukan asesmen untuk menggali informasi dari masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan itu. Beberapa metode yang bisa digunakan seperti FGD, dengar pendapat atau konsultasi publik, dan sebagainya. Partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik sehingga tumbuh rasa memiliki dan adanya dukungan publik terhadap kebijakan itu.

2.1.6 Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural sedangkan Inklusi sosial adalah kondisi semua individu atau kelompok sosial dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan secara layak sesuai dengan hak-hak asasi manusia.

Integrasi Kesetaraan Gender ke dalam kebijakan dan program merupakan mandat negara termasuk Indonesia yang telah meratifikasi CEDAW (*Convention in Elimination Against Women*) melalui UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Salah satunya mengatur mengenai kewajiban negara untuk melakukan upaya-upaya yang layak di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki. Negara wajib untuk melakukan semua upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan dalam rangka untuk memastikan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Sementara itu, disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2.2. Kerangka Pemikiran

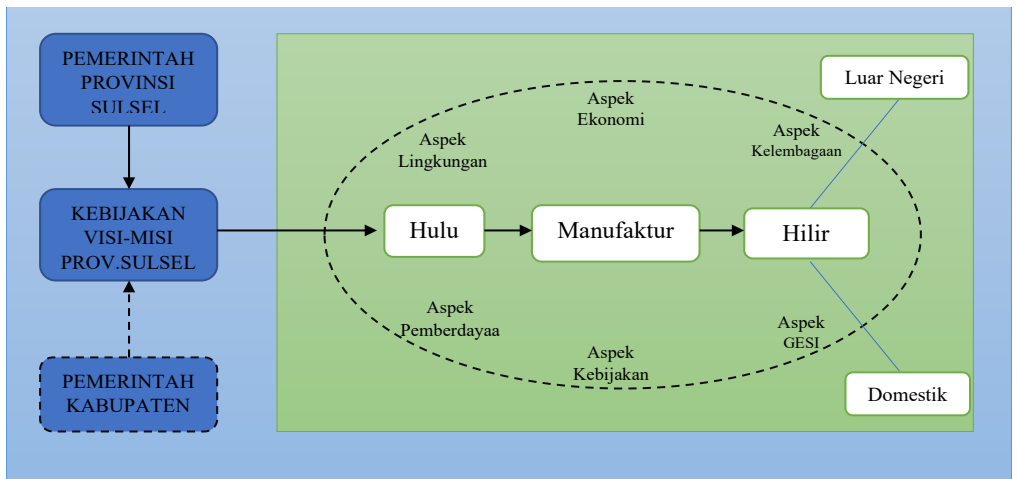
Pada umumnya daerah-daerah di Sulawesi Selatan memenuhi syarat untuk pertumbuhan talas satoimo dilihat dari kondisi alam, kondisi geografis dan iklimnya. Pada saat yang sama, beberapa spesies talas sejak lama dibudidayakan oleh masyarakat sebagai tanaman pelengkap dan bukan komoditas utama karena belum dikelola dalam skala ekonomi dan tidak berorientasi ekspor. Kenyataannya saat ini, talas satoimo memiliki peluang pasar ekspor yang diperlihatkan dengan adanya permintaan yang tinggi dari Jepang dan industri pengolahannya tersedia secara lokal. Namun demikian,

terdapat kesenjangan dan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan kehadiran industri pengolahan talas yang belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melihat hal ini sebagai peluang dan mengamanahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing komoditas unggulan daerah dengan pengembangan talas satoimo. Atas dasar inilah talas satoimo ditetapkan menjadi komoditas unggulan melalui RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Talas satoimo yang merupakan komoditas introduksi dari luar Sulawesi Selatan cocok dengan iklim dan persyaratan budi daya yang baik hampir di seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan. Untuk menggerakkan ekonomi rakyat, pemerintah mengupayakan pengembangan komoditas ini lebih meluas dan berorientasi ekspor. Dalam mendukung hal ini, pemerintah provinsi menyiapkan program dan mengembangkannya di 13 Kabupaten/Kota. Kebijakan pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan menyediakan bibit dan sarana produksi serta mengelola talas hingga dapat diekspor lewat kerja sama dengan eksportir. Setelah program ini berjalan 3 tahun perlu dikaji apakah komoditas ini telah dikembangkan sejalan dengan tujuan pemerintah serta mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itulah kajian rantai nilai talas satoimo diteliti dengan melihat secara komprehensif dari hulu, manufaktur dan hilir.

Kajian ini didesain untuk mengidentifikasi potensi produksi dan pasar serta menganalisis permasalahan pada berbagai aspek pada setiap rantai nilai talas satoimo meliputi aspek ekonomi, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, GESI dan kebijakan serta menganalisis peluang pengembangan dan intervensi kebijakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi serta produktivitas untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir kajian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Kerangka Pikir



BAB III METODE KAJIAN

3.1. Pendekatan Multi Dimensi Pada Kajian Rantai Nilai Talas

Pendekatan penelitian mengadopsi kerangka multidimensi (*mixed method*) dalam menilai rantai nilai komoditas talas Jepang. Alat analisis rantai nilai digunakan pada tahap awal melalui analisis terhadap pendapatan di dalam rantai nilai, sehingga dapat dilihat siapa saja yang memperoleh manfaat dari partisipasi dalam rantai nilai, dan pelaku mana yang memperoleh manfaat dari dukungan atau pengorganisasian yang lebih baik. Selain itu, analisis rantai nilai digunakan untuk mengkaji peran peningkatan (*upgrading*) dalam rantai nilai. Kajian ini akan mengikuti aliran isu utama yang ditemukan oleh analisis rantai nilai (*following the issue within value chain*) lalu diikuti dengan analisis-analisis lanjutan.

Selanjutnya pendekatan multidimensi mengikuti analisis rantai nilai untuk melihat rangkaian aspek di atas secara lebih terperinci. Analisis ekonomi dan lingkungan, kelembagaan, pemberdayaan dan analisis gender dan inklusi sosial (GESI) serta kebijakan diadopsi untuk melihat lebih jauh aktor yang mendapatkan manfaat, ketimpangan relasi gender, aliran distribusi, dan siapa saja yang tereksklusi dari rantai nilai. Analisis kebijakan juga digunakan dengan mengidentifikasi pengaturan kelembagaan yang telah berjalan, kompleksitas institusi pelayan publik dan masyarakat sipil, fragmentasi kelembagaan, distorsi/gangguan distribusi, dan meningkatkan nilai tambah dalam sektor serta keterhubungannya dengan ketahanan kebudayaan masyarakat.

3.2. Lokasi dan Waktu Kajian

Kajian ini dilakukan pada kabupaten yang telah melakukan budidaya talas satoimo di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Bantaeng, Sinjai,

Jeneponto, Pinrang, dan Soppeng. Periode pelaksanaan kajian kolaborasi pengembangan komoditas talas satoimo dilaksanakan selama enam bulan (Mei-November 2021).

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kajian pustaka, wawancara dengan panduan kuesioner, wawancara mendalam, observasi dengan para *stakeholders* yang ada lokasi pengembangan talas satoimo yaitu di Kabupaten Sinjai, Bantaeng, Jeneponto, Soppeng, dan Pinrang.

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Rantai Nilai

Kaplinsky dan Morris (2001) memberikan penekanan bahwa tidak ada cara yang “benar” untuk melakukan analisis rantai nilai. Pendekatan yang diambil pada dasarnya bergantung pada pertanyaan yang diajukan. Untuk analisis rantai nilai berbasis *community approach* ACIAR (2012) menuliskan hal-hal yang dianggap penting adalah:

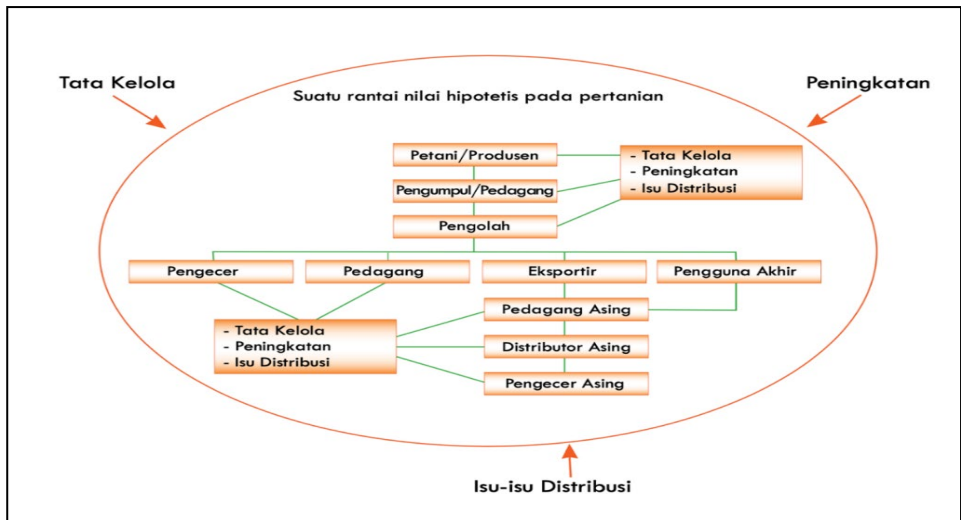
1. Analisis rantai nilai secara sistematis memetakan para pelaku yang berpartisipasi dalam produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan suatu produk (atau berbagai produk) tertentu. Pemetaan ini mengkaji ciri-ciri berbagai pelaku, struktur laba-rugi, aliran barang di sepanjang rantai, ciri ketenagakerjaan, serta tujuan dan volume penjualan domestik dan asing (Kaplinsky dan Morris 2001). Detil semacam ini dapat dikumpulkan dari kegiatan atau gabungan kegiatan berupa kegiatan survei langsung, diskusi kelompok terfokus, pengkajian pedesaan secara partisipatif (PRA), wawancara informal, dan data sekunder.
2. Analisis rantai nilai untuk mengidentifikasi distribusi manfaat bagi para pelaku dalam rantai nilai. Melalui analisis margin dan laba, di dalam rantai

nilai dapat dilihat siapa saja yang memperoleh manfaat dari partisipasi dalam rantai nilai dan pelaku mana yang dapat memperoleh manfaat dari dukungan atau pengorganisasian yang lebih baik. Hal ini khususnya penting dalam konteks negara berkembang (dan khususnya pada pertanian), mengingat bahwa kaum miskin rentan terhadap proses globalisasi (Kaplinsky dan Morris 2001). Kita dapat melengkapi analisis ini dengan menentukan sifat dasar partisipasi di dalam suatu rantai nilai untuk dapat memahami ciri-ciri partisipan di dalamnya.

3. Analisis rantai nilai untuk mengkaji peran peningkatan (*upgrading*) dalam rantai nilai. Peningkatan dapat mencakup peningkatan dalam hal kualitas dan desain produk, atau diversifikasi dalam lini produk yang dilayani, yang memungkinkan produsen mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Suatu analisis terhadap proses peningkatan mencakup adanya kajian atas seberapa besar laba yang dapat diperoleh para pelaku di dalam rantai nilai, serta informasi tentang keterbatasan yang ada. Isu-isu tata kelola (lihat bagian di bawah) memainkan peranan utama dalam menentukan bagaimana peningkatan tersebut terjadi. Selain itu, struktur peraturan, hambatan untuk masuk, pembatasan perdagangan, dan berbagai jenis standar juga dapat lebih lanjut membentuk dan mempengaruhi lingkungan tempat terjadinya peningkatan.
4. Analisis rantai nilai menggaris bawahi peran tata kelola dalam rantai nilai, yang dapat bersifat internal maupun eksternal. Tata kelola dalam suatu rantai nilai mengacu pada struktur hubungan dan mekanisme koordinasi yang terjadi antara para pelaku dalam rantai nilai. Tata kelola merupakan konsep yang luas yang pada dasarnya memastikan bahwa interaksi antara para peserta di dalam rantai nilai telah terorganisir, dan bukan hanya sekedar terjadi secara acak.

Umumnya, tata kelola dalam rantai nilai terjadi ketika beberapa pelaku dalam rantai nilai bekerja dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pelaku lainnya dalam rantai nilai tersebut, misalnya standar mutu atau waktu pengiriman dan volume yang ditetapkan oleh industri pengolahan. Aturan-aturan komersial yang mengatur hubungan komersial dalam rantai nilai global ataupun lokal dapat membatasi atau menghambat peran kaum miskin, namun dapat pula menciptakan pembelajaran yang penting serta peluang peningkatan. Aturan komersial bisa jadi amat spesifik (terkodifikasi), misalnya tingkatan kualitas (*grade*) yang ditetapkan dan diuraikan secara jelas untuk produk-produk pertanian yang dikaitkan dengan harga atau rumusan harga secara transparan. Dari sudut pandang kebijakan, tata kelola eksternal merupakan hal penting, dengan mengidentifikasi pengaturan kelembagaan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan kemampuan di dalam rantai nilai (misalnya penelitian), memperbaiki distorsi/gangguan distribusi, dan meningkatkan nilai tambah dalam sektor. Tata kelola eksternal juga terkait dengan peraturan dan perundang-undangan yang spesifik terkait dengan rantai tersebut, namun juga menguraikan intervensi sektor publik yang umum yang terkait dengan pengembangan rantai nilai.

Gambar 3.1.
Tata Kelola Rantai Nilai



Sumber: Rich, 2004.

3.4.2. Analisis Aspek Ekonomi dan Lingkungan

3.4.2.1. Aspek Ekonomi

Analisis aspek ekonomi pada kajian rantai nilai talas satoimo akan menggunakan dua jenis pendekatan analisis ekonomi, yakni analisis ekonomi pada level makro dan analisis pada level mikro. Analisis level makro akan menggunakan data agregat pada tingkat provinsi dan nasional terkait data agregat penawaran maupun permintaannya. Sedangkan analisis level mikro merupakan analisis aktivitas ekonomi pada level individu pelaku-pelaku usaha sepanjang rantai nilai satoimo.

a. Analisis Ekonomi Level Makro

Analisis ekonomi pada level makro mencakup analisis dari sisi *supply*, maupun dari sisi *demand*. Dari sisi *supply* akan dianalisis nilai kecenderungan produksi dan luas lahan serta perkembangan harga, khususnya di tingkat usahatani. Sedangkan analisis dari sisi *demand* akan lebih difokuskan pada analisis kecenderungan permintaan ekspor, termasuk analisis daya saingnya di pasar internasional serta di negara tujuan utama.

Selanjutnya analisis pangsa pasar di pasar internasional juga akan digunakan untuk menganalisis daya saing komoditi talas satoimo di pasar internasional serta di masing-masing negara tujuan utama. Komoditi ini dikatakan memiliki daya saing jika dari waktu ke waktu memiliki pangsa pasar yang relatif stabil bahkan cenderung meningkat di masing-masing pasar tujuan ekspor. Persamaan pangsa pasar dirumuskan sebagai berikut.

$$PE = \frac{(X_{aj})}{(W_{aj})} \times 100\%$$

Keterangan:

X_{aj} : Nilai ekspor komoditas talas satoimo Sulawesi Selatan ke negara j

W_{aj} : Nilai ekspor komoditas talas satoimo dunia ke negara j

3.4.2.2. Analisis Ekonomi Level Mikro

Analisis aspek ekonomi pada level mikro tidak hanya diarahkan untuk menganalisis struktur biaya, margin, dan pendapatan pada setiap pelaku yang terlibat dalam rantai nilai produk talas satoimo, tetapi juga akan menganalisis alur perubahan nilai produk sepanjang rantai nilai produk serta kontribusi nilai tambah yang diciptakan setiap pelaku terhadap total nilai tambah pada produk akhir. Selain itu analisis aspek ekonomi juga menganalisis harga ke-ekonomian produk yang dihasilkan setiap pelaku rantai nilai serta mengidentifikasi aktivitas kunci pada setiap pelaku yang didasarkan pada kontribusi biaya

aktivitas terhadap penciptaan margin dan menganalisis sensitivitas biaya aktivitas terhadap margin dan harga ke-ekonomiannya. Adapun model matematis dari berbagai alat-alat analisis yang digunakan dalam analisis ekonomi sebagai berikut :

- Struktur Biaya, Margin, dan Pendapatan

Analisis struktur biaya, margin dan pendapatan, merupakan konsep dasar yang digunakan dalam analisis aspek ekonomi pada setiap pelaku rantai nilai talas satoimo. Struktur biaya merupakan komponen yang menjadi penentu utama tingkat margin dan pendapatan para pelaku rantai nilai talas satoimo. Analisis struktur biaya yang dilakukan terdiri dua yakni analisis struktur biaya yang terinci menurut jenis aktivitas, sepanjang rantai nilai. Analisis ini akan membantu untuk mengidentifikasi jenis aktivitas kunci sebagai penentu utama nilai akhir produk. Selain itu analisis biaya juga menggunakan konsep biaya yang membagi total biaya menurut sifat biaya yakni biaya total yang membagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Secara matematis struktur biaya menurut sifat biaya dihitung dengan rumus berikut ini :

$$TC = FC + VC$$

Keterangan :

TC = Total Biaya (Rp)

FC = Biaya Tetap (Rp)

VC = Biaya Variabel (Rp)

Pendapatan pelaku-pelaku usaha dalam rantai nilai talas satoimo merupakan selisih total penerimaan usaha dengan total biaya. Rumus pendapatan sebagai berikut :

$$\mathbf{Pd = TR - TC}$$

Keterangan :

Pd = Pendapatan (Rp)

TR = Total Penerimaan(Rp)

TC = Total Biaya(Rp)

Selanjutnya analisis margin pada setiap pelaku bisnis dalam analisis rantai nilai talas satoimo dihitung berdasarkan selisih antara harga jual dengan harga beli. Nilai margin tersebut sama besarnya dengan jumlah biaya total dengan pendapatan yang diperoleh setiap pelaku rantai nilai, secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

$$\mathbf{M = HJ - HB \text{ atau}}$$

$$\mathbf{M = TC - Pendapatan}$$

Keterangan :

M = Margin usaha (Rp/unit)

HJ = Harga Jual per unit (Rp/unit)

HB = Harga beli per unit (Rp/unit)

Pd = Pendapatan per unit (Rp/unit)

TC = Total Biaya per unit (Rp/unit)

Untuk menganalisis efisiensi usaha maka konsep yang digunakan terdiri dari R/C dan B/C. R/C merupakan perbandingan antara penerimaan usaha dengan total biaya usaha. Sedangkan B/C merupakan perbandingan antara pendapatan usaha dengan total biaya usaha. Rumus yang digunakan:

$$\mathbf{R/C = \frac{Penerimaan}{Total Biaya}}$$

$$\mathbf{B/C = \frac{Pendapatan}{Total Biaya}}$$

- Harga Ke-ekonomian (BEP)

Analisis harga keekonomian usaha talas satoimo terutama pada tingkat usahatani akan dianalisis dengan metode analisis BEP (*break event point*) atau analisis titik impas. Secara matematis analisis BEP dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BEP Penerimaan (Rp)} = \frac{FC}{1 - \frac{VC}{S}}$$

Keterangan :

FC = Biaya Tetap (Rp)

VC = Biaya Variabel (Rp)

S = Volume Penjualan (Rp)

Rumus BEP produksi, sebagai berikut :

$$\text{BEP Q (Kg)} = \frac{FC}{P - AVC}$$

Keterangan :

Q = Jumlah Produksi (Kg)

FC = Biaya Tetap (Rp)

P = Harga Jual (Rp/kg)

AVC = Biaya Variabel Per Unit (Rp)

Rumus BEP harga, sebagai berikut :

$$\text{BEP P (Rp)} = \frac{TC}{Q}$$

Keterangan :

P = Harga Jual Padi Organik (Rp/kg)

TC = Total Biaya Usahatani Padi Organik (Rp)

Q = Produksi Total Usahatani Padi Organik (Kg)

3.4.2.2. Analisis Aspek Lingkungan

Produk talas satoimo adalah produk pertanian berorientasi ekspor, karenanya proses budidaya dan proses pengolahan harus memenuhi secara benar kaidah-kaidah GAP (*Good Agricultural Practices*), penanganan pasca panen (*Good Handling Practices/GHP*), pengolahan (*Good Manufacturing Practices/GMP*). Saat ini GAP dan sertifikasi GAP menjadi salah satu syarat perdagangan internasional di banyak negara-negara pengimpor. GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan dan usahatani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani.

GAP telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2003 yang secara berangsur mewajibkan semua produk bahan pangan untuk perdagangan global memiliki sertifikat GAP. ASEAN-GAP sendiri memberikan penekanan terhadap empat komponen yaitu: (1) keamanan konsumsi pangan; (2) pengelolaan lingkungan dengan benar; (3) keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja lapang; (4) jaminan kualitas produk dan *traceability* produk, bila diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka analisis aspek lingkungan dalam studi ini akan diarahkan pada apakah kegiatan budidaya dan pengolahan produk satoimo sudah memenuhi kaidah GAP di setiap pelaku rantai nilai talas satoimo, serta mengkaji faktor-faktor lingkungan yang dapat mendukung diterapkannya kaidah-kaidah GAP dalam proses budidaya.

- Lokasi lahan sesuai dengan RUTR/RDTRD dan peta wilayah komoditas
- Lahan bebas dari cemaran limbah berbahaya dan beracun
- Kemiringan lahan $\leq 30\%$ untuk komoditas sayur dan buah riwayat lokasi
- Ada catatan riwayat penggunaan lahan

- Pemetaan lahan: terdapat rotasi tanaman pada tanaman semusim dan tersedia peta penggunaan lahan
- Kesuburan lahan: cukup baik, melakukan tindakan untuk mempertahankan kesuburan lahan
- Penyiapan lahan: dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki atau memelihara struktur tanah, dapat menghindarkan erosi, pemberian bahan kimia untuk penyiapan lahan dan media tanam tidak mencemari lingkungan.
- Media tanam: diketahui sumbernya, tidak mengandung cemaran bahan berbahaya dan beracun, kemiringan 30% perlu dilakukan tindakan koservasi

3.4.3. Analisis Kelembagaan

Analisis kelembagaan melihat bagaimana kemitraan antara petani talas Jepang dengan perusahaan pengolah talas. Kontrak antara perusahaan dengan petani mitra akan dilihat sampai sejauh mana pelaksanaannya, tingkat kepatuhan terhadap kontrak, masalah yang timbul dalam pelaksanaan kemitraan, bagaimana saran untuk penyempurnaan di masa akan datang. Selain itu, bagaimana kelompok tani yang mengelola talas berfungsi sebagaimana kelompok tani yang seharusnya.

3.4.4. Analisis Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mendalami pemberdayaan masyarakat kita bisa menggunakan dan memodifikasi kerangka yang dikembangkan Ian Scoone (2015) yang menggabungkan pendekatan *livelihoods* dan pertanyaan-pertanyaan politik ekonomi agraria yang dikembangkan Bernstein. Pertanyaan-pertanyaan itu sebagai berikut:

Siapa memiliki apa?

Pertanyaan ini berhubungan dengan relasi sosial dalam rezim properti yang berlaku dominan, yang menentukan akses terhadap sumber-sumber penghidupan (lima aset/modal); di sini kita bisa bertanya: bagaimana alat-alat produksi (tanah, peralatan, tenaga kerja, pengetahuan, dsb.) terdistribusi? Seberapa banyak yang mereka punya?

Siapa melakukan apa?

Bagian ini berhubungan dengan aspek pembagian kerja (*division of labor*), dan di dalam setiap kerja strategi penghidupan yang dipilih para aktor dalam setiap rantai (misalnya. intensifikasi, diversifikasi, migrasi).

Untuk ini kita bisa bertanya: siapa saja yang terlibat dalam rantai nilai (individu atau organisasi/usaha: sebagai petani, pekerja kebun, pedagang dst.)? Bagaimana bentuk keterlibatan mereka? Bagaimana mereka bisa terlibat, pranata/aturan/mekanisme apa yang memungkinkannya?

Siapa dapat apa?

Pertanyaan ini berhubungan dengan pembagian hasil kerja/pendapatan, yang terbentuk dalam beraneka bentuk relasi sosial di dalam rantai komoditas. Pendapatan di sini bisa berwujud uang maupun non uang. Dengan demikian, pertanyaan ini juga bisa memotret proses diferensiasi sosial dan ekonomi (akumulasi dan alienasi/pemiskinan) yang terjadi di antara aktor. Dengan ini kita bisa bertanya, apa saja yang diperoleh setiap aktor dalam rantai talas satoimo, dalam bentuk uang maupun non uang? Bagaimana keadaan (sosial-ekonomi) para aktor selama berada dalam rantai talas satoimo?

Apa yang mereka lakukan terhadap apa yang mereka dapatkan?

Ini berhubungan dengan hasil-hasil penghidupan, yaitu berbagai macam strategi penghidupan para aktor, berikut konsekuensinya sebagaimana tercermin dalam pola konsumsi, reproduksi sosial, tabungan, dan investasi.

Dengan demikian, kita bisa bertanya: apakah ada tambahan pendapatan mereka dari budidaya talas satoimo, apakah bisa diandalkan untuk bertahan,

apakah mereka bisa menabung dan berinvestasi, sejauh mana? Bagaimana pendapatan (hasil kerja) dari rantai nilai talas satoimo berdampak pada keputusan para aktor menjalankan usaha mereka? Dengan aset dan pendapatan yang mereka miliki, apakah mereka bisa bertahan dari guncangan atau krisis, apakah bisa memanfaatkan kecenderungan yang berlangsung? Bagaimana ini menentukan strategi mereka dalam memilih masuk, bertahan dan keluar dari rantai nilai talas satoimo?

Bagaimana kelompok masyarakat dan pemerintah saling berinteraksi?

Pertanyaan ini berfokus pada relasi sosial, pranata/institusi dan bentuk-bentuk dominasi dalam masyarakat dan antara warga dan negara ketika mereka membawa efek terhadap kehidupan. Dengan kata lain pertanyaan ini menyentuh isu tentang pengaruh institusional/organisasional terhadap akses terhadap sumberdaya kehidupan. Pertanyaannya, pranata (formal/informal) dominan apa saja yang mengatur akses terhadap sumberdaya (modal/aset) kehidupan?

Bagaimana perubahan politik dibentuk oleh dinamika ekologi dan sebaliknya?.

Pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan ekologi politik, dan bagaimana dinamika lingkungan mempengaruhi kehidupan. Ini kemudian dibentuk oleh aktivitas-aktivitas melalui pola-pola dan daya akses sumber daya.

3.4.5. Analisis Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)

Analisis gender adalah analisis kritis yang memfokuskan perhatiannya pada relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, terutama pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender.

Isu gender dan inklusi sosial merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender dan sosial yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak berdasarkan

jenis kelamin dan kemampuan fisik/mental. Dengan adanya diskriminasi dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, maka akan menimbulkan ketidakadilan gender.

Oleh karena itu dasar untuk memetakan isu gender dan inklusi sosial adalah dimulai dengan memasukkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, kemampuan fisik/mental (disabilitas), umur dan status sosial dalam kajian. Data terpilah tersebut diperoleh dari *baseline study*, *rapid assessment*, hasil evaluasi dan lain-lain. Agar lebih mudah menggali isu gender dan inklusi, dilakukan analisis gender dan analisis sosial melalui proses menganalisis data dan informasi secara sistematis berdasarkan jenis kelamin, kemampuan fisik/mental (disabilitas), umur dan status sosial. Hal ini untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan memperhatikan 4 (empat) indikator yaitu:

1. Akses, adil/setara bagi laki-laki/perempuan berdasarkan jenis kelamin, umur, kemampuan fisik/mental (disabilitas) dan sosial dalam mendapatkan peluang dan kesempatan.
2. Kontrol, adil/setara bagi laki-laki/perempuan berdasarkan jenis kelamin, umur, kemampuan fisik/mental (disabilitas) dan sosial dalam menjalankan fungsi kontrol/pengambilan keputusan.
3. Partisipasi, adil/setara bagi laki-laki/perempuan yang berkapasitas untuk berperan berdasarkan jenis kelamin, umur, kemampuan fisik/mental (disabilitas) dan sosial dalam penyelenggaraan budidaya talas satoimo.
4. Manfaat, adil/setara bagi laki-laki/perempuan berdasarkan jenis kelamin, umur, kemampuan fisik/mental (disabilitas) dan sosial dalam memanfaatkan hasil budidaya talas satoimo.

Pada analisis gender dilakukan pemetaan peran, kebutuhan, kondisi laki-laki dan perempuan. Sedangkan analisis sosial akan memetakan

kemampuan laki-laki dan perempuan berdasarkan kemampuan fisik/mental dan sosialnya (pendidikan, usia, status sosial, status perkawinan).

Dengan demikian sebuah kajian dengan perspektif GESI akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat mengenai kebutuhan para pihak dalam setiap rantai nilai dan untuk mengidentifikasi tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender dan inklusi. Juga bagaimana mengurangi kesenjangan gender pada tingkat pelaku sekaligus penerima manfaat. Analisis gender dan inklusi dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan berdasarkan jenis kelamin, umur, kemampuan fisik/mental (disabilitas) dan sosial dan dapat membantu perencana maupun pelaksana menemukan solusi yang tepat untuk penyelesaian dan menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda.

3.4.6. Analisis Kebijakan

Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan publik disusun (*constructed*) dan didefinisikan serta bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik (Parsons, 2001). Analisis diperlukan untuk mengetahui substansi kebijakan yang mencakup informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan (Dunn, 2003). Dalam penelitian ini, analisis kebijakan yang digunakan merupakan penerapan berbagai metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan terhadap suatu kebijakan (*policy information*) untuk selanjutnya digunakan membantu merumuskan (*formulation*) suatu masalah publik yang kompleks menjadi lebih terstruktur (*well-structured policy problem*) sehingga memudahkan dalam merumuskan dan memilih berbagai alternatif kebijakan (*policy alternatives*)

yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah kebijakan untuk direkomendasikan kepada pembuat kebijakan (*policy maker*).

Penelitian ini juga melihat suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan perlu dilakukan monitoring (Hogwood and Gunn, 1989) dan juga melihat kebijakan publik dengan menganalisis penyebab kegagalan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Lemahnya daya antisipasi para pembuat kebijakan maupun pendesain program dan proyek.
2. Pengaruh dari kondisi lingkungan yang tidak diperkirakan sebelumnya
3. Lemahnya sumber daya manusia
4. Kurangnya sarana dan prasarana
5. Lemahnya masyarakat yang menjadi obyek kebijakan.

Dengan demikian persoalan yang harus dijawab oleh suatu kegiatan sebagai evaluasi, yaitu:

1. Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses didalam pembuatan kebijakan itu.
2. Apakah proses pembuatannya cukup rinci, terbuka dan memenuhi prosedur.
3. Apakah program didesain secara logis.
4. Apakah sumber daya yang menjadi input program telah cukup memadai untuk mencapai tujuan.
5. Apa standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut.
6. Apakah program dilaksanakan sesuai standar efisiensi dan ekonomi? Apakah uang digunakan dengan jujur dan tepat.
7. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang seperti yang didesain dalam program.
8. Apakah program memberikan dampak kepada kelompok non sasaran, apa jenis dampaknya?

9. Apa dampaknya baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan terhadap masyarakat.
10. Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh masyarakat.
11. Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai yang diharapkan.

Rangkaian pertanyaan di atas digunakan sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan pengembangan talas satoimo di Sulawesi selatan sehingga ditemukan alternatif solusi untuk menyempurnakan implementasi kebijakan pengembangan talas satoimo tersebut ke depan.

3.5. Etika Penelitian

Kajian ini menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi setiap orang/individu. Demikian halnya dengan struktur dan peran pemerintah serta nilai-nilai sosial budaya di lokasi penelitian, khususnya terhadap kelompok perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Secara khusus pelaksanaan kajian memperhatikan situasi pandemi COVID-19, baik bagi pelaksana maupun bagi masyarakat dan responden pada lokasi penelitian. Oleh karena itu pelaksanaannya senantiasa menerapkan standar protokol COVID-19, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan (*hand sanitizer*).

Secara umum etika penelitian yang dilaksanakan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:

1. *Informed consent*

Persetujuan antara tim pelaksana kajian dengan responden, dengan memberikan persetujuan (*informed consent*) sebelum FGD, tanya jawab, mengisi *questionnaire*. Tujuan *informed consent* adalah agar partisipan mengerti maksud dan tujuan kajian, mengetahui tujuan dan manfaat kajian,

serta bersedia untuk direkam dan jika partisipan tidak bersedia maka tim pelaksana harus menghormati hak partisipan.

2. *Anonymity* (tanpa nama)

Merupakan etika dalam penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil kajian yang disajikan, kecuali atas persetujuan partisipan.

3. *Confidentiality* (kerahasiaan)

Merupakan etika dalam penelitian untuk menjamin kerahasiaan dari hasil kajian baik informasi maupun masalah-masalah lainnya, semua data dan informasi dari partisipan yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya, dan hanya kelompok data tertentu yang dilaporkan pada hasil kajian.

3.6. Definisi Operasional

1. Rantai Nilai

Rantai Nilai adalah serangkaian kegiatan dari seluruh aktivitas di hulu, manufaktur dan hilir yang saling bekerjasama dalam rangka memproduksi dan menyampaikan suatu produk hingga ke konsumen akhir. Struktur rantai nilai talas satoimo di Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan proses aliran produk aliran informasi dan aliran finansial serta pelaku-pelaku yang terlibat dalam proses aliran tersebut.

2. Talas Satoimo

Talas Jepang (*Colocasia esculenta var. antiquorum*) atau yang dikenal sebagai satoimo (Jepang). Merupakan jenis umbi-umbian yang diyakini memiliki kandungan hyalituric acid yang merupakan senyawa pembentuk collagen, salah satu jenis protein yang diyakini bisa memperlambat proses penuaan kulit. Selain itu juga sebagai sumber karbohidrat, juga

mengandung vitamin A dan C serta banyak mengandung protein nabati. Talas satoimo merupakan komoditas unggulan berorientasi ekspor.

3. Sektor Hulu

Sektor hulu meliputi pengadaan sarana produksi pertanian antara lain terdiri dari benih, bibit, kompos, pupuk kimia, obat pemberantas hama dan penyakit, kelompok tani, dan peralatan produksi pertanian. Pelaku-pelaku kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi adalah perorangan, perusahaan swasta, dan pemerintah.

4. Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur meliputi kegiatan pengeringan, pencucian, sortasi, pengupasan, proses pembuatan tepung, proses pembekuan (frozen), pengemasan dan penyimpanan

5. Sektor Hilir

Sektor Hilir meliputi kegiatan mulai dari pengumpulan produk usaha tani, pengolahan, penyimpanan dan distribusi. Distribusi melihat produk yang dihasilkan dari usaha tani didistribusikan langsung ke konsumen didalam atau di luar negeri. Sebagian lainnya mengalami proses pengolahan lebih dahulu kemudian didistribusikan ke konsumen. Pelaku kegiatan dalam subsistem ini ialah pengumpul produk, pengolah, pedagang, penyalur ke konsumen, dan lain-lain.

6. Aspek Ekonomi

Analisis aspek ekonomi meliputi analisis struktur biaya dan pendapatan pada setiap pelaku rantai nilai, analisis margin lembaga pelaku rantai nilai, serta analisis efisiensi dan analisis harga ke-ekonomian berbasis analisis BEP. Selain itu analisis ekonomi juga mencakup analisis kontribusi nilai tambah yang diciptakan oleh setiap pelaku rantai nilai

7. Aspek Lingkungan

Analisis aspek lingkungan merupakan analisis terhadap kaidah-kaidah lingkungan dalam proses budidaya dan proses pengolahan talas satoimo. Analisis kaidah lingkungan dalam proses budidaya, tidak hanya berkaitan dengan penerapan zat-zat kimia, seperti pupuk kimia secara berlebihan, penggunaan racun pestisida dan herbisida pada saat menjelang panen, tetapi juga aspek lingkungan dikaitkan dengan lokasi budidaya yang dilihat dari aspek, kemiringan lahan, riwayat banjir pada lokasi pertanaman dan sebagainya.

8. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan adalah aturan buatan manusia yang membatasi kemungkinan perilaku menyimpang dan oportunistik dalam interaksi manusia. Institusi terdapat dalam suatu komunitas dan selalu diperkuat dengan sanksi. Institusi tanpa sanksi menjadi tidak berguna. Hanya jika sanksi diterapkan maka institusi akan membuat tindakan manusia dapat diperkirakan. Aturan dengan sanksi mengarahkan tindakan manusia dalam jalur yang dapat diperkirakan. Jika berbagai aturan konsisten satu sama lain, hal ini akan memfasilitasi kerjasama antara orang, sehingga mereka dapat mengambil keuntungan dari pembagian kerja dan kreativitas manusia. Peranan utama institusi dalam masyarakat adalah mengurangi ketidakpastian dengan membuat struktur yang stabil pada interaksi manusia.

9. Aspek Pemberdayaan

Aspek pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini melihat upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat mengembangkan diri baik secara individu maupun institusi secara maksimal. Pemberdayaan dalam hal ini dilihat dari dua indikator utama yaitu pelatihan dan pendampingan.

10. Aspek Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial

Fokus analisis adalah pada ketidaksetaraan gender dan inklusi sosial dari seluruh relasi sosial, institusi sosial dan proses sosial yang berlangsung dalam Rantai nilai talas dimana ketidaksetaraan gender dan inklusi sosial dilihat sebagai isu (permasalahan) penting yang harus segera teratasi. Ketidaksetaraan gender dan inklusi sosial dimengerti sebagai produk sosio kultural dan kekuatan historis kultural yang secara potensial dapat diubah. Aspek yang diamati adalah pada akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pekerjaan pertanian bagi perempuan petani, serta diversifikasi pangan berbasis sumberdaya tanaman lokal melalui peran komunitas, dan peran perempuan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah dan Potensi Pengembangan Talas Satoimo di Sulawesi Selatan

4.1.1. Sejarah Pengembangan Talas Satoimo di Sulawesi Selatan

Pada mulanya talas satoimo (*Colocasia esculenta var antichuorum*) atau yang dikenal dengan "Talas Jepang Satoimo" masuk Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Budidaya talas Jepang kemudian dikembangkan namun terkendala lahan yang terbatas, dan dengan sistem pembudidayaannya yang belum tepat berakibat pada hasil panen yang belum maksimal. Untuk setiap hektar lahan budidaya talas Jepang baru dapat menghasilkan sekitar 20 ton umbi talas per panen (Kallo, 2019).

Penduduk Jepang berjumlah kurang lebih 120 juta orang, 50 persen diantaranya mengkonsumsi talas Jepang sebagai bahan makanan pokok selain beras, sehingga saat ini kebutuhan Jepang mencapai kurang lebih 360.000 ton per tahun (Osuke, 1996) sedangkan kapasitas produksi di Jepang terus menurun hingga 250 ton per tahun karena keterbatasan lahan dan faktor iklim yang tidak memungkinkan untuk bertani sepanjang tahun (Kallo, 2019).

Di Jepang, satoimo adalah salah satu produk pangan yang sangat digemari dan umum dijumpai pada masakan-masakan rumah tangga karena memiliki nilai nutrisi yang tinggi dan dipercaya memiliki khasiat kesehatan yang baik. Mengingat masyarakat Jepang sangat menjunjung tinggi kehidupan sehari-hari yang sehat, maka tidak heran apabila satoimo merupakan salah satu bahan makanan yang paling sering digunakan pada masakan Jepang. Pemerintah Jepang pun menawarkan proyek kerja sama budidaya talas satoimo kepada pemerintah sejumlah negara salah satunya Indonesia. Maka pada tahun 2006, Konsorsium Satoimo Indonesia-Jepang terbentuk.

Tahun 2013 Indonesia mulai melakukan ekspor satoimo ke Jepang dengan jumlah 6.300 ton bentuk satoimo beku senilai 813.000 yen. Jumlah ini masih jauh di bawah China dan nilainya masih di bawah Thailand yang juga mulai mengekspor satoimo ke Jepang dengan volume yang jauh di bawah Indonesia, hanya sebesar 2.885 ton namun bernilai hampir sama dengan impor dari Indonesia, yaitu sebesar 820.000 Yen (DKP&H, 2019). Ekspor talas satoimo ini berasal dari seluruh Indonesia termasuk dari Sulawesi Selatan.

Di Sulawesi Selatan, pada tahun 2014 talas satoimo mulai dikenalkan kembali oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng. Budidaya talas satoimo digalakkan di 8 (delapan) kecamatan atau hampir di seluruh Kabupaten Bantaeng. Talas satoimo mulai dikenalkan ke masyarakat dan dijadikan komoditas unggulan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Pemerintah Kabupaten Bantaeng kemudian membuka industri pengolahan talas satoimo dengan kapasitas terpasang sebanyak 40.000 ton bahan baku per tahun. Sementara itu ternyata pasokan talas dari petani yang masuk diperkirakan hanya sekitar satu ton per minggu, sehingga industri tersebut belum memproduksi secara maksimal.

Ketika Pemerintah Sulawesi Selatan tahun 2018 melihat peluang untuk memenuhi kekurangan pasokan satoimo ke pabrik pengolahan dan juga untuk ke Jepang, maka diperlukan budidaya yang lebih luas lagi. Di Sulawesi Selatan terdapat lahan yang luas dan cocok untuk talas satoimo karena ditunjang dengan dua sistem musim yang dapat mendukung kegiatan pertanian sepanjang tahun. Talas ini juga mulai dikenalkan kepada masyarakat di 10 (Sepuluh) kabupaten lainnya pada tahun 2018 dimulai dari Kabupaten Gowa, Jeneponto dan Sinjai di selatan hingga Kabupaten Luwu di utara. Melihat potensi yang cukup besar ini maka pemerintah menetapkan talas satoimo sebagai komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.

Penetapan pengembangan talas satoimo ini dalam dokumen perencanaan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggandeng eksportir dan pabrik pengolah talas satoimo di Kabupaten Bantaeng serta di Kawasan Industri Makassar. Kerja sama ini dimaksudkan untuk menampung produksi pengembangannya yang telah berorientasi ke pasar ekspor. Hal ini diperlukan agar upaya pengembangan terintegrasi dengan perhitungan kapasitas individu/petani dan kelembagaannya termasuk pengembangan jejaring kerja sama dan permodalan, termasuk pelatihan budidaya talas satoimo bagi petani dan upaya untuk fasilitasi pasar domestik.

Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai menuai hasilnya dimana sampai dengan tahun 2018, total talas beku (*frozen taro*) dari Kabupaten Bantaeng dan Makassar yang sudah berhasil diekspor ke Jepang sebanyak 50 ton dengan nilai sekitar Rp. 1,06 milyar. Namun demikian terdapat permasalahan untuk menampung produk petani yang *under grade* dan *under quality* agar tidak terbuang percuma. Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan menggandeng perusahaan swasta penampung, pengolah dan pengeksportir talas terutama untuk diversifikasi produk talas. Pabrik ini membutuhkan talas satoimo dalam jumlah banyak dan rutin setiap bulannya. Untuk memenuhi kapasitas pabrik maka perusahaan ini melakukan kerja sama untuk budidaya talas satoimo baik dengan perusahaan atau dengan kelompok tani.

Kondisi perusahaan swasta tersebut saat ini dalam mengusahakan ekspor hasil olahan talas kemudian mengalami kemunduran disebabkan kelangkaan bahan baku umbi segar, karena makin menyusutnya petani yang bercocok tanam talas satoimo serta adanya penurunan permintaan ekspor semasa Covid-19.

4.1.2. Potensi Pengembangan Talas di Sulawesi Selatan.

Sebagian besar kondisi geologi dan topografi Sulawesi Selatan cocok untuk pengembangan budidaya talas satoimo karena talas ini dapat tumbuh terus-menerus sepanjang tahun di wilayah tropis dan subtropika, biasanya pada kondisi lembab atau tergenang. Suhu rata-rata yang sesuai untuk pertumbuhan talas berkisar antara 2°C dan 27°C (Masniawati dkk, 2019)

Luas lahan yang diusahakan untuk tanaman talas satoimo di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 seluas 209 Ha dengan luas panen sebanyak 178 ha, dan Produktivitas sebanyak 343 kw/ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Talas Satoimo di
13 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020/2021

No	Kabupaten/Kota	Luas Tanaman (Ha)	Luas Panen	Produktivitas	Produksi
		MT 2020/2021	(ha)	(kw/ha)	(ton)
1.	Maros	27,5	27,5	167,3	460
2.	Gowa	25,1	25,1	156,1	392
3.	Takalar	16,7	16,7	277,0	464
4.	Jenepono	19,7	19,7	321,6	635
5.	Bone	20,9	20,9	342,1	715
6.	Soppeng	15,6	15,6	971,1	1.515
7.	Wajo	3,2	3,2	455,4	148
8.	Luwu	10,2	10,2	190,2	195
9.	Luwu Utara	19,6	19,6	119,9	235
10.	Luwu Timur	19,3	19,3	696,9	1.345
11.	Enrekang	20,0	-	-	-
12.	Toraja Utara	10,0	-	-	-
13.	Makassar	1,0	-	-	-
J u m l a h		208,8	177,8	3.697,6	5.712

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Dari Tabel 4.1. dapat dilihat bahwa perkembangan luas areal tanam produktivitas talas satoimo pada tahun 2021 adalah 178 ha dan luasan ini belum berubah sejak musim tanam tahun 2019. Dari Tabel 4.1. terlihat bahwa Kabupaten Bantaeng yang semula sebagai pelopor dan perintis pertanaman

talas satoimo sudah tidak mempunyai lahan yang disediakan untuk budidaya dengan sistem kontrak antara perusahaan eksportir dengan petani. Petani tampak beralih budidaya ke tanaman lain ataupun meninggalkan sistem kontrak tersebut dan berupaya untuk mengusahakan talas dengan cara mandiri.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak memasukkan talas satoimo ke dalam program prioritas sebagai tanaman unggulan menyebabkan petani hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pengeksportir atau pabrik yang akan menampung hasil produksi petani secara mandiri. Tidak adanya koordinasi dari pemerintah kabupaten maupun provinsi berdampak pada tidak terlindungnya petani dari kebijakan sepihak eksportir atau pabrik. Produksi talas yang diusahakan dapat saja tidak terbeli, terbengkalai dan merugikan petani karena ketidakpastian pasar atau karena keadaan tertentu.

Adapun produksi talas satoimo dari Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan produksi talas satoimo dari satu-satunya daerah di Indonesia yang masih bertahan untuk ekspor dan memenuhi permintaan domestik, sehingga jika dikelola dengan baik akan mempunyai potensi pengembangan yang lebih baik lagi sebagai komoditas unggulan.

4.2. Analisis Rantai Nilai Talas Satoimo di Sulawesi Selatan

4.2.1 Proses Inti dan Pelaku Rantai Nilai Talas Satoimo di Sulawesi Selatan

Talas satoimo (*Colocasia esculenta var antiquorum*) atau yang dikenal dengan "Talas Jepang" adalah jenis talas yang berbeda dengan jenis talas yang umumnya ada di Indonesia. Talas satoimo yang dikembangkan di Sulawesi Selatan ini adalah jenis talas yang spesiesnya sama dengan yang banyak dikembangkan di Jepang. Jenis talas ini diyakini memiliki kandungan *hyalitrotic acid* yang merupakan senyawa pembentuk *collagen*, salah satu jenis protein yang diyakini bisa memperlambat proses penuaan kulit. Jenis talas ini

merupakan bahan pangan pokok utama sebagian besar penduduk Jepang sebagai pengganti beras dan kentang (BPTP, 2018).

Sebagai bagian integral dari kegiatan pembangunan daerah, talas satoimo pertama kali dikembangkan secara terencana di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan talas Jepang sebagai salah satu komoditas unggulan daerah dan memperluas pengembangannya ke berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan. Program pengembangan talas satoimo oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diwujudkan dalam bentuk penyaluran sarana produksi, alat-alat pertanian dan pendamping petani ke berbagai lokasi pengembangan seperti Kabupaten Gowa, Sinjai, Luwu, Soppeng, dan Pinrang. Saat ini petani yang membudidayakan talas satoimo tidak lagi bergantung pada bantuan sarana produksi pemerintah daerah, tetapi mereka adalah petani talas yang dikategorikan sebagai petani mandiri dan sebagian lagi petani yang mendapat bantuan dari perusahaan mitra.

Sejarah singkat pengembangan talas Satoimo di Sulawesi Selatan mengisyaratkan bahwa talas satoimo yang saat ini berkembang di Sulawesi Selatan bukanlah komoditi talas lokal yang berkembang atas inisiasi masyarakat, tetapi komoditi talas yang varietasnya diintroduksi dari Jepang kemudian disosialisasikan ke masyarakat dan didukung pengembangannya secara terencana oleh pemerintah daerah dan para pelaku usaha, termasuk eksportir dan pelaku usaha talas satoimo lainnya. Para pihak tersebut, juga memiliki peran dalam menentukan arah dan lokasi pengembangan talas satoimo di Sulawesi Selatan serta mempengaruhi segala aktivitas utama dalam setiap proses inti dalam rantai nilai talas satoimo di Sulawesi Selatan.

Rantai nilai talas satoimo di Sulawesi Selatan adalah gambaran tentang aktivitas utama dari pelaku utama yang terlibat dalam setiap proses ini rantai nilai talas satoimo di Sulawesi Selatan. Proses inti talas satoimo di daerah ini

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian tahapan utama, masing-masing proses inti pada tiga sektor hulu, sektor pengolahan dan sektor hilir. Pada sektor hulu terdapat proses budidaya mencakup proses pembibitan dan proses pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Tahapan ini menghasilkan produk berupa umbi talas yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan maupun untuk kebutuhan bibit pada kegiatan budidaya talas. Selanjutnya, pada sektor pengolahan, terdapat kegiatan-kegiatan prosesing yang mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Kegiatan dalam proses pengolahan mencakup kegiatan-kegiatan seperti penyortiran, pencucian, pengupasan hingga kegiatan prosesing yang mengubah bentuk umbi talas menjadi produk tepung talas dan talas frozen serta kegiatan pengemasan. Sedangkan pada sektor hilir terdapat kegiatan pemasaran dengan kegiatan utama mencakup pemeriksaan dan pengujian produk oleh pembeli serta penyiapan dokumen dan pengiriman produk, pengangkutan dan penjualan produk ke konsumen antara atau konsumen akhir.

Gambar 4.1.
Grafik Proses Inti dalam Rantai Nilai Talas Satoimo di Sulawesi Selatan

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Proses Inti Rantai Nilai Talas</p>			
<p>Produk Utama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Umbi talas untuk Industri • Umbi talas untuk bibit 	<ul style="list-style-type: none"> • Tepung talas, • Talas frozen 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasaran domestik talas tepung • Pemasaran ekspor talas frozen
<p>Aktivitas Utama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan lahan • Pembibitan • Penanaman • Pemeliharaan • Panen • pasca panen • Pengarungan dan • Pengangkutan ke lokasi pabrik pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeringan • Pencucian • Sortasi • Pengupasan • Proses pembuatan tepung • Proses pembekuan (Prozen) • Pengemasan • Penyimpanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pengiriman • Pemeriksaan dan pengujian talas prozen oleh pembeli • Pengiriman barang ke daerah tujuan pasar • Penjualan ke konsumen
<p>Pelaku Utama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petani talas 	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Satoimo Sulawesi Sukses (tepung talas) • PT. Sangkara Mata Agriculture (frozen taro) 	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Tridanawa Perkasa • Retail domestik tepung talas • Pembeli dari negara pengimpor talas beku • Konsumen akhir
<p>Pelaku Pendukung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov Sul-Sel • Tenaga ahli <i>Japan Indonesia Trading</i> • Tenaga pendamping lapangan • Koordinator /kolektor kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov Sul-Sel 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Prov Sul-Sel • Balai Karantina Kementerian Pertanian

Sumber : Data primer, 2021

4.2.2. Peranan dan Fungsi Pelaku Rantai Nilai Talas Satoimo di Sulawesi Selatan

Para pelaku di sepanjang rantai nilai talas satoimo Sulawesi Selatan yang kini masih aktif tersebar di beberapa kabupaten. Pelaku sektor hulu talas tersebar di Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Soppeng, dan Pinrang. Pabrik tepung talas berlokasi di Kota Makassar, sedangkan pabrik talas beku bertempat di Kabupaten Bantaeng. Pelaku retail penjualan tepung talas berlokasi di Jakarta dan Bandung, sedangkan importir talas beku berasal dari Jepang. Adapun peran dan fungsi masing-masing pelaku rantai nilai di jelaskan sebagai berikut :

a. Petani Talas Jepang

Petani talas Jepang yang ada di Sulawesi Selatan adalah petani mitra yang terseleksi dan terikat kontrak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan mitra (perusahaan produsen tepung talas dan produsen talas beku). Berdasarkan hubungan dengan perusahaan mitranya, petani talas satoimo di Sulawesi Selatan terbagi 2 kelompok, yakni kelompok petani mitra yang memasok kebutuhan bahan baku untuk pembuatan tepung talas oleh perusahaan PT. Satoimo Sulawesi Sukses. Petani ini berlokasi di Kabupaten Soppeng dan di Kabupaten Pinrang. Petani di Kabupaten Soppeng dikoordinir oleh tenaga pendamping pemerintah provinsi yang sekaligus sebagai kolektor PT. Satoimo SS. Sedangkan petani talas di Kabupaten Pinrang merupakan petani mandiri yang berhubungan langsung dengan perusahaan PT. Satoimo SS. Kelompok petani talas berikutnya berlokasi di Kabupaten Sinjai, Bantaeng dan Jeneponto. Petani ini dikoordinir oleh pengepul talas yang bermitra dengan perusahaan PT. Sangkara Mata Agriculture yang berlokasi di Kabupaten Bantaeng.

Petani talas adalah anggota rantai nilai talas yang berperan dalam kegiatan budidaya talas, mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen hingga pasca panen. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan sesuai prinsip budidaya talas, sebagaimana yang dianjurkan dan diajarkan oleh pendamping, kolektor atau koordinator petani (pengepul). Talas-talas yang telah dipanen akan diangkut ke lokasi pabrik yang ada di Makassar atau di Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan kendaraan bak terbuka (*pick-up*). Petani mitra di kabupaten Pinrang mengantar langsung talas hasil panen mereka ke pabrik di Makassar. Sedangkan hasil panen petani mitra di Kabupaten Soppeng dikumpulkan oleh kolektor yang selanjutnya dijemput oleh perusahaan. Berbeda halnya dengan hasil panen petani di Kabupaten Bantaeng, Sinjai, dan Jeneponto, di mana hasil panen petani dijual ke pengepul dan pengepul inilah yang mengantarkan talas hasil panen ke pabrik di Bantaeng. Pengepul yang ada di kabupaten Bantaeng, Sinjai, dan Jeneponto sekaligus menjadi petani mitra pada rantai nilai talas beku.

b. Pedagang Pengumpul (Pengepul)

Pedagang pengumpul atau pengepul adalah anggota rantai nilai talas yang berperan mengumpulkan talas hasil panen petani mitra untuk lebih lanjut dipasarkan ke perusahaan mitra, yakni pabrik pembuatan tepung talas beku di Kabupaten Bantaeng. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengepul hanya ditemukan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto dan Sinjai, sedangkan di Kabupaten Soppeng meski petani bertransaksi langsung dengan perusahaan, namun hasil panennya tetap dikoordinir oleh kolektor dan diangkut ke Makassar dengan biaya transpor ditanggung perusahaan. Berbeda halnya dengan petani di Kabupaten Pinrang di mana petani ini memasarkan langsung talasnya ke pabrik di Makassar tanpa menggunakan perantara kolektor atau pedagang pengumpul (pengepul).

c. Pabrik Tepung Talas

Pabrik tepung talas merupakan pelaku rantai nilai yang berada sektor pengolahan. Pelaku ini berperan untuk membeli dan mengangkut hasil produksi umbi talas petani, terutama produksi talas yang berasal dari Kabupaten Soppeng dan Pinrang. Pabrik tepung talas ini berlokasi di Kota Makassar dan mengolah hasil produksi umbi talas yang di hasilkan petani menjadi tepung talas, yang selanjutnya didistribusikan ke retail yang ada di Jakarta maupun konsumen yang ada di Bandung. Peran pabrik tepung talas sangat penting karena memberi nilai tambah akan komoditas talas. Pabrik talas ini dapat mengolah talas segala ukuran untuk dijadikan tepung, karena itu perusahaan ini umumnya membeli talas petani secara gelondongan dengan harga pembelian rata-rata Rp. 2.500 per kg.

Serangkaian proses yang dilakukan oleh pabrik talas untuk mengubah talas menjadi tepung sebagai berikut :

1. Talas dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan mesin pencuci talas sehingga proses pencucian lebih cepat dan lebih bersih.
2. Talas yang telah dicuci dimasukkan ke mesin pengupas kulit talas sehingga talas bersih dari kulit talas yang berwarna kecoklatan.
3. Talas dipotong tipis-tipis dengan menggunakan mesin pemotong
4. Potongan talas dijemur di bawah sinar matahari
5. Potongan talas yang telah benar-benar kering diolah menjadi tepung menggunakan mesin.
6. Tepung talas dikemas dalam kemasan plastik putih berlabel perusahaan berukuran 1 kg.
7. Tepung yang telah dikemas plastik selanjutnya dimasukkan dalam kemasan karton berkapasitas 20 kg. (20 kemasan @ 1 kg).
8. Tepung talas yang telah dikemas dalam karton telah siap dikirim ke perusahaan retail di Jakarta dan Bandung.

d. Pabrik Talas Beku (*Frozen*)

Pabrik talas beku merupakan bagian dari rantai nilai talas di Sulawesi Selatan. Perusahaan pabrik talas beku berlokasi di Kabupaten Bantaeng. Petani mitra perusahaan ini tersebar di Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, dan Sinjai. Perusahaan ini tidak bermitra langsung dengan semua petani talas, tetapi bermitra dengan pedagang pengepul atau koordinator petani di setiap wilayah. Para pengepul dan koordinator ini juga sebagai pelaku budidaya talas. Para pengepul ini juga yang merekrut anggota petani kemudian mengkoordinir pemasaran anggotanya. Pabrik talas beku di Bantaeng pada awalnya memiliki kontrak bahwa, harga pembelian di tingkat petani dinilai pada harga Rp. 5.000 per kg, namun karena alasan Covid-19 dan tidak adanya kegiatan ekspor, harga yang diterima petani hanya pada tingkat harga Rp. 3.500 per kg. Hasil produksi petani juga tidak dibeli secara gelondongan, sehingga tidak semua produksi petani dapat dibeli, hanya yang memenuhi standar kualitas baik dari segi ukuran maupun dari segi kualitas umbi. Peran pabrik talas beku juga sangat penting dan meningkatkan nilai tambah komoditi talas. Pabrik talas beku ini mengolah umbi talas menjadi talas beku yang bentuknya bundar dengan ukuran tertentu. Produk talas beku ini selanjutnya diekspor untuk memenuhi permintaan talas di Jepang. Adapun proses pembuatan talas beku dijelaskan sebagai berikut.

1. Talas dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan mesin pencuci talas sehingga proses pencucian lebih cepat dan lebih bersih.
2. Talas yang telah dicuci dimasukkan ke mesin pengupas kulit talas sehingga talas bersih dari kulit talas yang berwarna kecoklatan. Pada proses pengupasan kulit, talas harus benar-benar bersih dari kulit dan tidak boleh ada kulit tersisa sedikitpun

3. Talas yang telah benar-benar bersih dikemas dalam plastik bening berukuran 1 kg.
4. Talas yang telah dikemas dimasukkan ke mesin freezer
5. Talas beku yang telah dikemas plastik dikemas lagi dalam kemasan karton berkapasitas 20 kg. (20 kemasan @ 1 kg).
6. Talas beku yang telah dikemas dalam karton telah siap dipasarkan ke eksportir talas beku untuk dikirim ke luar negeri.

e. Retail Tepung Talas

Retail tepung talas adalah pelaku rantai nilai talas di sektor hilir di pasar domestik. Retail ini adalah pelanggan pabrik tepung talas yang ada di Kota Makassar. Retail tepung talas berada di luar Provinsi Sulawesi Selatan, yakni di Jakarta dan Bandung. Retail di Jakarta memasarkan tepung talas pada swalayan khusus untuk warga negara asing, seperti warga negara Jepang ataupun negara lain yang membutuhkan tepung talas sebagai bahan makanan. Sedangkan retail tepung talas di Bandung memasarkan tepung talas pada salah satu rumah sakit di Bandung untuk dijadikan bahan makanan pasien pengidap penyakit diabetes dan kanker.

f. Eksportir Talas Beku

Eksportir talas beku merupakan anggota rantai nilai talas yang menggunakan talas beku yang telah diolah dari pabrik pembuatan talas beku di Kabupaten Bantaeng. Eksportir talas beku berada di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaku eksportir ini juga merupakan bagian bisnis yang terintegrasi dengan usaha pembuatan talas beku yang ada di Bantaeng. Eksportir talas beku yang ada di daerah ini hanya memiliki satu tujuan pasar ekspor yakni ke Jepang. Namun demikian, aktivitas ekspor di masa pandemik terganggu karena alasan PSBB sehingga pihak pembeli dari Jepang tidak dapat melakukan proses uji produk di lokasi pabrik.

Potensi pasar ekspor talas satoimo cukup besar karena sebagian besar masyarakat Jepang telah menjadikan talas sebagai bahan makanan pengganti beras dan kentang. Meskipun demikian ekspor talas ke Jepang memiliki pesaing yang cukup kuat yakni para eksportir yang berasal dari China.

g. Konsumen Domestik (Dalam Negeri)

Tujuan dari setiap rantai nilai komoditi adalah untuk mengkonsolidasikan berbagai aktivitas agar komoditi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akhir. Karena itu konsumen akhir adalah bagian rantai nilai yang memiliki peran penting dalam menentukan jenis dan kualifikasi produk yang harus dihasilkan oleh pelaku rantai nilai di sektor hulu dan sektor pengolahan. Konsumen akhir juga merupakan titik terakhir dari aliran produk dalam rantai nilai. Tingkat harga yang ingin dibayarkan konsumen akhir juga merupakan determinan utama tingkat harga yang dapat ditransmisikan dan didistribusikan ke seluruh pelaku rantai nilai.

Konsumen akhir produk talas di pasar domestik adalah konsumen talas yang berbentuk tepung. Konsumen domestik ini adalah individu atau perusahaan domestik yang membutuhkan tepung talas untuk dikonsumsi langsung atau diubah menjadi produk akhir. Konsumen akhir domestik ini merupakan pembeli tepung talas dari ritel yang ada di Jakarta dan Bandung.

h. Konsumen Luar Negeri

Konsumen akhir luar negeri produk talas yang diproduksi dari Sulawesi Selatan adalah individu atau perusahaan di negara tujuan ekspor yang membutuhkan talas beku untuk dikonsumsi langsung atau diubah menjadi produk akhir. Konsumen akhir luar negeri ini merupakan pembeli talas beku dari pengusaha importir talas beku dari Sulawesi Selatan.

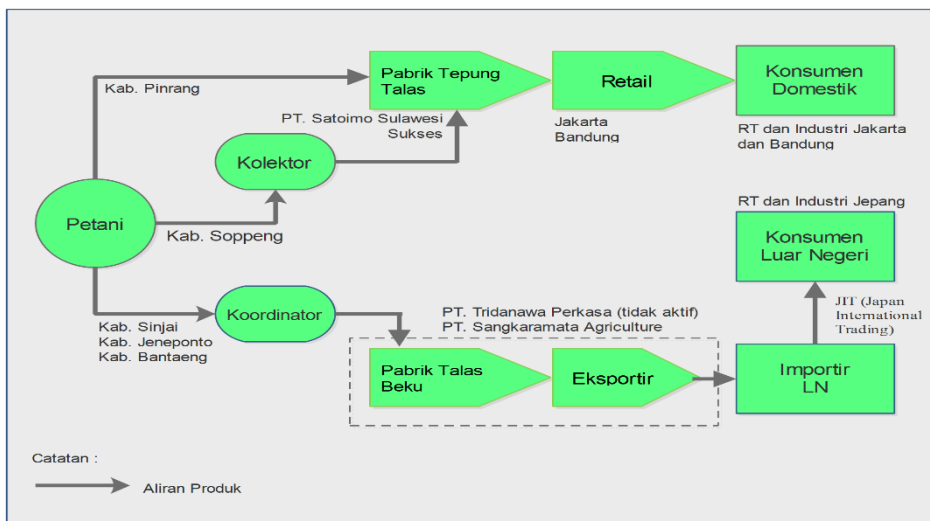
Konsumen akhir talas beku dari Sulawesi Selatan, hingga saat ini masih terkonsentrasi di Jepang.

Karakteristik permintaan talas beku dari negara pengimpor, merupakan informasi penting bagi pelaku-pelaku rantai nilai talas di dalam negeri. Syarat-syarat kualitas atas produk talas beku yang dibutuhkan konsumen akhir adalah informasi penting bagi pelaku rantai nilai. Selain persyaratan kualitas yang cukup membebani pelaku usaha rantai nilai, terdapat pula tantangan yang cukup besar dari pesaing yakni produk talas beku yang berasal dari China. Karena kedekatan lokasinya talas beku China dapat dijual lebih murah di Jepang. Namun karena kondisi agroekologisnya, China tidak dapat memproduksi talas sepanjang tahun. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku rantai nilai talas di Sulawesi Selatan, karena para petani di daerah ini dapat menghasilkan talas sepanjang tahun. Hanya kondisi tersebut belum bisa diwujudkan karena hambatan perdagangan di era covid-19, perusahaan menurunkan permintaan talasnya ke tingkat petani, yang selanjutnya berdampak pada menurunnya minat petani untuk terus membudidayakan talas sebelum ada kepastian pasar.

4.2.3. Struktur Rantai Nilai Talas Satoimo di Sulawesi Selatan

Struktur rantai nilai talas Jepang di Sulawesi Selatan menggambarkan proses aliran produk, aliran informasi dan aliran finansial serta pelaku-pelaku yang terlibat dalam proses aliran tersebut. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan peran dan fungsi masing-masing pelaku rantai nilai, baik pelaku utama maupun pelaku pendukung. Berikut ini diilustrasikan peran pelaku utama dalam berbagai aliran dalam rantai nilai talas satoimo Sulawesi Selatan. Ilustrasi diawali dengan aliran produk sebagaimana diperlihatkan dalam gambar berikut.

Gambar 4.2.
Struktur Aliran Produk dalam Rantai Nilai Talas Satoimo di Sulawesi Selatan

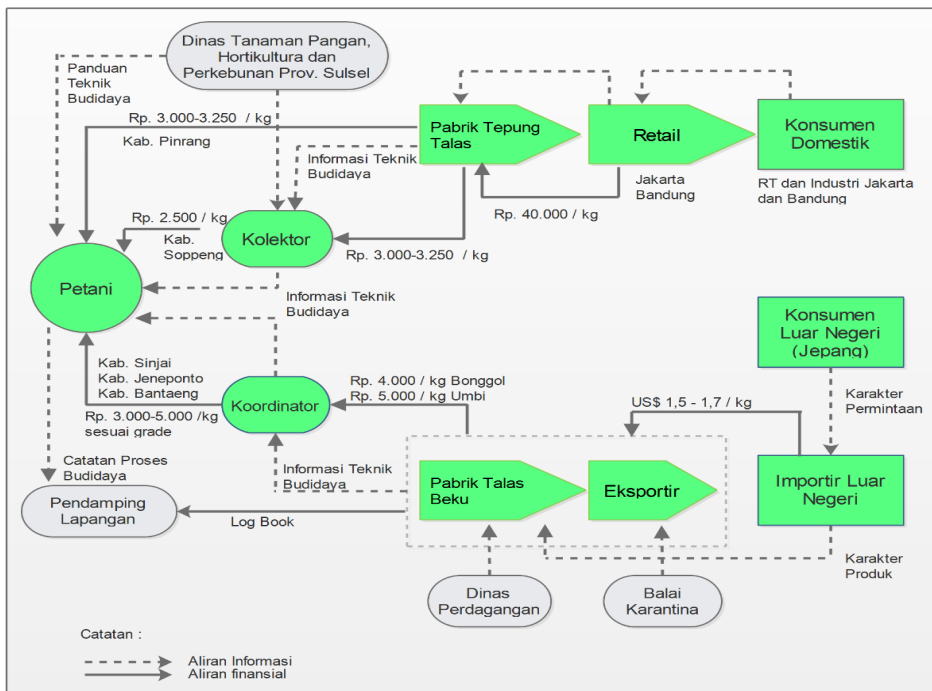


Pada gambar terlihat bahwa terdapat dua aliran utama produk dalam rantai nilai talas di Sulawesi Selatan. Aliran pertama menggambarkan aliran produk tepung talas. Aliran ini bermuara pada konsumen domestik meskipun masih terbatas di wilayah Jakarta dan Bandung. Sedangkan aliran ke dua adalah aliran rantai nilai yang mengalirkan produk talas beku yang bermuara di negara Jepang. Kedua aliran rantai nilai ini masing-masing memiliki potensi

pasar yang cukup besar namun belum bisa dioptimalkan secara maksimal oleh pelaku rantai nilai di Sulawesi Selatan.

Selain aliran produk, berikut ini juga diilustrasikan proses aliran informasi dan aliran finansial dalam rantai nilai talas satoimo. Dalam aliran ini pelaku yang terlibat bukan hanya pelaku utama, tetapi juga beberapa pelaku pendukung yang ikut berkontribusi dalam memperlancar proses aliran informasi dan aliran finansial. Secara ilustrasi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.3.
Struktur Aliran Informasi dan Finansial dalam Rantai Nilai Talas Satoimo di Sulawesi Selatan



4.3. Sektor Hulu

4.3.1. Aspek Ekonomi dan Lingkungan

Lokasi pertanaman talas di Sulawesi Selatan diusahakan baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Tanaman talas pada dataran tinggi dilakukan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto dan Sinjai, sedangkan penanaman talas di dataran rendah di budidayakan di Kabupaten Soppeng. Kondisi permukaan lahan tempat budidaya talas tersebut umumnya datar dan bergelombang (kemiringan < 15%). Dengan demikian dari aspek ketinggian dan kemiringan lereng, praktik budidaya talas secara umum masih relevan dengan kaidah-kaidah lingkungan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi Terdapat 27% responden di Kabupaten Sinjai yang membudidayakan talas kurang sesuai dengan kriteria lokasi berdasarkan prinsip GAP (*good agricultural practice*), yakni kegiatan tanaman talas dilakukan pada dataran tinggi dengan kemiringan lereng diatas 30% tanpa disertai tindakan konservasi. Selain itu di Kabupaten Jeneponto juga terdapat lokasi yang memiliki riwayat terkena banjir, serta sebagian besar lokasi pertanaman tidak memiliki drainase, meskipun jarak lokasi budidaya dari sumber air relatif dekat.

Tabel 4.2.
Karakteristik Lokasi Usaha Tani Talas Satoimo

No	Lokasi UT Talas	% Responden Menurut Karakteristik Lokasi UT Talas			
		Bantaeng	Jeneponto	Sinjai	Soppeng
1	Ketinggian Tempat				
	* > 700 mdpl	100,00	100,00	100,00	12,50
	* 500 - 700 mdpl	0,00	0,00	0,00	6,25
	* 250 - 500 mdpl	0,00	0,00	0,00	75,00
	* < 250 mdpl	0,00	0,00	0,00	6,25
2	Kondisi permukaan lahan				
	* Kemiringan > 30%	0,00	0,00	26,92	0,00
	* Kemiringan 15 - 30%	0,00	0,00	23,08	0,00
	* Kemiringan < 15 %	100,00	100,00	50,00	100,00
3	Kejadian Banjir				
	* Pernah Banjir	0,00	16,67	0,00	31,25
	* Tidak Pernah Banjir	100,00	83,33	100,00	68,75
4	Ketersediaan drainase				

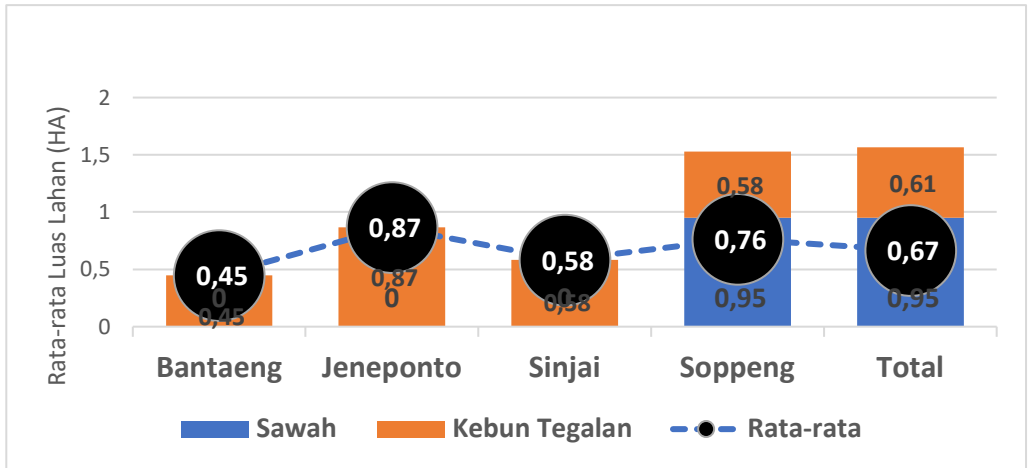
	* Ada	-	50,00	-	93,75
	* Tidak ada	100,00	50,00	100,00	6,25
5	Aksesibilitas				
	* Roda 4	50,00	66,67	0,00	50,00
	* Roda 2	50,00	33,33	100,00	50,00
6	Kemudaha memperoleh Kompos				
	* Mudah	0,00	66,67	92,31	56,25
	* Kadang Sulit	0,00	16,67	7,69	43,75
	* Sulit	100,00	16,67	0,00	0,00
7	Jarak dari sumber air (mtr)	355	220	357	153

Sumber: Data Primer, 2021

Sepuluh responden di Kabupaten Soppeng membudidayakan talas pada lahan sawah tadah hujan dan sebagian lagi diusahakan pada lahan kebun dan tegalan. Sebelum ada budidaya talas, lahan sawah petani di daerah ini rutin ditanami padi pada musim gaduh dan tanaman jagung dan palawija lainnya ditanam pada musim rendengan. Karena itu budidaya talas yang dilakukan 2 (dua) kali setahun di daerah ini berpotensi mengganggu produksi tanaman padi di daerah ini. Untuk lokasi lainnya pertanaman talas di Sulawesi Selatan semuanya diusahakan pada lahan kebun dan tegalan, karenanya tidak mempengaruhi kinerja produksi pangan padi di daerah.

Rata-rata luas lahan budidaya talas petani di Sulawesi Selatan seluas 0,67 Ha. Luas pertanaman talas tertinggi di Kabupaten Jeneponto dan terendah Kabupaten Bantaeng. Untuk lahan talas berbasis sawah, luas rata-rata tanaman talas pada jenis lahan ini seluas 0,95 Ha.

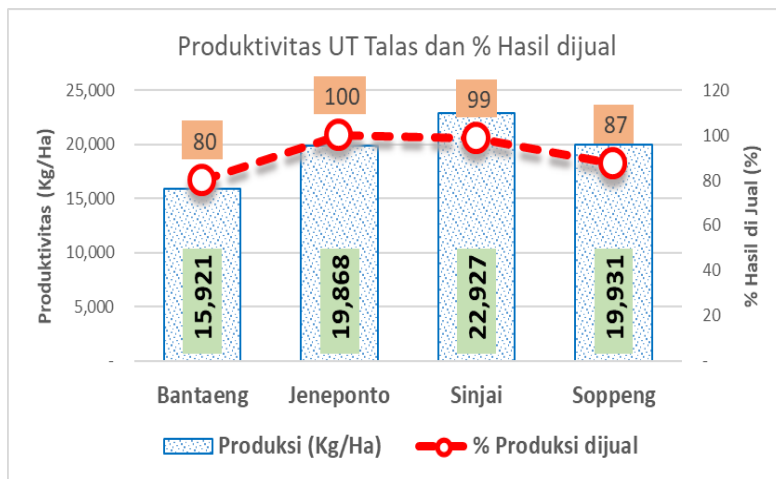
Gambar 4.4.
Rata-rata Luas Lahan Menurut Jenis Lahan Usaha Tani Talas Satoimo

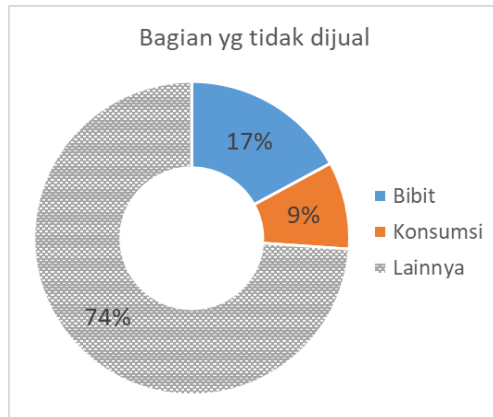


Tingkat produksi dan produktivitas talas di semua wilayah masih jauh dari tingkat produktivitas optimalnya (40 ton per ha). Rata-rata produktivitas yang dihasilkan petani talas di Sulawesi Selatan baru sekitar 19,66 ton per ha. Tingkat produktivitas tertinggi di peroleh di Kabupaten Sinjai (22,93 ton per ha) dan paling rendah di Kabupaten Bantaeng (15,92 ton per ha). Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya, bibit umumnya digunakan dari sisa tanaman sebelumnya, penerapan sistem budidaya yang kurang sesuai anjuran khususnya penggunaan pupuk kompos sebagai pupuk dasar umumnya kurang dari 1 kg per lubang, cara penanaman, serta terbatasnya sistem pengairan yang kurang memadai mempengaruhi proses budidaya.

Hasil produksi petani tidak semua dijual, sebagian diantaranya dikonsumsi dan disiapkan untuk bibit. Namun porsi terbesar dari bagian produksi yang tidak dijual ini karena alasan tidak sesuai standar baik karena alasan ukuran maupun kualitas talas. Di Kabupaten Bantaeng dan Soppeng terdapat responden yang tidak dapat menjual produksinya karena hasil produksinya berjamur dan membusuk, hal ini dikarenakan masa panen bertepatan dengan musim penghujan tanpa ada penanganan pasca panen yang memadai.

Gambar 4.5.
Produktivitas Usaha Tani Talas dan Persentase Hasil Jual Talas Satoimo





Usaha budidaya talas merupakan salah satu komoditi yang memerlukan modal usaha tani yang cukup besar, yakni setidaknya membutuhkan biaya usahatani sekitar Rp. 20 juta per hektar. Komponen biaya yang cukup besar terutama pada komponen biaya sarana produksi dan biaya tenaga kerja. Biaya sarana produksi yang cukup besar nilainya adalah berasal dari komponen biaya bibit dan kompos. Hanya saja di semua lokasi biaya saprodi ini disubsidi oleh perusahaan mitra yang nilainya nanti di potong pada saat panen. Biaya tenaga kerja adalah biaya-biaya yang ditanggung oleh petani dan tidak disubsidi oleh perusahaan mitra atau pemerintah. Komponen biaya tenaga kerja yang paling besar adalah biaya panen.

Tabel 4.3.
Analisis Biaya Usaha Tani Talas Satoimo

No	Struktur Biaya	Biaya UT Talas Jepang (Rp/Ha)				
		Bantaeng	Jenepono	Sinjai	Soppeng	Rata-rata
1	Saprodi					

	* Bibit	5.694.444	3.569.712	4.210.983	4.138.739	4.403.469
	* NPK	1.622.222	1.323.077	1.534.544	1.409.165	1.472.252
	* Kompos	3.333.333	2.903.846	3.278.500	3.452.077	3.241.939
	* Pupuk Kimia Non NPK	-	115.385	-	16.367	32.938
	* Obat2an	-	-	154.010	-	38.503
	Sub Jumlah	10.650.000	7.912.019	9.178.037	9.016.347	9.189.101
2	Sewa Alat	1.111.111	1.298.077	1.569.536	1.072.013	1.330.583
3	Biaya TK					
	* Persiapan lahan	2.763.889	2.213.463	1.697.473	2.194.175	2.217.250
	* Pembibitan	416.667	782.372	205.935	192.755	399.432
	* Penanaman	2.750.000	2.891.186	3.503.098	2.499.821	2.911.026
	* Perawatan	416.667	731.571	3.436.169	1.456.373	1.510.195
	* panen	3.666.667	3.394.231	3.875.252	3.881.905	3.704.513
	* Pasca panen	333.333	478.846	527.340	354.670	423.547
	Sub Jumlah	7.583.333	8.278.205	11.547.794	8.385.523	8.948.714
4	Biaya Tetap					
	* Pajak lahan	19.444	23.077	39.570	24.223	26.578
	* Penyusutan alat	1.132.500	563.643	1.666.058	334.911	924.278
	Sub Jumlah	1.151.944	586.720	1.705.627	359.133	950.856
	Total Biaya	20.496.389	18.075.021	24.000.995	18.833.017	20.351.355

Sumber: Data Primer, 2021

Terbatasnya alat panen menyebabkan petani memanen produksinya secara manual dan ini membutuhkan alokasi tenaga kerja yang besar. Pada umumnya petani membutuhkan waktu panen 8-14 hari per ha dengan jumlah tenaga kerja 5 orang dan bekerja selama 6-8 jam per hari. Sebagian besar petani dalam kegiatan ini harus menggunakan tenaga upah yang dibayar sesuai upah berlaku setempat (Rp. 70.000 – 100.000 per orang per hari).

Sistem harga dan tingkat harga jual produksi talas petani bervariasi menurut lokasi. Pada lokasi di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Sinjai menggunakan sistem grade (tinggi, sedang dan gelondongan), sedangkan di Kabupaten Soppeng umumnya dijual secara gelondongan. Harga jual gelondongan di Kabupaten Soppeng sebesar Rp. 2.500 per kg, sedangkan di

daerah lainnya harga menurut grade berkisar Rp. 3.000 hingga Rp 5.000 per kg.

Nilai penjualan yang diterima petani setelah dipotong biaya sarana produksi cukup tinggi yakni sekitar 57 juta per hektare dan keuntungan petani mencapai Rp. 47 Juta per ha. Keuntungan ini dinilai oleh petani melebihi keuntungan usahatani tanaman pangan lainnya, termasuk keuntungan yang dapat diperoleh jika mengusahakan komoditi padi. BEP harga tanaman talas sekitar Rp. 1.214 artinya harga penjualan petani di atas harga BEP tersebut menguntungkan petani. Jumlah produksi dan penerimaan yang dihasilkan petani juga masih jauh di atas BEP jumlah dan BEP penerimaannya, dengan demikian usaha tani talas sangat efisien dan layak secara ekonomi untuk dikembangkan.

Tabel 4.4
Penerimaan dan Keuntungan Usaha Tani Talas Satoimo

No	Struktur Biaya	Penerimaan dan Keuntungan Petani UT Talas Jepang (Rp/Ha)				
		Bantaeng	Jeneponto	Sinjai	Soppeng	Rata-rata
1	Vol Produksi yg Dijual (Kg)	12.737	19.868	22.597	17.399	18.150
2	Harga Jual (Rp/Kg)					
	* Kisaran Harga	4.000 - 5.000	3.500 - 5.000	3.000 - 4.000	2.500 - 2.700	2.500 - 5.000
	* Rata2 Harga	4.625	4.423	3.743	2.546	3.834
3	Penerimaan UT	58.908.151	87.875.863	84.570.684	44.302.707	68.914.351
4	Potongan Biaya Prod + Angkut	11.796.321	10.783.428	11.622.725		11.400.825
5	Penerimaan Petani	47.111.831	77.092.435	72.947.959	44.302.707	57.513.527
6	Biaya di tanggung Petani	9.846.389	10.278.386	14.976.968	9.833.036	10.633.484
	* Biaya Variabel	8.694.444	9.691.667	13.271.340	9.473.903	9.750.526
	* Biaya Tetap	1.151.944	586.720	1.705.627	359.133	950.856
7	Keuntungan	37.265.442	66.814.049	57.970.991	34.469.671	46.880.043
8	Indikator Efisiensi					
	* R/C	2,72	4,17	3,18	2,35	3,13
	* B/C	1,18	2,66	1,74	1,35	1,61
	* BEP Penerimaan	1.766.360	764.954	2.417.129	616.001	1.369.985
	* BEP Quantity	382	173	646	242	356
	* BEP Harga	1.699	1.060	1.177	1.082	1.214

Sumber: Data Primer, 2021

4.3.2 Aspek Kelembagaan

Pengusahaan talas satoimo di Sulawesi Selatan melibatkan aktor perusahaan eksportir, pemerintah daerah dan petani. Antara perusahaan dan petani terjalin kerja sama kemitraan yang direalisasikan dalam bentuk kontrak kerja sama. Petani di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Soppeng bermitra dengan PT. Satoimo Sulawesi Sukses yang berlokasi di Makassar, sedangkan petani di Kabupaten Sinjai bermitra dengan PT. Sangkara Mata Agriculture yang berlokasi di Kabupaten Bantaeng.

1. Kemitraan Antara Petani dengan Perusahaan

Karakteristik kontrak antara responden dengan perusahaan pengolah talas disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Karakteristik Kontrak Responden

No	Kabupaten	Adanya Kontrak (%)		Sifat Kontrak dengan (%)		Isi Perjanjian kontrak (%)	Kepatuhan Kontrak (%)		Saran agar kontrak lebih adil (%)
		ya	Tdk	klp	ind		ya	tdk	
1	Sinjai	100	0	0	100	Pihak Perusahaan Wajib mengambil semua talas yang telah di budidaya oleh Petani = 84 Ketentuan harga, grade dan umur = 16	96	4	Perlu pendampingan dari pemerintah = 92 Tidak ada = 8
2	Jeneponto	100	0	0	100	Bibit, kompos gratis, potong setelah panen = 100	100	0	Rugi ditanggung bersama = 17 Harga dinaikkan = 50 Bibit cepat tersedia = 17 Harga dinaikkan dan grade sama rata = 17
3	Bantaeng	100	0	0	100	Bibit, kompos gratis, potong setelah panen =100	100	0	Ukuran kecil diambil juga = 50 Tidk ada = 50
4	Soppeng	100	0	0	100	Hasil panen diambil perusahaan = 16,7 Harga, Bibit Dan lama pengambilan = 83,3	0	100	Harus sesuai kontrak, walaupun covid = 83 Pemasaran harus diperhatikan = 17

Sumber : Data primer, 2021

1. Adanya Kontrak

Semua responden pada 4 kabupaten melakukan kontrak kerja sama dengan mitra perusahaan baik yang berada di Makassar maupun di Bantaeng. Responden di Kabupaten Sinjai, Bantaeng dan Jeneponto melakukan kontrak dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Bantaeng, sedangkan responden yang ada di Kabupaten Soppeng melakukan kontrak dengan perusahaan yang ada di Kota Makassar. Inisiasi kontrak juga dilakukan seluruhnya oleh perusahaan mitra baik perusahaan yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di Kabupaten Bantaeng.

2. Sifat Kontrak

Kontrak antara petani dengan perusahaan semuanya bersifat perorangan antara individu dengan perusahaan dan tidak ada yang bersifat kontrak antara kelompok tani dengan perusahaan. Kelebihan dari kontrak seperti ini, masing masing individu bertanggung jawab langsung kepada produksinya, sedangkan kekurangan dari kontrak semacam ini adalah tingkat efisiensi dalam pengelolaan yang rendah.

3. Isi Perjanjian Kontrak

Pada Kabupaten Sinjai, 84% responden menyatakan bahwa pihak perusahaan mengambil seluruh hasil produksi talas satoimo tanpa memandang ukuran, sedangkan 16% responden menyatakan bahwa pihak perusahaan mengambil hasil produksi talas satoimo dengan ketentuan harga, grade, dan umur. Pada Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng, 100% responden menyatakan bahwa bibit dan kompos ditanggung oleh perusahaan dan setelah panen akan dipotong harga jual sesuai dengan harga bibit dan kompos. Pada Kabupaten Soppeng, 83,3% responden menyatakan bahwa dalam kontrak terdapat harga bibit dan lama pengambilan, sedang 16,7% responden menyatakan bahwa hasil panen diambil perusahaan. Adanya variasi isi kontrak menunjukkan bervariasinya isi kontrak antara

perusahaan dengan petani. Adanya kejelasan kontrak akan meningkatkan kepastian akan hasil yang akan didapatkan oleh petani. Dalam kontrak menurut PT. Sangkara Mata Agriculture tercantum persyaratan antara lain jenis (umbi > 20 gr, bonggol), ukuran, bebas jamur, tidak busuk, bebas dari tanah dan akar, tidak ada bekas ulat, residu pestisida minimal, waktu panen, penggunaan jenis dan dosis pestisida yang direkomendasikan, harga yang disepakati pada kontrak pertama ukuran umbi dibawah 20 gr tetap diambil. Untuk kontrak selanjutnya umbi dibawah 20 gr tidak diambil lagi, demikian juga dengan bonggol. Untuk memeriksa kandungan pestisida di umbi talas, sampel dikirm ke laboratorium terakreditasi di Surabaya atas tanggungan perusahaan.

4. Kepatuhan Terhadap Kontrak

Kepatuhan terhadap kontrak antara perusahaan dengan petani menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada Kabupaten Sinjai, 96% responden menyatakan pihak perusahaan mematuhi kontrak, sedang 4% responden menyatakan perusahaan tidak mematuhi kontrak. Pada Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng, 100% responden menyatakan bahwa perusahaan patuh terhadap kontrak. Pada Kabupaten Soppeng, 100% responden menyatakan bahwa perusahaan tidak mematuhi kontrak karena pada waktu panen perusahaan tidak lagi mengeksport karena pandemi. Ketidakpatuhan terhadap kontrak adalah masalah utama yang menyebabkan penurunan minat petani dalam mengusahakan talas satoimo karena tidak adanya kepastian dalam pemasaran hasil. Adanya ketidakpatuhan terhadap kontrak perlu diantisipasi dengan pendampingan, pengawasan serta fasilitasi dari OPD terkait sehingga penegakan terhadap kontrak dapat terlaksana.

5. Saran agar kontrak lebih adil

Agar kontrak lebih adil, maka tanggapan responden bervariasi. Pada Kabupaten Sinjai, 92% responden menyatakan perlu pendampingan dari

pemerintah, dan 8% menyatakan tidak ada. Pada Kabupaten Jeneponto, 50% responden menyatakan harga jual petani perlu dinaikkan, 17% responden menyatakan rugi ditanggung bersama, 17% responden menyatakan bibit cepat tersedia, dan 17% menyatakan harga dinaikkan dan grade sama rata. Pada Kabupaten Bantaeng, 50% responden menyatakan talas ukuran kecil diambil juga, dan 50% responden menyatakan tidak ada. Pada Kabupaten Soppeng, 83% responden menyatakan bahwa kontrak harus tetap dilaksanakan walaupun ada pandemi, sedang 17% responden menyatakan bahwa pemasaran harus diperhatikan. Menurut pihak perusahaan, kontrak sudah dipenuhi bahkan ada toleransi untuk hasil produksi yang dipanen sebelum waktunya yang dibawa ke pabrik. Demikian pula dengan dengan umbi yang bercampur dengan akar dan tanah, perusahaan tetap mengambil tapi dengan mencuci kemudian.

2. Karakteristik Kelompok Tani

Sejak tahun 2019 sampai 2021, jumlah kelompok tani dan jumlah petani yang mengusahakan budidaya talas satoimo makin menurun. Dari 66 Kelompok tani pada tahun 2019 di sepuluh kabupaten rintisan talas, menurun saat ini rata-rata tinggal 1 kelompok tani saja dengan jumlah petani yang makin berkurang, sebagai contoh di Sinjai dari awalnya 2 kecamatan 3 desa sekarang tinggal 1 kecamatan dan 1 desa serta hanya tinggal 1 kelompok tani saja, di Bantaeng dari 8 kecamatan tinggal 1 kecamatan dengan 1 kelompok tani saja. Hal ini disebabkan karena secara ekonomi dirasakan tidak adanya kepastian harga dan pasar sehingga banyak petani yang berpindah ke komoditas lain yang lebih jelas harga dan ada pasarnya.

Tabel 4.6.
Karakteristik Kelompok Tani

No	Kabupaten	Legalitas kelompok tani (%)	Rata-rata umur klp (thn)	Klp tani umum/khusus talas		AD/ART (%)		Rata-rata Jumlah anggota	Pertemuan	Pembagian kerja
				Umum	khusus	ya	tdk			
1	Sinjai	100	3,0	100	0	100	0	30,0	Ketika ada bantuan	Ada
2	Jenepono	100	7,7	100	0	83	17	26,3	Pelatihan =1 Pembagian bibit =3 Komoditas yg baik ditanam =2	Tidak ada
3	Bantaeng	100	10,0	100	0	100	0	44,0	Ketika ad bantuan	Tidak ada
4	Soppeng	100	24,0	100	0	100	0	140,0	Ketika ada bantuan	Ada

Sumber : Data primer, 2021

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua kelompok tani yang mengusahakan talas satoimo mempunyai legalitas kelompok, artinya kelompok sudah terdata dalam database instansi terkait dan mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dan fasilitasi dari pemerintah. Usia kelompok tani bervariasi antara 3 tahun untuk kelompok tani di Sinjai sampai 24 tahun untuk kelompok tani di Soppeng. Semakin tinggi usia kelompok tani, maka semakin berpengalaman kelompok tani dalam melakukan usahatani. Semua kelompok tani yang diwawancara adalah kelompok tani yang mengusahakan berbagai komoditas tidak secara khusus mengusahakan komoditas talas satoimo. Jumlah anggota kelompok tani bervariasi antara 30 orang untuk kelompok tani di Sinjai sampai 140 orang untuk kelompok tani di Soppeng. Pertemuan kelompok tani lebih banyak dilakukan pada saat ada bantuan,

setelah itu ketika ada pembagian bibit dan ketika ada pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi fungsi kelompok belum berjalan sebagaimana mestinya. Kelompok lebih banyak difungsikan sebagai alat dalam mendapatkan bantuan. Pembagian kerja dalam kelompok bervariasi. Untuk kelompok tani yang ada di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sinjai, pembagian kerja antar anggota sudah ada, sedangkan pembagian kerja antar anggota pada kelompok tani yang ada di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng.

Prosedur panen: panen, 2,3 hari dibalik baru dicabut dari bonggol, di tempat tertutup supaya tidak kena hujan, disortir, dimasukkan ke truk, sampai di pabrik diterima di pengolahan bahan baku, bahan baku disimpan di tempat penyimpanan sementara maksimal 1 minggu, ditimbang, dicuci, untuk membuang tanah, akar, pemisahan metode tenggelam terapung, kalau tenggelam kandungan patinya tinggi, kalau terapung kandungan patinya rendah. Yang tenggelam standar ekspor, yang terapung akan dicirikan pasar kemudian disamakan dengan bonggol. Kemudian dikupas, setelah itu dicuci, kemudian proses blanching melalui *hot tank* (proses pemanasan dengan waktu tertentu dan proses pendinginan dengan waktu tertentu sekitar 2 jam) setelah itu masuk ke pembekuan cepat dengan suhu -20°C kemudian pemberian *glazing* (pemberian lapisan es) kemudian disimpan ke *cold storage* siap untuk dishipping. Masa kadaluwarsa *cold storage* 2 tahun.

4.3.3 Aspek Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat selalu dinamis tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, salah satu ciri pemberdayaan masyarakat yakni selalu menitikberatkan pada pendekatan pada bagaimana petani menjadi penggerak perubahan yang dilakukan secara sukarela atas kemauan mereka sendiri, bersifat memperkuat modal sosial yang telah mereka miliki dan bersifat langgeng.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa di sektor hulu distribusi alat produksi masih didominasi oleh kepemilikan pribadi. Peralatan yang digunakan dalam pengolahan talas satoimo tidak banyak sehingga tidak membutuhkan pengeluaran khusus untuk budidaya talas satoimo. Pada tahap awal, bibit yang diusahakan adalah bibit yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten (Kabupaten Bantaeng), selanjutnya petani sendiri yang mengusahakan bibit yang disisihkan dari hasil panen pertama mereka. Dalam hal pengetahuan, ditemukan bahwa petani yang terlibat dalam budidaya talas satoimo adalah petani yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pihak pembeli antara lain, lahan yang sesuai dengan syarat tumbuh dan mau bekerjasama. Selanjutnya pihak pembeli memberikan dukungan pengetahuan cara tanam talas secara langsung lewat koordinator petani dan juga lewat pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dalam pengembangan talas satoimo lebih dititikberatkan pada pelatihan budidaya pertanian, sementara pelatihan manajemen kelompok, pengelolaan keuangan, pengelolaan pasca panen dan pemasaran masih belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Berikut tabel yang memperlihatkan keikutsertaan petani dalam pelatihan pengembangan talas satoimo di 5 kabupaten lokasi penelitian.

Tabel 4.7.
Keikutsertaan Petani dalam Pelatihan Pengembangan Talas Satoimo

Lokasi Penelitian	Pelatihan Budi Daya Pertanian	Manajemen Kelompok Tani	Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Pasca Panen	Pemasaran
Kab. Sinjai	-	-	-	-	-
Kab. Bantaeng	Ya	-	-	-	-
Kab. Jeneponto	Ya	-	-	-	-
Kab. Soppeng	Ya	Ya	-	Ya	-
Kab. Pinrang	-	-	-	-	-

Sumber : Data primer, 2021

Seperti terlihat dari tabel di atas bahwa dari 5 kabupaten yang melakukan budi daya talas satoimo, pelatihan budi daya pertanian hanya pernah dilaksanakan di Kabupaten Soppeng, Bantaeng, dan Jeneponto. Sementara untuk pelatihan manajemen kelompok tani dan pengelolaan pasca panen hanya dilaksanakan di Kabupaten Soppeng. Untuk pelatihan pengelolaan keuangan dan pelatihan pemasaran sama sekali tidak dilakukan pada lima kabupaten yang melaksanakan budi daya talas satoimo. Sementara Kabupaten Sinjai dan Pinrang sama sekali tidak pernah mengikuti pelatihan untuk pengembangan talas.

Jika dilihat dari aspek pemberdayaan maka petani talas secara garis besar tidak mendapatkan pembinaan dari dinas terkait di kabupaten untuk peningkatan kapasitas cara bertani talas yang baik. Dari hasil observasi lapangan ditemukan bahwa instansi yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan yang menitik beratkan pada pelatihan budi daya pertanian.

Adapun manfaat dari pelatihan yang diikuti, seluruh petani menganggap bahwa ilmu yang didapat dari pelatihan sangat berguna dalam proses budi daya talas satoimo. Dari semua responden petani talas menganggap bahwa mereka membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengembangan talas satoimo. Secara berurutan pelatihan yang masih dibutuhkan oleh petani adalah pelatihan teknik budi daya talas, pelatihan penguatan kelembagaan kelompok tani, pelatihan pengelolaan pasca panen, dan pelatihan administrasi keuangan.

Hal ini memperlihatkan bahwa antusias petani talas terhadap pengetahuan pengembangan talas cukup tinggi. Namun demikian sumber informasi dan sumber pengetahuan mengenai pengembangan talas masih terbatas. Petani yang terlibat penanaman talas masih belum menguasai dengan

benar cara menanam talas yang baik, hal ini terlihat dari banyaknya hasil panen yang tidak masuk dalam standar yang ditetapkan perusahaan.

Untuk aspek pendampingan, terlihat bahwa dari 5 kabupaten, terdapat 2 kabupaten yang tidak mendapatkan pendampingan dari dinas terkait yaitu Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Pinrang. Sedangkan Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Soppeng telah mendapatkan pendampingan dari perusahaan khususnya dalam budidaya pertanian. Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa pelaku pendampingan terdiri atas pendamping dari perusahaan. Hasil penelusuran lebih jauh memperlihatkan bahwa tenaga pendamping merupakan tenaga yang disiapkan oleh perusahaan untuk mendampingi petani dalam budidaya talas satoimo untuk menjamin prosedur yang tepat dalam penanaman hingga panen.

Model pendampingan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membentuk tim pendamping yang memiliki jadwal kunjungan ke petani yang diatur waktunya 1 kali kunjungan pertemuan dengan petani dalam waktu 2 minggu dan dilakukan secara rutin untuk memastikan semua tahapan yang dipersyaratkan sesuai petunjuk teknis dilakukan secara tepat oleh petani. Hal ini dimulai dari penyiapan bibit, pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, penyiangan, pemberian air, penggunaan pestisida dan panen serta pengolahan pasca panen.

Tabel 4.8.

Pendampingan Petani dalam Pengembangan Talas Satoimo

Lokasi Penelitian	Mendapatkan pendampingan	Lama pendampingan	Bentuk pendampingan yang diikuti	Butuh pendampingan ?	Jenis pendampingan yang dibutuhkan *
Kab. Sinjai	tidak	-	-	Ya	A,B,C,D,E
Kab. Bantaeng	ya	< 1 tahun	Budidaya	Ya	A,B
Kab. Jeneponto	ya	< 1 tahun	Budidaya	Ya	D

Kab. Soppeng	ya	< 1 tahun	Budidaya	Ya	A,B,C,D,E
Kab. Pinrang	tidak	-	-	Ya	A,B,C,D,E

*A. Teknik budidaya talas, B. Penguatan kelembagaan dan kelompok tani, C. Pengolahan pasca panen, D. Pemasaran, E. Administrasi dan keuangan
 Sumber : Data primer, 2021

Dalam aspek pembagian kerja, dapat ditelusuri bahwa komponen yang terlibat dalam usaha budidaya talas terbagi atas petani, buruh tani, dan koordinator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan petani talas dilakukan berdasarkan perjanjian/kontrak antara petani dengan pembeli. Pendekatan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk mengintroduksi komoditas baru diperlukan pemasaran yang jelas, oleh karena itu kerja sama antara petani dan pembeli dibuat untuk menjamin bahwa apa yang dihasilkan oleh petani akan dibeli oleh pembeli/perusahaan. Kontrak perjanjian dilakukan juga untuk menjamin mutu produksi dan membatasi petani yang dapat ikut dalam program untuk menghindari tidak terkontrolnya produksi yang harus dibeli. Buruh tani terlibat pada saat tertentu ketika proses pengolahan membutuhkan tenaga kerja seperti pada pengolahan lahan dan pemanenan. Budidaya talas dapat meningkatkan peran keluarga dan masyarakat dalam tahapan budidaya talas dengan memberikan peluang pekerjaan bagi anggota keluarga yang selama ini tidak mempunyai pekerjaan. Banyak di antara petani talas adalah petani penggarap dan secara langsung mendekati kekerabatan rumpun keluarga sekaligus memberikan kontribusi secara ekonomi bagi para petani.

Keterlibatan para aktor dalam pemberdayaan yang terjadi pada rantai nilai talas saotoimo menunjukkan bahwa interaksi antara pemerintah, swasta dan petani talas dalam pemberdayaan masyarakat pada budidaya talas sudah terjadi dan masing-masing pihak telah melakukan peran walaupun masih terbatas pada anggaran yang tersedia dan kepentingan masing-masing pihak.

Dari penelusuran lapangan, ditemukan bahwa tidak semua petani talas dapat mengusahakan talas secara berkesinambungan. Pada tahap awal pengembangan talas, pihak perusahaan menjamin pembelian talas untuk diolah menjadi *frozen* talas, namun terkendala pada produk yang tidak sesuai spesifikasi sehingga keberlanjutan perusahaan untuk mengirim secara kontinu juga terhambat. Hal ini terjadi karena adanya persyaratan produk yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan petani sehingga berimplikasi pada harga beli perusahaan. Kondisi ini menyebabkan adanya petani yang tidak melanjutkan budidaya dan beralih ke tanaman lainnya. Namun demikian di satu sisi hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat petani talas yang secara mandiri membudidayakan talas yang mengindikasikan bahwa masih ada peluang pengembangan potensi talas ke depannya selama pasar talas satoimo masih terbuka. Untuk lebih jelasnya peran pelaku dan bentuk pemberdayaan pada sektor hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9.
Bentuk Pemberdayaan pada Sektor Hulu

Sektor	Bentuk Pemberdayaan	Pelaku	Keterangan
Hulu	Pelatihan	Pemerintah provinsi, Perusahaan, Koordinator/ Kolektor	
	Pendampingan	Perusahaan, Koordinator/Kolektor	
	Bantuan bibit, pupuk	Pemerintah provinsi	Waktu pemberian bantuan terpaut pada siklus anggaran
	Bantuan bibit	Perusahaan	Harga bibit diperhitungkan perusahaan pada saat pembelian hasil panen

Sumber : Data primer, 2021

4.3.4. Aspek Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial

Pada sektor hulu, aspek GESI digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat sejauh mana relasi laki-laki dan perempuan dalam proses budi daya talas satoimo. Untuk mendapatkan informasi, dilakukan wawancara mendalam secara purposive kepada perempuan yang bekerja pada sektor pertanian talas. Penelitian ini mengkaji mengenai *gender gap* mengenai *das sollen* dan *das sein* terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap perempuan yang dipengaruhi oleh adanya ketidakadilan gender dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam pertanian talas satoimo di Kabupaten Sinjai, Jeneponto dan Soppeng, kecuali di Bantaeng, peran perempuan sangat strategis sebagai mitra laki-laki. Terdapat perbedaan jenis pekerjaan dalam keterlibatan laki-laki dan perempuan di mana laki-laki lebih dominan mengerjakan pengolahan dan penyiapan lahan. Sedangkan keterlibatan perempuan hampir pada semua tahapan budi daya talas satoimo, dimulai dari penanaman sampai pada talas siap diangkut ke pabrik.

Tabel 4.10.
Keterlibatan Perempuan dalam Pertanian Talas

Peran	Laki-laki	Perempuan
Penyiapan Lahan	√	
Penanaman		√
Pemeliharaan		√
Pemupukan		√
Penyiraman		√
Pemanenan		√
Pemisahan dari Tanah dan Akar		√

Pengelompokkan berdasarkan Ukuran		V
-----------------------------------	--	---

Sumber : Data primer, 2021

Analisis pada aspek GESI selalu melihat sejauh mana Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) memberi kontribusi terhadap perempuan dalam rantai nilai talas satoimo guna memastikan bahwa suatu rantai nilai telah memenuhi unsur-unsur atau dapat dikategorikan responsif gender, diperlukan suatu alat analisis berupa parameter kesetaraan gender yang di dalamnya terdapat indikator-indikator mengenai kesetaraan gender yang terdiri dari: akses, partisipasi, kontrol; dan manfaat, atau yang lebih lanjut dikenal dengan singkatan APKM. Keempat indikator tersebut perlu diintegrasikan pada setiap tahapan rantai nilai. Pengintegrasian keempat indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Akses

Tahapan budidaya talas satoimo, dimulai dari penyediaan lahan, penanaman, pembersihan, penyiraman, pemupukan, pemanenan, pelepasan dari bonggol, pembersihan dari tanah dan akar serta pengelompokan berdasarkan ukurannya. Dari keseluruhan proses tersebut, laki-laki pada umumnya berperan di tahapan penyediaan lahan. Sedangkan perempuan berperan pada tahap selanjutnya setelah lahan tersedia dan siap ditanami.

Meskipun peran perempuan hampir pada semua tahapan kecuali persiapan lahan tapi perannya bukan dianggap sebagai petani namun sebagai buruh tani.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa petani talas secara keseluruhan diakui dilakukan oleh laki-laki. Jika perempuan terlibat (sejak penanaman sampai terjadinya pengelompokan berdasarkan ukurannya) maka statusnya adalah membantu suami (lahan milik sendiri) atau sebagai buruh tani yang bekerja di lahan milik orang lain dan bukan sebagai petani.

Hal ini salah satunya disebabkan oleh peran perempuan dalam sektor pertanian talas dianggap belum memegang peranan utama. Sehingga buruh tani perempuan belum diakui sebagai petani yang memiliki akses sebagai profesi petani.

Sebagaimana penuturan perempuan setengah baya yang ditemui di desa Gunung Perak di Kabupaten Sinjai, menyebutkan bahwa keterlibatannya dalam pertanian talas sebagai buruh tani. Pekerjaan sebagai buruh tani untuk menanam, menyiram tanaman, membersihkan, memupuk, memanen, memisahkan dari bonggol, membersihkan dari akar dan memilah-milah berdasarkan ukurannya.

b. Partisipasi

Partisipasi perempuan dalam budidaya talas satoimo sudah cukup signifikan, namun statusnya dipandang sebagai pihak yang membantu suami. Sehingga peran perempuan tidak dinilai sebagai sebuah peran profesi petani. Hal ini menunjukkan bahwa petani laki-laki memiliki peran yang lebih dominan dalam hal partisipasinya pada budidaya talas satoimo. Terlebih jika lahan yang digunakan adalah milik sendiri. Sehingga penghasilan yang diterima dianggap penghasilan suami sebagai kepala keluarga.

Namun jika laki-laki sebagai pekerja, maka posisinya sama dengan perempuan di mana keduanya merupakan buruh tani. Implikasi yang ditimbulkannya adalah partisipasi perempuan dalam budidaya talas satoimo tidak lebih sebagai anggota keluarga yang membantu suami.

c. Kontrol

Peran perempuan dalam hal kontrol memperlihatkan adanya proporsi yang lebih dominan pada aspek belanja kebutuhan rumah tangga. Namun pada aspek kebutuhan budidaya talas satoimo, terlihat bahwa laki-laki lebih dominan. Pembagian kontrol ini sesuai proporsi masing-masing

di mana perempuan dalam perspektif budaya Bugis-Makassar lebih banyak terlibat pada urusan domestik, sedangkan laki-laki pada urusan di ranah publik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembagian kontrol laki-laki dan perempuan mendapatkan pembagian peran yang proporsional. Menurut penuturan salah seorang responden perempuan paruh baya sebagai IRT:

“Saya yang simpan dan mengatur penghasilan dari hasil kebun. Saya yang membelanjakan uang itu untuk beli kebutuhan makanan, biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan lain. Kalau mau membeli seperti motor atau alat pertanian, dst, maka itu dibicarakan dengan suami.”

Berbeda halnya dengan perempuan kepala keluarga (*single parent*), kontrolnya dilakukan oleh yang bersangkutan tanpa keterlibatan orang lain. Penghasilannya digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, termasuk untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya serta kebutuhan sosial.

Perempuan yang bekerja sebagai buruh tani, mendapatkan upah dengan jumlah yang berbeda. Penuturan salah seorang buruh tani perempuan berpendidikan tamatan SMP di desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

“Saya menjadi buruh tani talas sejak 2019 dan mendapatkan upah harian sebesar 70 ribu rupiah dengan 8 jam kerja. Penghasilan buruh tani saya pakai untuk biaya pendidikan anak pertama yang kuliah dan yang kedua di bangku SMA.”

Perempuan paruh baya ini menyatakan bahwa suaminya juga bertani tanaman lain di lahan milik mereka sendiri dan penghasilannya dikumpul dan dipegang oleh istri yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun pendidikan anak-anak. Ketika ditanyakan mengenai pekerjaan di rumah tangga misalnya memasak dan menyediakan makanan, dia menyatakan:

“Saya tidak selalu memasak kalau pagi. Kalau tidak sempat dan harus berangkat kerja, saya tidak memasak makanan. Suami saya juga membantu pekerjaan di rumah. Kalau saya terlambat pulang kerja, suami saya yang memasak makanan untuk makan malam.”

d. Manfaat

Manfaat yang diperoleh perempuan jika lahan yang dikelola milik sendiri adalah penghasilan yang meningkat akan mendukung pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak. Penghasilan ini umumnya disimpan dan dikelola oleh perempuan (istri) dan beberapa pengeluaran untuk pembelian barang (bergerak) dibicarakan bersama dengan laki-laki (suami).

Sedangkan perempuan yang bekerja sebagai buruh tani, mendapatkan kesempatan pekerjaan dan penghasilan sebagai upahnya. Kisaran upah buruh tani antara 50 ribu sampai 70 ribu rupiah per hari dengan lama bekerja 8 jam. Perbedaan ini terjadi karena buruh tani yang diberikan upah 50 ribu, mendapatkan makan siang yang disediakan oleh pemilik lahan.

Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan dalam budidaya talas satoimo, yaitu upah buruh tani laki-laki sebesar Rp. 70.000, sedangkan buruh tani perempuan sebesar Rp. 50.000. Perbedaan ini lebih didasarkan pada jenis pekerjaan buruh tani laki-laki yang dianggap lebih berat dibandingkan pekerjaan yang dilakukan buruh tani perempuan, meskipun jam kerja yang sama.

e. Analisis Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial

Temuan lapangan berdasarkan aspek GESI yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peran perempuan di pertanian talas telah memperlihatkan realitas bahwa perempuan telah mengambil peran di wilayah publik. Peran perempuan dibedakan menjadi dua yaitu

mengerjakan lahan milik sendiri dan mengerjakan lahan milik orang lain sebagai buruh tani. Dengan menelaah peran perempuan disektor ini, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan gender masih dialami oleh perempuan.

f. Pengarusutamaan Gender

Penelitian di sektor hulu pada aspek kebijakan memperlihatkan adanya integrasi isu gender dan sosial inklusi di dalamnya sehingga hal ini berpengaruh terhadap perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara khusus pada sektor pertanian dan sektor terkait lainnya seperti koperasi dan UMKM, perindustrian dan perdagangan dan pemberdayaan perempuan.

Secara khusus pada sektor pertanian, berdasarkan wawancara mendalam dengan penyuluh pertanian di Kabupaten Jeneponto diungkapkan:

“Penyuluhan pertanian yang dilakukan hanya membahas mengenai cara bertani yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan penerapannya kepada komoditas pertanian sehingga dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan.”

Penuturan ini menunjukkan bahwa penyuluhan belum menyentuh aspek gender dan sosial sebagai penguatan lain kepada petani, misalnya mengenai pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam pertanian, perlindungan kepada buruh tani dan pemenuhan hak-haknya khususnya buruh tani perempuan serta kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam keanggotaan dan kepengurusan kelompok tani.

g. Aspek Ekonomi

Hasil wawancara dengan seluruh responden perempuan khususnya yang bekerja sebagai buruh tani, menunjukkan bahwa mereka menerima

saja besaran upah yang ditentukan oleh majikan/pemberi kerja. Hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikannya, karena mereka tidak mengetahui ketentuan mengenai upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah. Begitu pula dengan hak-hak mereka sebagai pekerja, tidak diketahui dan tidak pernah diusulkan untuk menjadi perhatian majikan/pemberi kerja.

Hal lain yang menjadi temuan lapangan adalah perhitungan peran perempuan secara ekonomi dalam pertanian talas, baik peran secara langsung maupun tidak langsung. Peran perempuan pada aspek ekonomi luput diperhitungkan, khususnya pada sistem pertanian yang menggunakan tenaga perempuan sebagai anggota keluarga yang bekerja di lahan milik sendiri. Hal ini terlihat pada peran langsung perempuan (sebagai istri) dalam berbagai tahapan seperti penanaman, pemeliharaan, pemupukan, penyiraman, pemanenan, pembersihan dari akar dan pengelompokan berdasarkan ukuran talas. Peran istri pada umumnya dianggap membantu suami sehingga tenaga dan waktu yang dikeluarkan tidak menjadi perhitungan sebagai biaya dalam sektor produksi. Begitu pula dengan peran tidak langsung dalam pertanian, seperti peran menyediakan makanan baik untuk suaminya yang bekerja di ladang maupun kepada pekerja lainnya jika mempekerjakan orang lain sebagai buruh tani.

Salah satu ketidakadilan gender yang dialami perempuan adalah sub-ordinasi. Meskipun perempuan telah mendapatkan akses dan partisipasi di sektor pertanian talas, namun peran dan posisinya masih mendapatkan sub-ordinasi dari laki-laki.

Pada sektor hulu, sub-ordinasi ini terjadi dalam hal eksistensi pada sektor pertanian sebagai profesi. Jika perempuan bekerja di lahan milik sendiri maka perannya dianggap membantu suami sehingga hanya laki-laki yang dikategorikan berprofesi sebagai petani. Sedangkan perempuan

sebagai buruh tani, maka juga tidak dianggap sebagai petani tetapi sebagai pekerja yang disewa tenaganya dan diberi upah. Sub-ordinasi ini berdampak pada keterlibatan perempuan dalam kelompok tani, di mana perempuan sama sekali tidak dilibatkan dalam keanggotaan kelompok tani, apalagi sebagai pengurus. Sehingga dengan begitu, perempuan tidak akan terlibat dalam mengusulkan ide atau pendapatnya terkait dengan kebutuhan atau hal lainnya untuk menguatkan peranannya di sektor ini.

4.3.5 Aspek Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang diambil pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu keputusan. Kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan untuk mengembangkan talas satoimo dapat dikatakan kebijakan untuk mewujudkan Misi ke-3 yaitu kebijakan untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah. Misi ke-3 ini mempunyai sasaran untuk :

1. Meningkatnya produktifitas pada pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2. Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah.

Kebijakan pengembangan talas satoimo ini juga untuk mendukung misi ke-5 yaitu, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian, dengan sasaran meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam.

a. Perencanaan

Pendalaman data dan informasi dari lokasi penelitian untuk melihat keterkaitan rancangan RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk

mengembangkan komoditas unggulan baru talas Jepang Satoima adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11.
Keterkaitan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lokasi Penelitian

No	Lokasi Penelitian	RPJMD/RKPD	Renstra/Renja Dinas Pertanian	Keterangan
1.	Provinsi Sulsel	Menunjang misi 3 & 5	Masuk dalam Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Komoditas unggulan
2.	Kab. Sinjai	Tidak tercantum dalam RPJMD	Tidak tercantum	Komoditas potensial
3.	Kab. Bantaeng	Tidak tercantum dalam RPJMD	Tidak tercantum	Komoditas potensial
4.	Kab. Jeneponto	Tidak tercantum dalam RPJMD	Tidak tercantum	Komoditas potensial
5.	Kab. Soppeng	Tidak tercantum dalam RPJMD	Tidak tercantum	Komoditas potensial
6.	Kab. Pinrang	Tidak tercantum dalam RPJMD	Tidak tercantum	Uji coba

Sumber: Data Primer, 2021

Perencanaan yang baik dan terkomunikasikan di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan awal kesuksesan pelaksanaan kegiatan. Melalui perencanaan yang baik selanjutnya dilaksanakan kegiatan yang lebih detil oleh kabupaten untuk menunjang pencapaian misi pemerintah provinsi, melalui pencapaian *goals* program, tujuan kegiatan dan keberhasilan *output* sub kegiatan. Dari hasil analisis terkait perencanaan tampak bahwa komoditas talas satoimo oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan telah direncanakan untuk

menunjang misi ke 5 dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini tertuang dalam bagian perencanaan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dalam Renstra Dinas dan terinci dalam tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019–2023 melalui Program Peningkatan produksi tanaman pangan pada kegiatan Peningkatan produksi dan pengembangan tanaman talas serta Bantuan benih talas satoimo. Adapun target kinerjanya pada tahun 2019 diharapkan mencapai produksi 6.000 ton dan tahun 2023 mencapai produksi 12.000 ton. Artinya diharapkan ada peningkatan produksi 2 kali lipat dari tahun 2019.

Rencana produksi talas satoimo 2 (Dua) kali lipat pada tahun 2023 apakah dapat tercapai maka peneliti melakukan pengamatan pada ke 5 (lima) kabupaten lokasi penelitian, di mana terlihat tidak satupun kabupaten lokasi penelitian mencantumkan talas satoimo sebagai tanaman unggulan. Talas satoimo bagi kabupaten masih digolongkan pada tanaman potensial walaupun pada kabupaten lokasi penelitian telah melakukan uji coba tanaman tersebut. Pemerintah kabupaten belum menggolongkan sebagai komoditas unggulan daerah. Alasan pemerintah kabupaten adalah karena masih meragukan pasar yang masih dimonopoli oleh pihak swasta dan satu perusahaan saja dan belum mempunyai pangsa pasar di dalam negeri. Hal ini mengakibatkan pemerintah kabupaten belum mengkomodir talas dalam RPJMD kabupaten dan Rencana Strategis dinas pertanian kabupaten dan belum memasukkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikawal langsung.

Konsekuensi akibat tidak tercantum dalam RPJMD kabupaten maupun Renstra dan Renja masing-masing Dinas Pertanian kabupaten

adalah program/kegiatan pengembangan talas satoimo tidak menyediakan dukungan anggaran sehingga kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten.

Keberadaan pertanaman talas satoimo di kabupaten adalah karena perekrutan ketua kelompok tani maju dan ketua kelompok tani milenial oleh Dinas TPH&P Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mengembangkan talas dengan sistem kontrak. Kelompok tani yang menaman dengan kontrak akan mendapat bibit awal, saprodi dan pendampingan dari perusahaan untuk budidaya talas satoimo hingga panen. Hasil pertanian akan dibeli oleh perusahaan dengan harga tertentu sesuai kontrak diperhitungkan dengan bantuan bibit dan saprodi yang diberikan.

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan menyediakan dana awal bagi petani antara lain bibit dan sarana produksi pada tahun 2019 di sepuluh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020 bantuan diberikan hanya untuk 3 (Tiga) kabupaten/kota saja yaitu Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, dan Kota Makassar.

Lain halnya dengan petani yang bekerja sama dengan perusahaan pengolah talas beku maupun tepung talas, mereka dipilih oleh perusahaan melalui informasi yang diberikan dari BPP kabupaten dan PPL setempat. Pemilihan petani berdasarkan penilaian kecocokan lokasi dan lahan untuk mengembangkan talas satoimo. Petani diberi arahan dan sosialisasi tentang budidaya dan tatacara kontrak serta mekanisme pembeliannya setelah mengikuti petunjuk dan pedoman penanaman talas secara cermat dan seksama. Penanaman dilakukan setelah petani diberi bibit dan mendapat bimbingan serta pencatatan dari perusahaan. Kelompok tani yang menanam dan melakukan pencatatan serta mengikuti aturan atau pedoman yang diberikan oleh perusahaan akan dipantau, dibimbing dan diperhatikan

oleh perusahaan. Hasil pertanian akan dibeli oleh perusahaan dengan harga yang telah disepakati sesuai kontrak.

Situasi pengembangan talas satoimo di sektor hulu saat ini terlihat terjadi penurunan animo petani terhadap talas satoimo. Sebagian besar petani yang dulunya bekerja sama dengan perusahaan pengeksport talas dan menampung hasil produksi talas satoimo sudah tidak menanam lagi karena berbagai faktor antara lain yang paling menentukan adalah faktor pemasaran dan harga jual.

Untuk mulai menanam talas satoimo harus memperoleh bibit dan pupuk (organik) sesuai SOP perusahaan pengeksport. Pada praktiknya ada dua skema kerja sama yang terjadi yaitu, *pertama*, melakukan kontrak dengan perusahaan di mana petani mendapat bantuan bibit, pupuk dan pestisida sebagai pinjaman yang kemudian diperhitungkan pada saat panen. *Kedua* adalah skema mandiri yaitu pembiayaan oleh petani sendiri di mana seluruh kegiatan budidaya dari pengadaan bibit hingga panen ditanggung oleh petani.

Pengadaan bibit yang selama ini dilakukan adalah menanam bibit impor yang awalnya disediakan oleh perusahaan eksportir/Dinas TPH&P Provinsi Sulawesi Selatan. Namun setelah penanaman pertama, bibit tidak disediakan lagi, bibit selanjutnya disisihkan untuk penanaman berikutnya, petani menggunakan bibit sendiri dari anakan bibit sebelumnya. Demikian selanjutnya bibit yang ada di lapangan saat ini berupa bibit pengadaan petani sendiri berasal dari panen sebelumnya. Saat ini belum ada standarisasi dalam bentuk sertifikasi bibit talas satoimo. Petani hanya menerima atau membuat bibit secara mandiri, di mana tidak ada pihak atau lembaga yang menilai kelayakannya. Dari pengalaman petani, produksi talas satoimo mengalami penurunan jumlah produksi dan hasil yang juga makin kecil pada penanaman berikutnya.

Pupuk yang digunakan dalam bertanam talas satoimo lebih banyak menggunakan kompos pada awal penanaman dan selanjutnya juga menggunakan pupuk kimia seperti Urea dan TSP sehingga bertanam talas satoimo bisa digolongkan dalam upaya penanaman semi organik. Ada kecenderungan petani di lapangan mengurangi penggunaan kompos karena merasa kompos yang digunakan pada pertanaman sebelumnya masih cukup untuk pertanaman berikutnya.

Komoditas talas satoimo membutuhkan air yang cukup pada saat awal pertanaman dan membutuhkan kelembaban sehingga membutuhkan sumber air namun tidak membutuhkan pengairan yang intensif. Sumber air yang digunakan petani talas satoimo cukup beragam, ada yang menggunakan air sumur dalam dan ada juga yang mengandalkan air sungai yang diusahakannya secara mandiri.

Pestisida yang digunakan untuk mencegah serangan hama dan penyakit terutama ulat dan jamur, sedangkan penggunaan pestisida hanya dilakukan pada umur 3 (tiga) bulan dan jika diperlukan dan penggunaan pestisida terakhir pada usia dua bulan sebelum panen.

Talas satoimo dipanen dalam setahun hanya sekali saja, membutuhkan waktu 6-7 bulan. Pada beberapa lokasi dilakukan sistem tumpang sari untuk menunggu masa panen talas satoimo, dan setelah panen digantikan dengan komoditi hortikultura lainnya kemudian baru dilanjutkan dengan menanam kembali talas satoimo. Jumlah produksi panen dalam 1 ha bisa mencapai 100 ton berdasarkan pengalaman di Jepang, namun belum ada petani yang mampu mencapai jumlah ini, jumlah produksi tertinggi yang pernah dicapai baru 30 ton per ha, itupun pada panen pertama, sedangkan pada panen kedua dan seterusnya mengalami penurunan.

b. Penyuluh

Petugas penyuluh lapangan (PPL) pertanian talas satoimo merupakan penyuluh tanaman pangan umumnya yang perlu mendapat pengetahuan praktis tentang budidaya talas satoimo, namun penyuluh pada 5 lokasi kabupaten cenderung tidak mendapatkan pengetahuan tambahan tentang talas satoimo karena talas satoimo belum menjadi komoditi utama atau unggulan. Hal ini berdampak pada belum diberikannya pembimbingan tentang materi budidaya talas satoimo oleh penyuluh pertanian spesialis di daerah kecamatan lokasi untuk PPL tanaman pangan.

Pengetahuan PPL tentang talas satoimo diperoleh dari pembelajaran sendiri dan juga melihat kemajuan petaninya bertanam di wilayah penyuluhannya. Di lain pihak petani talas satoimo yang melakukan atau terikat kontrak dengan perusahaan mendapat pengawasan dan pembimbingan langsung dari perusahaan yang akan membeli hasil pertanaman talas dari petani atau kelompok tani.

Lain halnya dengan petani mandiri talas satoimo yang tidak terikat kontrak, umumnya mereka mau menanam karena pernah belajar atau melihat dari petani lain tentang keberhasilan tanaman talas satoimo. Ataukah mereka pernah menjalani kontrak tetapi karena situasi dan kondisi pandemi kontrak tidak diteruskan dan mereka menanam bibit yang sudah dimiliki dari pertanaman sebelumnya. Petani mandiri tidak mendapat pengawasan dan bimbingan serta tidak ada kepastian harga jual maupun pembeli dari pabrik pengolah talas satoimo.

4.4. Sektor Manufaktur

4.4.1 Aspek Ekonomi dan Lingkungan

Pada sektor manufaktur, terdapat dua jenis proses inti yang terjadi dalam rantai nilai talas di Sulawesi Selatan yaitu proses pembuatan tepung talas dan proses pembuatan talas beku (*frozen*). Kedua jenis proses inti ini tidak

hanya memiliki tahapan proses dan jenis peralatan yang berbeda, tetapi juga kualitas bahan baku yang digunakan berbeda. Output dari kedua jenis proses inti tersebut juga memiliki orientasi pasar yang berbeda.

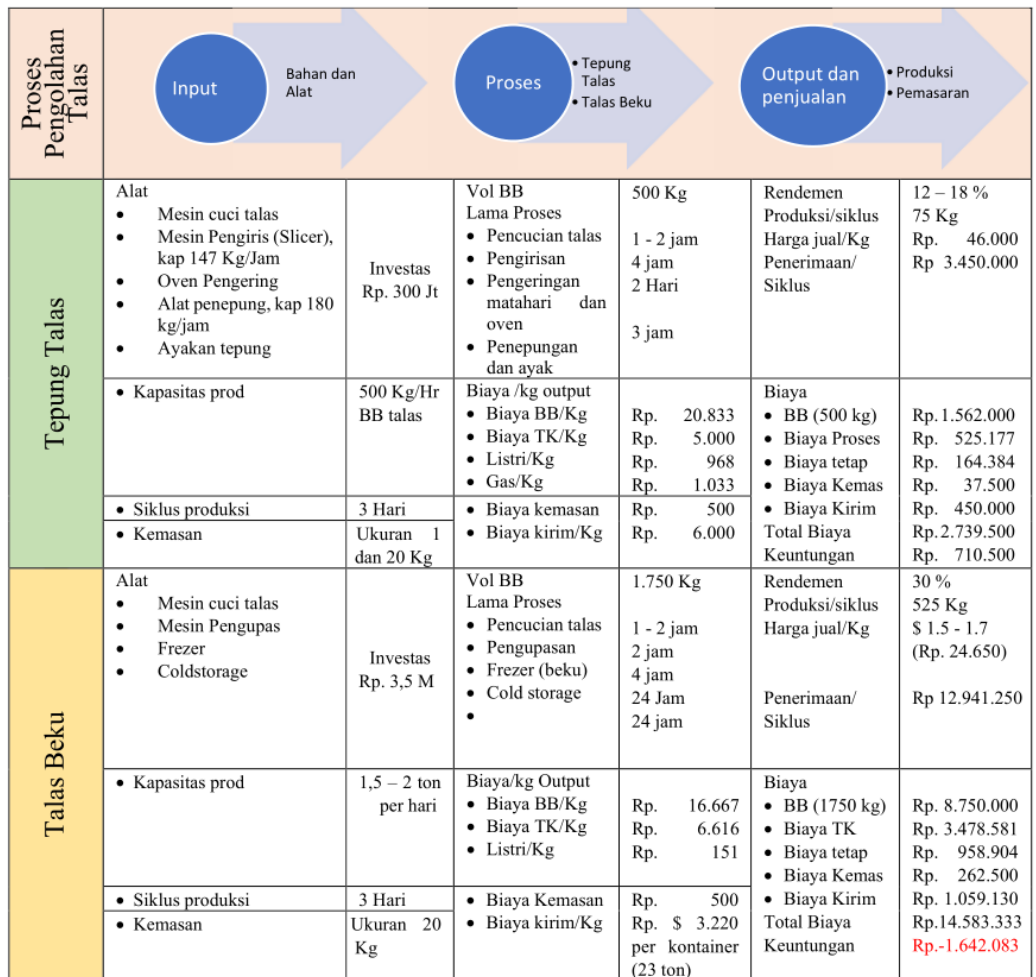
Tahapan proses dalam pembuatan talas beku lebih simpel namun *quality control*nya lebih ketat, karena harus memenuhi standar-standar pengolahan sesuai yang diinginkan oleh pihak *buyer*. Tahapan proses produksi talas beku terdiri dari pencucian, pengupasan selanjutnya dibekukan dalam freezer dan penyimpanan dalam *cold storage* serta proses glesier (pelapisan bongkahan es). Sedangkan proses pembuatan tepung talas, meski prosesnya melalui banyak tahapan, namun kualitas proses tidak dipersyaratkan oleh *buyer*. *Buyer* umumnya memerlukan hasil tepung talas yang lebih putih serta aroma khas dari talas. Aroma ini lebih disenangi *buyer* yang proses pengeringannya melalui matahari dibandingkan pengeringan seluruhnya menggunakan oven pengering.

Biaya investasi alat pada usaha pembuatan talas beku lebih besar, yakni berkisar Rp. 3,5 miliar, namun biaya proses produksinya lebih murah yakni sekitar Rp. 27.778 per kg talas beku, biaya tersebut sudah mencakup biaya tetap dari penyusutan alat dan mesin. Sedangkan biaya investasi pada pabrik talas tepung sebesar Rp. 300 juta dengan biaya produksi sekitar 34.335 per kg tepung talas.

Siklus produksi kedua pabrik tersebut sama yakni masing-masing 3 hari. Kapasitas produksi talas tepung adalah sebesar 500 kg bahan baku per hari, sedangkan pabrik talas beku sebesar rata-rata 1.750 kg bahan baku talas. Pada tingkat kapasitas produksinya pabrik tepung talas memperoleh keuntungan sebesar Rp. 710.500 per siklus (Rp 9.475 per kg tepung talas) dengan margin keuntungan 25.94 persen. Sedangkan pabrik talas beku memiliki kerugian sekitar Rp. 1.642.083 per siklus atau rugi sekitar Rp. 3.128 per kg talas beku. Sumber utama kerugian pabrik talas beku ini berasal dari

harga bahan baku talas yang relatif tinggi yakni sebesar Rp. 5.000 per kg, Namun menurut pengelola pabrik, bahwa hal tersebut sengaja dilakukan sebagai langkah awal untuk menarik minat petani menanam talas, dalam jangka panjang ketika produktivitas petani dapat dilipatgandakan, harga talas dapat diturunkan hingga sekitar Rp. 3.500 per kg. Harga tersebut merupakan harga yang layak bagi petani dan perusahaan talas beku. Kerugian yang dialami saat ini oleh pabrik talas beku tidak ditanggung oleh perusahaan talas beku, tetapi oleh mitranya yakni perusahaan importir (Japan-Indonesia Trading).

Gambar 4.6.
Proses Produksi Talas Satoimo



Sumber: Data Primer, 2021

4.4.2. Aspek Kelembagaan

Pada sektor manufaktur terlihat bahwa *quality control* menjadi ikatan antara petani dengan pihak perusahaan. Produsen talas *frozen* yaitu PT. Sangkara Mata Agriculture mempunyai persyaratan teknik yaitu tanaman talas tidak boleh disemprot pestisida dua bulan sebelum panen, ukuran, warna, rasa,

tekstur, residu pestisida, standar mikro (batas kandungan mikroorganisme), biasanya produk *diblanching* ulang untuk menghilangkan mikroorganisme. Pengujian dilakukan dengan uji sensory untuk mengetahui rasa, warna dan akan menghasilkan skor. Uji skoring dilakukan tiap hari pada setiap petani produsen.

Sementara pada PT. Satoimo Sulawesi Sukses, tanaman talas tidak boleh disemprot pestisida 2 bulan sebelum panen dan mengikuti petunjuk teknis yang telah dibagikan oleh perusahaan yang melakukan impor dari Indonesia melalui PT. Satoimo Sulawesi Sukses dan PT. Tridanawa Perkasa Indonesia yang melakukan ekspor talas beku (*frozen taro*).

4.4.3 Aspek Pemberdayaan

Pada sektor manufaktur terdapat usaha dari pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan dalam proses pembuatan tepung talas berupa pabrik penepung talas yang ditempatkan di Kabupaten Soppeng. Namun demikian pada saat laporan ini dibuat, pabrik tersebut belum beroperasi karena masih belum dilengkapi dengan aliran listrik yang memadai. Sementara itu, pemberdayaan berupa pelatihan dan pendampingan yang terjadi di perusahaan bersifat internal untuk keperluan perusahaan.

4.4.4. Aspek Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial

Di sektor manufaktur, ketidakadilan gender yang terjadi adalah diskriminasi dalam hal perbedaan upah. Pada PT. Satoimo Sulawesi Sukses yang mengolah talas menjadi tepung talas menyatakan bahwa jumlah buruh harian saat ini sebanyak 6 orang terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan. Upah yang diberikan kepada laki-laki sebesar Rp. 85.000 dan perempuan sebesar Rp. 75.000. Menurutnya, perbedaan upah ini dinilai berdasarkan jenis pekerjaan dimana laki-laki bekerja mulai dari penerimaan talas, mengolah dan

mengeringkan. Sedangkan perempuan melakukan pekerjaan mencuci, mengupas, mengayak dan melakukan pengemasan (*packing*) tepung yang dinilai membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian.

Selain pekerja sebagai buruh harian, perusahaan juga memiliki pekerja tetap, yang sebelum pandemi 9 orang dan saat ini berjumlah 2 orang saja. Jumlah pekerja tetap sebelum pandemi, dari 9 pekerja tetap terdapat 4 perempuan dan laki-laki. Namun saat ini, pekerja tetap sisa 2 laki-laki dan tidak ada lagi perempuan.

Upah pekerja tetap diberikan sama besarnya kepada laki-laki dan perempuan sebesar 3,2 juta rupiah dengan 7 jam kerja per hari. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 adalah Rp 3.165.876 per bulan berlaku mulai 1 Januari 2021.

4.4.5. Aspek Kebijakan

4.4.5.1 Perluasan usaha Talas Jepang Satoimo untuk memenuhi kebutuhan pabrik

Pemerintah Sulawesi Selatan berupaya untuk meningkatkan volume ekspor talas satoimo melalui strategi kebijakan menambah luas areal tanam talas satoimo di 10 Kabupaten yaitu Kabupaten Gowa, Soppeng, Maros, Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Bone, Jeneponto, Takalar, dan Wajo dengan total luasan 178 ha (DKP&H, 2019).

Sementara itu konsep perdagangan melalui ekspor talas dari Sulsel ke Jepang diperankan oleh beberapa pihak, dan saling bekerja sama, baik itu instansi pemerintah, petani, maupun importir dari negara tujuan dan eksportirnya.

Kebijakan lainnya adalah di Provinsi Sulawesi Selatan sudah mengizinkan pendirian operasi pabrik pengolah umbi talas menjadi talas beku (*frozen taro*) satoimo dan tepung talas yang dimiliki oleh:

1. PT. Tridanawa Perkasa Indonesia (TPI) merupakan eksportir sejak Tahun 2015; sampai sekarang
2. PT. Satoimo Sulawesi Sukses. Tahun 2018. Menghasilkan produk berupa tepung talas.
3. PT. Global Seafood Tahun Tahun 2019. Perusahaan yang aktif memproduksi frozen taro pada awalnya namun sekarang tidak aktif lagi.
4. PT. Sangkara Mata Agriculture Indonesia. Tahun 2020 (*frozen taro*, belum pernah ekspor).

Pada awal tahun 2020, PT. Sangkara Mata Agriculture Indonesia, berlokasi di Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, memproduksi talas beku (*frozen*) dengan kapasitas produksi 1,5-2 ton per hari dan kapasitas penuh produksi sampai 4 ton per hari. Adapun sasaran pemasarannya adalah untuk ekspor ke Jepang namun karena pandemi covid-19 maka ekspor ke Jepang belum dibuka kembali, sehingga PT Sangkara Mata Agriculture sedang mengupayakan dan menyiapkan pengiriman/ekspor ke Jepang.

Sementara ini hasil panen di tingkat petani yang selama ini telah terjalin dalam kontrak maupun petani mandiri masih berorientasi pada penjualan kepada perusahaan eksportir. Hasil produksi yang berasal dari sebelah utara Kota Makassar yaitu Kabupaten Soppeng dan Pinrang dipasarkan ke PT. Satoimo Sulawesi Sukses yang berlokasi di Kawasan Industri Makassar (KIMA) sedang hasil produksi talas satoimo yang berasal dari daerah selatan Makassar yaitu Kabupaten Sinjai, Bantaeng, dan Jeneponto dipasarkan ke perusahaan di Kabupaten Bantaeng.

Pemasaran talas satoimo belum mempunyai pasar lain selain di dua perusahaan tersebut, dan petani belum mendapat pelatihan untuk melakukan

diversifikasi produk atau pengolah pasca panen apabila produksi talas satoimo mereka tidak masuk grade ekspor maupun tidak terbeli karena adanya pandemi.

Bagi produksi talas satoimo petani yang tidak dapat dibeli karena tidak memenuhi kriteria hasil, maka perusahaan menetapkan standar yang berbeda dimana pada Kabupaten Sinjai perusahaan tetap melakukan pembelian semua produknya sedang pada beberapa daerah lainnya seperti di Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto perusahaan tidak membeli. Adapun bagian talas yang tidak mencapai kriteria ekspor bisa diolah menjadi *frozen* satoimo, diolah menjadi produk lainnya seperti taro pasta/satoimo pasta dan satoimo *flour*/tepung satoimo, namun kapasitas perusahaan tidak berjalan maksimal pada saat pandemi sehingga belum membutuhkan banyak produksi talas dari petani.

Di pihak pemerintah, terlihat belum adanya integrasi antar OPD yang dapat diindikasikan dengan belum adanya intervensi Dinas Perindustrian untuk meningkatkan kapasitas petani atau keluarganya untuk dilatih membuat diversifikasi produk olahan menjadi keripik, tepung talas, pakan ternak, atau produk lainnya dengan skala produksi rumah tangga.

4.5 Sektor Hilir

4.5.1 Aspek Ekonomi dan Lingkungan Hidup

Pelaku sektor hilir dalam rantai nilai talas satoimo Sulawesi Selatan semuanya berada di luar wilayah. Produksi tepung talas dipasarkan secara domestik dengan pasar utama pada retail yang berada di Kota Bandung dan Jakarta. Retail umumnya untuk kebutuhan industri obat di kedua wilayah tersebut serta memasok beberapa supermarket/swalayan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, khususnya warga asing, terutama warga Jepang yang ada di kedua wilayah. Sedangkan produksi talas beku diekspor ke Jepang

dengan mitra Japan-Indonesia Trading (JIT) sebagai mitra impor. JIT selanjutnya memasok kebutuhan berbagai retail di Jepang untuk didistribusikan ke berbagai konsumen, baik konsumen industri maupun konsumen rumah tangga.

Permintaan tepung talas satoimo Sulawesi Selatan dalam pasar domestik cukup besar. Pihak PT. Satoimo Sulawesi Sukses sebagai produsen tepung talas menyebutkan bahwa sebelum era pandemi, perusahaan kewalahan memenuhi permintaan tepung talas dari mitranya di Bandung dan Jakarta dengan volume permintaan sekitar 500-700 kg tepung talas per bulan. Hanya saja permintaan di era pandemi menurun tajam, karena banyak industri dan swalayan ditutup di era pandemi di Bandung dan Jakarta.

Ekspor talas Jepang dari Sulawesi Selatan, terakhir pada bulan Maret 2021 dengan volume ekspor sebesar 21.480 kg, kegiatan ekspor ini dilakukan oleh PT. Tridanawa Perkasa yang bermitra dengan JIT sebagai agen importir. Saat ini PT. Tridanawa Perkasa tidak lagi bergerak di bidang ekspor talas. Perusahaan yang saat ini masih bertahan dalam ekspor talas ke Jepang tinggal satu yakni PT Sangkara Mata Agriculture. Perusahaan ini memiliki petani di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Bantaeng, Sinjai, Jeneponto dan Gowa. Namun perusahaan ini belum bisa melakukan ekspor karena covid-19. PT. Sangkara Mata Agriculture saat ini memiliki stok talas beku sekitar 60 ton yang belum dikirim.

Produk talas beku satoimo Sulawesi Selatan yang di ekspor ke Jepang tergolong kualitas sedang dengan pesaing utama China sebagai pemasok utama talas ke Jepang. Pada tahun 2020 jumlah impor talas satoimo ke Jepang mencapai 26,7 juta ton, di mana sekitar 99 persen diimpor dari China. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa potensi pasar talas di Jepang sangat besar dan hal tersebut merupakan peluang pasar yang sangat bagus.

Tab 4.12.
Impor Negara Jepang Terhadap Komoditas Talas Satoimo (HS 071440),
Taro (*Colocasia* spp.) dari Berbagai Negara, Tahun 2020

Negara Ekspor	Nilai (\$)	Qty (Kg)	Harga/Kg (\$)
China	45.456.201	26.661.970	1,70
Indonesia	12.869	10.000	1,29
Viet Nam	28.324	16.490	1,72
Thailand	4.776	1.185	4,03
USA	40.163	2.993	13,42
Other Asia, nes	33.991	6.130	5,55
Total	45.576.324	26.698.768	1,71

Sumber : comtrade.un.org, diolah, 2021

4.5.2 Kelembagaan

Pada sektor hilir hubungan antara pelaku rantai nilai terjadi karena kebutuhan bisnis dengan didasari oleh pertimbangan profit. Dengan demikian hubungan tersebut lebih mengarah pada legal formal untuk menjamin posisi dan kedudukan masing-masing pelaku dalam kepentingan bisnis di hadapan hukum.

4.5.3 Aspek Pemberdayaan

Peran pelaku pada sektor hilir melihat pemberdayaan dalam konteks menjamin produksi talas satoimo dapat terserap di pasar. Pada sektor hilir terdapat dua komponen pelaku utama yang terlibat dalam pengembangan talas satoimo yaitu komponen pemasaran ekspor dan komponen pemasaran lokal. Pada komponen pemasaran ekspor terdapat penghubung importir (Japan

International Trading) dan perusahaan talas beku, sementara komponen pasar lokal yaitu pabrik tepung talas. Kedua komponen ini secara bersama-sama memainkan peran sebagai pemasar hasil produksi petani. Dalam prakteknya, pada awal pengembangan talas satoimo perusahaan memberikan jaminan pemasaran dalam bentuk kontrak penanaman dan membeli hasil panen petani, namun setelah itu pembelian produk talas satoimo dilakukan secara ketat berdasarkan standar perusahaan. Kondisi yang ada memperlihatkan bahwa pengembangan talas satoimo di sektor hilir memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada dua pelaku ini. Hal ini dikarenakan tujuan pemasaran talas satoimo hanya ditentukan dan terserap melalui para pelaku ini dan tidak terdapat alur pemasaran melalui mekanisme pasar yang lebih terbuka karena terbatasnya pelaku sehingga ada kecenderungan terjadinya monopoli dalam penentuan harga dan pemasaran. Hal ini ditunjang dengan tidak adanya diversifikasi produk pasca produksi sehingga petani semata-mata tergantung pada penjualan talas satoimo yang belum diolah. Berikut tabel bentuk pemberdayaan pada sektor hilir.

Tabel 4.13.
Bentuk Pemberdayaan pada Sektor Hilir

Sektor	Bentuk Pemberdayaan	Pelaku	Keterangan
Hilir	Penghubung importir	JI Trading	Menjamin mutu produksi sesuai syarat ekspor
	Exportir (Kontrak)	PT. Tridanawa Perkasa Indonesia, PT. Satoimo Sulawesi Sukses	Jaminan pemasaran awal

Sumber : Data Primer, 2021

4.5.4. Aspek Kebijakan

4.5.4.1 Ekspor Talas Jepang Satoimo

Pada saat ini peluang ekspor talas satoimo baru terbuka ke Jepang, namun demikian untuk memenuhi kuota ekspor Jepang belum dapat dipenuhi sehingga menjadi kesempatan bagi petani di Sulawesi Selatan untuk berproduksi bagi pasar ekspor sesuai standar negara tujuan. Tantangan yang dihadapi adalah diversifikasi pasar bagi talas harus bervariasi tidak saja dalam bentuk talas beku tetapi perlu variasi lain agar semua produksi bisa bermanfaat dan diterima sebagai komoditas ekspor.

Kelemahan yang ditemukan adalah kurangnya pedagang pengumpul talas satoimo yang membeli dari petani dan mendistribusikan ke pabrik. Dengan demikian kekuatan pabrik/pengekspor sangat besar untuk memutuskan membeli atau tidak membeli talas. Akibatnya jika terjadi *force major* karena adanya pandemi seperti sekarang ini banyak hasil panen yang tidak terbeli karena kegiatan ekspor terhenti. Hal ini mengakibatkan kemampuan pabrik untuk membeli juga berkurang dan pasar ikut terhenti. Kelemahan lain adalah petani sangat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap operasi pabrik sedangkan talas akan menurun kualitasnya jika disimpan lama.

Di luar peluang ekspor, pasar lokal dan dalam negeri belum dikenalkan untuk bisa menerima jenis talas satoimo. Perlu ada upaya pengenalan produk talas di dalam negeri dengan mengenalkan manfaatnya. Pengenalan produk ini dapat diusahakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau dengan Dinas Koperasi UMKM dengan mengembangkan pemanfaatan produk ini menjadi tepung, keripik, pakan ternak, dan produk lainnya.

4.5.4.2 Komitmen ekspor dan keterkaitan industri talas

Talas yang akan di ekspor ke Jepang harus memenuhi persyaratan batas maksimum residu pestisida, bebas dari kontaminasi bakteri, memiliki tekstur, rasa, penampilan, warna dan ukuran sesuai permintaan pembeli. Negara tujuan ekspor sangat memperhatikan *food safety* (keamanan pangan) disamping *food quality* (mutu pangan) sehingga *traceability* (ketertelusuran)

untuk setiap pangan menjadi sebuah persyaratan yang harus dipenuhi. (DTP&H, 2019)

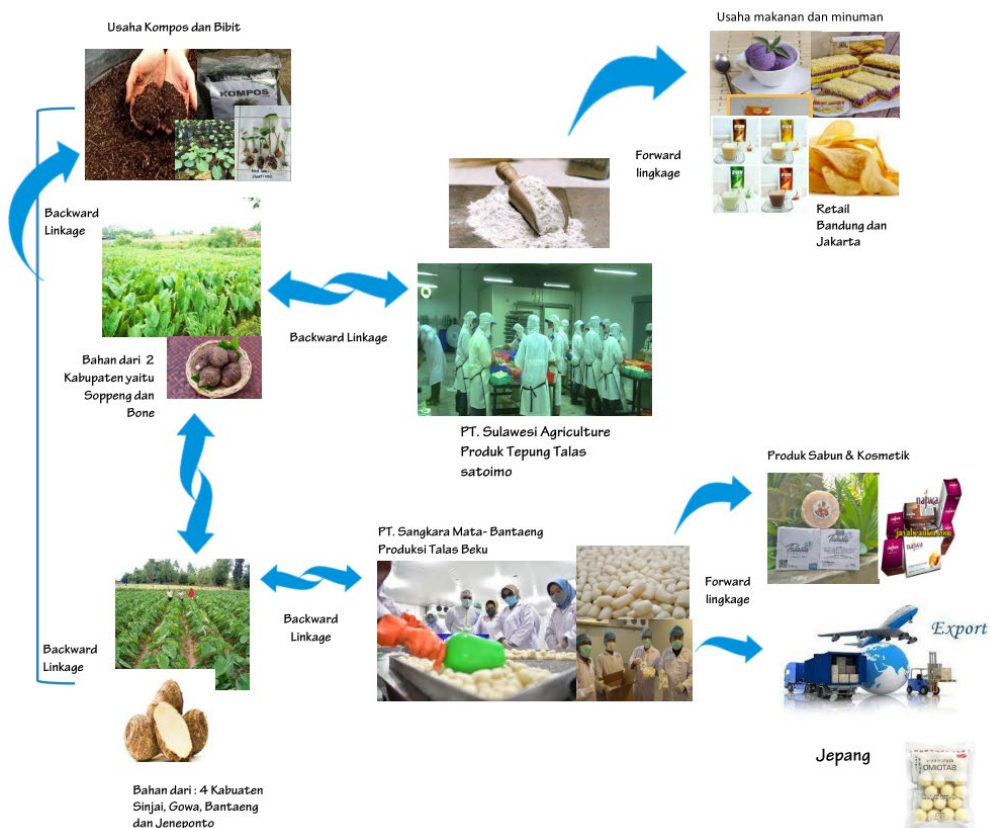
Persyaratan ekspor tersebut harus menerapkan *Standar Operasional Prosedure (SOP)* berupa pencatatan kegiatan budidaya mulai dari pembibitan hingga panen atau Pedoman Budidaya Talas satoimo negara tujuan yang dimulai dari tingkat petani talas, budidaya, hingga panen dan produksi bahan olahan siap ekspor. Untuk memantau SOP itu maka Pemerintah Sulawesi Selatan pun membentuk tim pendamping. Tim pendamping terdiri atas unsur Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, importir (Jepang-Indonesia Trading) di Indonesia, Unit Pengolahan Tepung talas di Makassar dan Perguruan Tinggi. Pemerintah Sulawesi Selatan menggandeng PT. Tridanawa Perkasa Indonesia (PT. TPI) yang mengolah talas menjadi talas beku dari Makassar untuk siap ekspor. PT TPI berhasil mengirimkan 18 Ton *frozen taro* ke Jepang pada tahun 2015 kemudian dilanjutkan oleh PT. Global Seafood dan PT. Sangkara Mata Agriculture yang pada tahun 2019 berhasil mengekspor 50 ton talas beku ke Jepang.

Dari gambaran berikut dapat dilihat *forward linkage* dan *backward linkage* industri talas di Makassar dan Bantaeng. Perusahaan pengolah tepung talas (PT. Satoimo Sulawesi Sukses) mempunyai keterkaitan dengan retail di Bandung dan Jakarta yang mengolah tepung talas menjadi makanan dan minuman serta dijual pada supermarket yang banyak dikunjungi oleh orang Jepang di Jakarta dan Bandung. Perusahaan ini menjalin hubungan baik dengan petani di Kabupaten Soppeng dan Bone untuk mendapatkan bahan baku menjadi tepung talas. Agar talas dapat bertumbuh dan menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai standar perusahaan maka dibutuhkan bibit dan pupuk dari produsen kompos dan pembibitan.

Keterkaitan belakang (*backward linkage*) perusahaan talas beku oleh PT. Sangkara Mata Agriculture di Bantaeng yaitu dengan memperoleh *supply*

bahan bakunya dari 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Sinjai, Bantaeng, Jeneponto dan Gowa. Upaya budidaya ini bisa menggerakkan industri lainnya untuk menghasilkan pupuk dan bibit berkualitas. Sedang keterkaitan kedepan (*forward linkage*) dilakukan dengan mengeksport talas beku (*frozen taro*) ke Jepang. Industri ini juga dapat menggerakkan industri lainnya berupa industri kosmetik, dan makanan minuman sehat sebagai sumber collagen dan anti aging yang saat ini masih dikuasai Malaysia dan Singapura.

Gambar 4.7.
Keterkaitan Industri dalam Rantai Nilai Talas Satoimo



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Pelaku utama disektor hulu adalah petani talas, kolektor dan kordinator petani. Terdapat 72 petani talas yang mendapatkan bantuan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tersebar di 10 Kabupaten, namun tersisa 2 orang petani talas yang masih membudidayakan talas sampai saat ini. Semua petani aktif talas saat ini adalah mitra perusahaan yang berjumlah 50 orang yang tersebar di 5 kabupaten. Untuk sektor manufaktur pelaku utamanya terdiri dari 5 perusahaan, namun yang bertahan sampai saat ini hanya 2 perusahaan yakni PT. Satoimo Sulawesi Sukses dengan produk utama tepung talas, dan PT Sangkara Mata Agriculture yang menghasilkan *frozen taro*. Seluruh pelaku di sektor manufaktur juga adalah pelaku utama di sektor hilir termasuk retail domestik tepung talas (Jakarta dan Bandung) dan Japan Indonesia Trading (JIT) selaku importir. Selain pelaku utama tersebut juga ada pelaku pendukung yakni, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, tenaga ahli importir, tenaga pendamping lapangan, Dinas Perdagangan dan Balai Besar Karantina Pertanian.
2. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif menghasilkan talas satoimo (*Colocasia esculenta var antiquorum*) karena satu-satunya daerah yang memiliki varietas ini. Talas

dipasarkan dalam bentuk tepung secara domestik dan dalam bentuk *frozen taro* yang diekspor ke Jepang. Peluang pengembangan produksinya masih terbuka karena merupakan komoditas unggulan yang mendapat dukungan kebijakan, disamping itu peluang pasar untuk ekspor ke Jepang masih sangat besar yakni rata-rata kebutuhan 26.699 ton per tahun.

3. Inisiasi pengembangan talas satoimo oleh pemerintah merupakan triger berkembangnya komoditas ini di Sulawesi Selatan yang berorientasi ekspor. Namun implementasi kebijakan berupa pemberian bantuan yang kurang sesuai dengan waktu tanam dan ketidaksesuaian teknis budi daya dengan persyaratan budi daya talas untuk kebutuhan ekspor. Faktor lain yang berpengaruh negatif yakni terjadinya pandemi covid-19 yang berdampak pada menurunnya permintaan pasar domestik dan ekspor.
4. Berbagai isu-isu yang memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan dalam pengembangan talas satoimo adalah sebagai berikut :
 - a. Produksi dan produktivitas masih rendah hanya sekitar 19,93 ton/ha dari seharusnya 40 ton/ha.
 - b. Masih terdapat 13-20% produk tidak dapat dijual di Kabupaten Soppeng dan Bantaeng karena di bawah standar dan atau busuk.
 - c. Sebagian besar petani berhenti berproduksi karena perusahaan mitra kesulitan menjual produk di era pandemi.
 - d. Kawasan pertanaman yang berada di area dataran tinggi dengan kemiringan lerengnya $> 30 \%$, dimana terdapat 26 responden pada ketinggian di atas 700 m (Kabupaten Sinjai)

- e. Di Kabupaten Soppeng 50 % responden menanam talas di sawah yang berpotensi mengganggu pencapaian produksi pangan berbasis padi. Di kabupaten lainnya talas satoimo dibudidayakan di kebun atau tegalan.
- f. Masih ada petani (4 %) yang menggunakan pestisida pada saat 2 bulan sebelum panen di Kabupaten Jeneponto.
- g. Pembinaan petani tidak dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten secara terus menerus, sebaliknya pembinaan yang lebih intensif dilakukan dari perusahaan.
- h. Tidak ada pembinaan pengolahan pasca panen khususnya produksi yang tidak masuk standar ekspor untuk menjadi produk turunan talas satoimo.
- i. Akibat pandemi covid-19 perusahaan tidak melakukan proses produksi sehingga proses budi daya terhenti dan kontrak tidak dilanjutkan.
- j. Tidak ada kelompok tani khusus talas satoimo, kelompok tani yang ada adalah kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura.
- k. PPL belum dapat memberikan penyuluhan budidaya talas satoimo yang baik karena tidak ada koordinasi serta penugasan dari dinas yang mengurus pertanian di kabupaten dan provinsi.
- l. Adanya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan.
- m. Partisipasi peran perempuan sebagai pekerja dalam budi daya talas satoimo dominan, namun peran sebagai manajer tidak ditemukan.

- n. Perencanaan di Provinsi tidak berlanjut/ tidak dijabarkan oleh pemda kabupaten dan dinas yang mengurus pertanian di kabupaten melalui RPJMD dan Renstranya.
- o. Penganggaran di kabupaten terhalang karena tidak adanya tautan pada dokumen perencanaan.
- p. Petani yang mendapat bantuan pemerintah dari dinas TPH&P Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 sebanyak 72 orang, 96% diantaranya gagal dan hanya 2 orang yang berlanjut mengelola talas.

5.2. Saran

1. Peluang pemerintah untuk terlibat dalam pemberdayaan masyarakat adalah pada sektor manufaktur yang memanfaatkan produk yang tidak diterima perusahaan menjadi produk yang dapat menambah penghasilan petani.
2. Perlunya pengadaan bibit unggul Talas Satoimo yang bersertifikasi yang dapat diperbanyak dengan teknik kultur jaringan atau teknik lainnya sehingga bibit yang beredar di petani adalah bibit yang kualitasnya terstandar.
3. Perlunya pengembangan hasil pertanian talas untuk kebutuhan pangan alternatif, bahan baku kosmetik, makanan ringan dan produk lainnya yang bisa dikembangkan lewat industri rumah tangga.
4. Petani perlu mendapat pendampingan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan talas agar tidak merugikan pada saat panen, dan produksinya dapat terbeli sesuai kesepakatan.

5. Perlunya mengintegrasikan isu gender dan sosial inklusi dalam kebijakan daerah dan sektoral untuk mengakomodir peran perempuan secara setara dengan laki-laki dalam sektor pertanian talas. Pengintegrasian ini mencakup penyediaan data terpilah berdasarkan gender, usia dan status dalam keluarga serta pengorganisasian dan pemberdayaan petani perempuan untuk membuka akses dan manfaat yang sama terhadap penguatan kapasitas, akses layanan, bantuan dan hal lainnya yang disediakan pemerintah dan pihak lain.

5.3. Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah tidak perlu melanjutkan pemberian bantuan pada petani dalam bentuk bibit dan saprodi, tetapi bantuan peralatan usaha tani seperti alat pengolahan, alat panen, dan pompa air yang masih sangat dibutuhkan.
2. Perlu dikembangkan sosialisasi dan desiminasi terkait manfaat talas bagi kesehatan dan diversifikasi produk olahan berbasis talas satoimo.
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menginisiasi penelitian secara berkelanjutan terkait pemuliaan bibit tanaman talas satoimo untuk mendapatkan bibit tanaman unggul dan adaptif sesuai dengan kondisi lokasi setempat.
4. Perencanaan di provinsi oleh Bappelitbangda perlu diadvokasi agar pengembangan talas satoimo dapat diteruskan hingga kabupaten dan tercantum dalam Renstra dan Renja dinas terkait agar program

yang ditetapkan dapat terlaksana dan mencapai sasaran sesuai rencana.

5. Perlu pemberdayaan masyarakat terhadap pengolahan hasil produk UMKM oleh dinas terkait tingkat provinsi dan kabupaten.

Untuk lebih jelasnya, rekomendasi kebijakan dapat dilihat pada Tabel Rekomendasi Kebijakan.

Tabel 5.1.
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Talas Satoimo di Provinsi Sulawesi Selatan

No	ISU	TUJUAN	STRATEGI INTERVENSI	PROGRAM	PIHAK TERKAIT	LOKASI	JANGKA WAKTU	LEVEL	
I	UMUM								
	1. Tanaman talas satoimo merupakan introduksi, bukan berasal dari tanaman lokal sehingga perlu persiapan masyarakat secara sosial ekonomi	Memperkenalkan talas satoimo kepada masyarakat	Pemanfaatan media sosial, diversifikasi pangan	Sosialisasi, pameran dan demonstrasi	Dinas KPH&P Provinsi Sulsel	Semua Kabupaten	2022	Kabupaten	
	2. Perencanaan di provinsi tidak berlanjut/tidak dijabarkan oleh pemerintah kabupaten dan dinas pertanian kabupaten melalui RPJMD dan Renstra.	Terjadinya kontinuitas keterkaitan perencanaan dari provinsi, kabupaten, dan instansi terkait.	Melakukan advokasi perencanaan antar provinsi dan kabupaten untuk pengembangan talas satoimo di Sulsel	Pengembangan/ Peningkatan talas satoimo	Dinas KPH&P Provinsi Sulsel	Semua Lokasi	2022-2024	Provinsi dan Kabupaten	

No		ISU	TUJUAN	STRATEGI INTERVENSI	PROGRAM	PIHAK TERKAIT	LOKASI	JANGKA WAKTU	LEVEL
		3. Penganggaran di kabupaten terhalang karena tidak adanya rujukan pada dokumen perencanaan.	Memasukkan program/kegiatan pengembangan talas	Mengevaluasi dan menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pengembangan talas	Pengembangan/ Peningkatan talas satoimo	Dinas KPH&P Provinsi Sulsel	Semua Lokasi	2022-2024	Provinsi dan Kabupaten
II		SEKTOR HULU							
	a.	Aspek Ekonomi							
		1. Produksi dan produktivitas masih rendah hanya sekitar 19,93 ton/ha dari seharusnya 40 ton/Ha.	Meningkatkan produksi dan produktivitas	Perbaikan bibit	Pengadaan bibit unggul F1	Dinas KPH&P Provinsi Sulsel	Provinsi	2022-2024	Provinsi
				Peningkatan keterampilan petani	Program penyuluhan		Lokasi mitra perusahaan		Provinsi & Kabupaten
					Penyediaan alsintan		pengembangan prasarana budidaya talas (penyediaan pompa/ kultivator)	Lokasi mitra perusahaan (Sinjai, Bantaeng, Jenepono dan Soppeng)	Kabupaten

No	ISU	TUJUAN	STRATEGI INTERVENSI	PROGRAM	PIHAK TERKAIT	LOKASI	JANGKA WAKTU	LEVEL
	2. Masih terdapat 13-20% produk tidak dapat dijual di Kabupaten Soppeng dan Bantaeng karena di bawah standar dan atau busuk.	Meningkatkan kemanfaatan produksi talas yang berada di bawah standar	Mengembangkan industri pengolahan oleh masyarakat	Program diversifikasi produk dan pelatihan pengolahan berbahan baku talas	Dinas Perindustrian	Semua kabupaten	2022-2024	Provinsi & Kabupaten
	3. Sebagian besar petani berhenti berproduksi karena perusahaan mitra kesulitan menjual produk di era pandemi	Penciptaan pasar baru	Mengembangkan industri pengolahan oleh masyarakat	Mengaktifkan bantuan alat pengolahan tepung talas yang mangkrak di Soppeng	Dinas KPH&P Provinsi Sulsel	Kab. Soppeng	2022-2024	Provinsi
	b. Lingkungan							
	1. Kawasan pertanian yang berada di area dataran tinggi yang kemiringan lerengnya > 30 %, di mana terdapat 26 responden pada ketinggian di atas 700 m (Kab. Sinjai)	Membatasi lokasi pertanian > 45%	Meningkatkan kesesuaian lokasi dan tidak merugikan lingkungan.	Seleksi lokasi pertanian yang lebih sesuai.	Dinas TPH&P Provinsi Sulsel, Dinas Kehutanan	Semua lokasi	2022-2024	Provinsi dan Kabupaten

No		ISU	TUJUAN	STRATEGI INTERVENSI	PROGRAM	PIHAK TERKAIT	LOKASI	JANGKA WAKTU	LEVEL
		2. Di Kabupaten Soppeng 50 % responden menanam talas di sawah yang berpotensi mengganggu pencapaian produksi pangan berbasis padi. Di Kabupaten lainnya talas satoimo dibudidayakan di kebun atau tegalan.	Optimalisasi lahan non sawah untuk talas	Optimalisasi lahan budidaya talas di lahan kebun dan tegalan	Optimalisasi lahan kebun dan tegalah	Dinas TPH&P Provinsi Sulsel	Semua lokasi	2022-2024	Provinsi dan Kabupaten
		3. Masih ada petani (4%) yang menggunakan pestisida pada saat 2 bulan sebelum panen di Kabupaten Jeneponto	Produksi talas sehat	Penerapan sistem pertanian sesuai anjuran	Peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani tentang sistem budidaya yang tepat.	Dinas TPH&P Provinsi Sulsel	Semua lokasi	2022-2024	Provinsi dan Kabupaten
	c.	Aspek Pemberdayaan Masyarakat							
		Pembinaan petani tidak dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten,	Peningkatan kapasitas petani untuk budidaya talas	Pembinaan dan bimbingan petani oleh dinas terkait	Peningkatan keterampilan dan pengetahuan	Dinas TPH&P Provinsi Sulsel/ Dinas Pertanian Kabupaten	Semua lokasi	2022-2024	Provinsi dan Kabupaten

No		ISU	TUJUAN	STRATEGI INTERVENSI	PROGRAM	PIHAK TERKAIT	LOKASI	JANGKA WAKTU	LEVEL
		secara terus menerus, pembinaan yang lebih intensif dilakukan dari perusahaan.			petani tentang sistem budidaya yang tepat.				
	d.	Aspek Kelembagaan							
		1. Akibat pandemi covid 19 perusahaan tidak melakukan proses produksi sehingga proses budi daya terhenti dan kontrak tidak dilanjutkan.	Meningkatkan posisi tawar petani	Pengawasan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menegakkan perjanjian/kontrak	Advokasi dan Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Provinsi Sulsel dan Bagian Hukum kabupaten	Semua lokasi	2022-2024	Provinsi dan Kabupaten
		2. Tidak ada kelompok tani khusus talas satoimo, kelompok tani yang adalah Kel. Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Memperkuat kerja sama antara petani talas satoimo	Koperasi	Bantuan alsintan dan modal basis kelompok	Dinas TPH&P Prov. Sulsel dan Dinas Pertanian Kabupaten	Semua lokasi	2022-2024	Provinsi dan Kabupaten
		3. PPL belum dapat memberikan penyuluhan budidaya talas satoimo yang baik karena tidak ada	Memperkuat PPL dalam budidaya talas satoimo	Peningkatan kapasitas PPL	Diklat Penyuluhan	Dinas TPH&P Prov. Sulsel, Dinas Pertanian Kabupaten	Semua lokasi		

No		ISU	TUJUAN	STRATEGI INTERVENSI	PROGRAM	PIHAK TERKAIT	LOKASI	JANGKA WAKTU	LEVEL
		koordinasi serta penugasan dari Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi							
	e.	Aspek Gesi							
		Diskriminasi upah antara laki-laki dan perempuan	Memperkuat akses ekonomi perempuan	Advokasi	Peningkatan kapasitas perempuan	Dinas TPH&P Prov. Sulsel, DP3ADalduk&KB, NGOs / kabupaten	Semua lokasi	2022-2024	Kabupaten
		Partisipasi peran perempuan sebagai pekerja dalam budi daya talas satoimo dominan, namun peran sebagai manajer tidak ditemukan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam usaha tani talas satoimo	Advokasi	Peningkatan kapasitas perempuan	Dinas TPH&P Prov. Sulsel, DP3ADalduk&KB, NGOs / kabupaten	Semua lokasi	2022-2024	Kabupaten
	f.	Aspek Kebijakan							
		1. Pemerintah dari dinas pertanian tahun 2019 sebanyak 72 orang; dan 96% diantaranya gagal dan hanya 2 orang	Manajemen fasilitasi bantuan pemerintah sesuai kondisi yang	Bantuan saprodi pemprov tidak perlu dilanjutkan	Program monitoring dan evaluasi talas satoimo	Dinas TPH&P Provinsi Sulsel	Semua lokasi	2022-2024	Provinsi dan Kabupaten

No		ISU	TUJUAN	STRATEGI INTERVENSI	PROGRAM	PIHAK TERKAIT	LOKASI	JANGKA WAKTU	LEVEL	
		yang berlanjut mendapat bantuan.	dibutuhkan.							
		2. Petani perlu mendapat pendampingan untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan talas agar tidak merugikan pada saat panen, dan produksinya dapat terbeli sesuai kesepakatan.	Pendampingan aturan kerjasama yang setara antara petani dan perusahaan.	Konsultan manajemen talas satoimo	Program pendampingan kelompok tani talas satoimo.	Dinas TPH&P Provinsi Sulsel / Dinas Pertanian Kabupaten	Semua lokasi	2022-2024	Provinsi dan Kabupaten	
II		SEKTOR MANUFAKTUR								
	a.	Pemberdayaan Masyarakat								
		Tidak ada pembinaan pengolahan pasca panen khususnya produksi yang tidak masuk standar ekspor untuk menjadi produk turunan talas satoimo	Meningkatkan diversifikasi produk olahan talas	Peningkatan pengolahan makanan berbahan baku talas siap saji	1. Peningkatan keterampilan masyarakat untuk mengolah makanan berbahan baku talas.	Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Perindustrian Provinsi Sulsel / kabupaten	Semua lokasi	2022-2024	Provinsi dan Kabupaten	

No		ISU	TUJUAN	STRATEGI INTERVENSI	PROGRAM	PIHAK TERKAIT	LOKASI	JANGKA WAKTU	LEVEL
					2. Inkubator UMKM				
	b.	GESI							
		Perlu pengembangan produk turunan talas satoimo lewat home industri	Memperkuat peran perempuan	Pemberdayaan dan pendampingan	Peningkatan kapasitas perempuan	Dinas Perindustrian, NGOs / kabupaten	Semua lokasi	2022-2024	Kabupaten

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Wahab, S., 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- ACIAR, 2012. Membuat Rantai Nilai Lebih Berpihak Pada Kaum Miskin: Buku Pegangan Bagi Praktisi Analisa Rantai Nilai. ACIAR Monograph No. 148. Australian Centre for International Agricultural Research. Canberra.
- Agustino, L., 2008. Dasar –Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta. Bandung.
- Andriyanti, R., 2005. Analisis Kinerja Kelembagaan Kemitraan dalam Upaya Peningkatan Mutu Kopi: *Studi Kasus di Desa Ngarip Kecamatan Ulu Belu Propinsi Lampung* [tesis]. Bogor : Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Agustino, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta. Bandung.
- Anderson, J.E., 1979. Public Policy Making. Holt, Rinehartand. Winston, New York.
- Anonim, 2014. Market Brief Satoimo. ITPC Osaka, Jepang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2019. Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2019.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2020. Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2020.
- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan, 2018. Budidaya Talas Jepang Satoimo. Panduan Petunjuk Teknis Leaflet. <https://sulsel.litbang.pertanian.go.id/>
- Challies, E.R.T., 2008. Commodity Chains, Rural Development and the Global Agri-food System. *Geography Compass* 2(2): 375-394, 10.1111/j.1749-8198.2008.00095.x

- Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, 2019. Potensi dan Produk Pangan Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- Dunn, W. N., 2003. Pengantar Analisis Kebijakan, Gajah Mada University. Yogyakarta.
- Eaton, C. dan Shephed A., 2001. *Contract Farming : Partnership for Growth*. FAO Agricultural Services Bulletin 145. Rome.
- Friedrich, C.J., 1963. *Man and His Government*, McGraw-Hill. New York.
- Hadad, I., 2020. Pembangunan Ekonomi Versus Lingkungan: *Siapa Yang Mesti Menang?*, Madani Berkelanjutan. <https://madaniberkelanjutan.id>.
- Heru, S., 2014. Kajian Komoditas Unggulan, Andalan dan Potensial di Kabupaten Grobogan.
- Hogwood, dan Gunn, 2003. Kebijakan Publik, Balai Pustaka. Yogyakarta.
- Kallo, R., dkk., 2019. Prospek Pengembangan Talas Satoimo di Sulawesi Selatan. Buletin Diseminasi Teknik Pertanian. BPTP Sulsel.
- Kaplinsky, R. dan Morris, M., 2003. *A Handbook For Value Chain Analysis*, IDRC-International Development Research Center. DOI:10.1057/9781137373755.0007
- Kasper, W., dan Streit M.E., 1998. *Institutional Economics: Social Order and Public Policy*. Edward Elgar Publishing, Inc., Massachusetts.
- Kuehnast, K., 2001. Empowering the Poor through Decentralization: Brazil Rural Poverty Alleviation Program. *Social Development Notes*., 51.

- Kumari, S., Bharti, N., & Tripathy, K. K., 2021. Strengthening Agriculture Value Chain through Collectives: *Comparative Case Analysis*. International Journal of Rural Management, 17(1_suppl), 40S-68S.
- Masniawati, A. Dkk., 2019. Pengembangan dan Peningkatan Produksi Talas Satoimo di Sulawesi Selatan, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- Minantyorini, dan Somantri I.H., 2002. Panduan Karakteristisasi dan Evaluasi Plasma Nutfah Talas Taro (*Colocasia Esculenta* L. Schott). Sekretariat Komisi Nasional Plasma Nutfah. Bogor.
- Miyasaka, S.C., 1979. Calcium nutrition of taro (*Colocasia esculenta* (L.)Scholt) and Its Possible Relationship to Guava Seed Disease, Thesis, University of Hawaii.
- Nugroho, R., 1994. Public Policy, Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nugroho, R., 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nugroho, R.D., 2004. Komunikasi Pemerintahan. PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Otsubo M., 1996. Asian Vegetables Into Japan; Export Potential, Opportunity and My'ths. Proceedings of Asian Food Industry Conference (Id;Lee, B. and rinsley, R.). RIRDC Research Paper No. 9612:22-28.
- Parsons, W., 2001. Public Policy: *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media. Jakarta.
- Prihatman, K., 2000. *Talas (Colocasia esculenta L.)*. ITG Budidaya Pertanian. Jakarta.
- Rao, V. M., 1983. Barriers in Rural Development. *Economic and Political Weekly*, 18(27), 1177–1190.

- Rich, K. M., 2004. A Discussion Note on Value-Chain Analysis in Agriculture: Methodology, Application, and Opportunities. Agrifood Consulting International. Ha Noi, Viet Nam.
- Scoones, I., 2015. Sustainable Livelihoods and Rural Development. Fernwood Publishing. Winnipeg, CA.
- Solichin, A.W., 2005. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Subarsono, A., 2005. Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Varma, S. P., 1999. Teori Politik Modern. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Winarno, B., 2007. Kebijakan Publik: *Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Yang, Y., 2021. Evolution Of Habitat Quality and Association With Land-Use Changes In Mountainous Areas: A Case Study of the Taihang Mountains in Hebei Province, China. *Ecological Indicators*, 129, 107967.
- Yustika A.E., 2006. *Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori dan Strategi*. Bayumedia Publishing. Malang.

Website:

<https://www.agrofarm.co.id/2019/08/17113/> Talas Beku Sulsel
Tembus Pasar
Jepang 12 Agustus, 2019